

LAPORAN PENELITIAN KOLABORASI

SUMBER PEMBIAYAAN : PNBP TAHUN 2021

KONTRIBUSI WARGA TRANSMIGRASI DI KECAMATAN WONOSARI  
TERHADAP KETAHANAN PANGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO



DI SUSUN OLEH :

KETUA PENELITIAN : RONI LUKUM, S.Pd, M.Sc  
NIP : 197303232000031002  
ANGGOTA PENELITIAN : HJ. MAISARA SUNGE, SH. MH  
NIP : 195608071986022001  
ANGGOTA PENELITIAN : Dr. LUCYANE DJAAFAR, SH, M.Pa  
NIP : 196811062000031002  
MAHASISWA : SOFYAN HAMID  
MAHASISWA : SUGIATO YUSUF  
LEMBAGA MITRA : DINAS PANGAN KAB. BOALEMO

JURUSAN ILMU HUKUM DAN KEMASYARAKATAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TAHUN 2021

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FIS**

Judul Kegiatan : Kontribusi Warga Transmigrasi Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari Bagi Pemerintah Daerah Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo

**KETUA PENELITIAN**

Nama Lengkap : Roni Lukum, S.Pd., M.Sc.  
NIDN : 0023037308  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Nomor HP : 081340731528  
Email :

**ANGGOTA PENELITIAN (1)**

Nama Lengkap : Malsara Sunge, SH, MH  
NIDN : 0007085605  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Durasi Penelitian : 1 tahun  
Meliputi keseluruhan

Penelitian Tahun Ke : 1

Biaya Penelitian : Rp 10.000.000,-  
Meliputi keseluruhan

Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 10.000.000,-  
- Dana Internal PT : -  
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Zubedra Ngilu, M.Pd.  
NIP/NIK. 196705091998032002

Gorontalo, 25 Oktober 2021  
Ketua-Peneliti,

(Roni Lukum, S.Pd., M.Sc.)  
NIP/NIK. 197303232000031002

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. Achik Isa, M.Si)  
NIP/NIK. 196105261987031005



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Keaslian Penenlitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1.kajian Pustaka .....	11
2.1.1.Pengertian Pangan .....	11
2.1.2.Pengertian Ketahanan Pangan .....	14
2.1.3. Ketersedian Pangan .....	19
2.1.4. Mutu Pangan .....	20
2.1.5. Kemandirian Pangan .....	21
2.1.6. Kedaulatan Pangan .....	24
2.1.7. Swasembada Pangan .....	30
2.1.8. Memahami Konsep Ketahanan Nasional .....	35
2.1.9. Teori Perubahan Sosial Dalam menentukan Strategi Ketahanan Wilayah .....	38

2.1.10. Teori Penetapan status Desa Dalam mengukur Progresitas Desa Dalam Menentukan Ketahanan Wilayah .....	39
2.1.11. Teori Kemiskinan dalam menentukan status ketahanan wilayah disuatu Daerah .....	41
<b>2.2. Landasan Teori .....</b>	<b>43</b>
2.2.1. Kontribusi Warga Transmigrasi .....	43
2.2.2. Indeks Ketahanan Pangan .....	44
2.2.3. Faktor Penghambat Warga Transmigrasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo .....	47
2.2.4. Upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam mendukung warga Transmigrasi dalam mewujudkan program ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
3.1. Metode Penelitian .....	53
3.1.1. Jenis Penelitian .....	53
3.1.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	54
3.1.3. Fokus Penelitian .....	54
3.1.4. Sumber Data .....	56
3.1.5. Tehnik Pengumpulan Data .....	57
3.1.6. Analisis Data .....	58
3.1.7. Pengecekan dan Keabsahan Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Wonosari .....	60
4.1.1. Batas Wilayah Kecamatan Wonosari .....	60
4.1.2. Jarak antara Desa dengan ibukota Kecamatan Wonosari .....	60
4.1.3. Klasifikasi Desa di Kecamatan Wonosari .....	62

4.1.4. Status Hukum Desa di Kecamatan Wonosari .....	64
4.1.5. Keadaan Geografis .....	65
4.1.6. Keadaan Demografi .....	66
4.1.7. Keadaan Bidang Pendidikan .....	70
4.1.8. Keadaan Bidang Kesehatan .....	81
4.1.9. Keadaan Agriculture (Pertanian ) .....	88
4.1.10. Keadaan Infrastruktur Pendukung Program Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari .....	95
4.1.11. Keadaan Sektor Industri, Perdagangan dan keuangan di Wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo .....	98
<b>4.2. Hasil Penelitian .....</b>	<b>102</b>
4.2.1. Kontribusi Warga Transmigrasi Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo .....	102
a. Kontribusi pada bidang Pertanian dan perkebunan .....	102
b. Kontribusi pada bidang peternakan sebagai bagian dari Program ketahanan pangan .....	121
c. Kontribusi pada bidang Perdagangan sebagai bagian dari Program ketahanan Pangan.....	123
d. Kontribusi Pada bidang Industri Rumahan (kerajinan) sebagai bagian dari program ketahanan Pangan .....	125
e. Kontribusi Pada Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai bagian dari program ketahanan pangan.....	127
4.2.2. Indeks Ketahanan Pangan di Wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. ....	129
a. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan air bersih, rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan air bersih, padi jagung, ubi kayu dan ubi jalar.....	129
b. Persentase Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan .....	130

c. Persentase Rumah Tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persenterhadap total pengeluaran .....	130
d. Persentase Rumah Tangga tanpa akses listrik .....	131
e. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun .....	132
f. Persentase Rumah tangga tanpa akses ke air bersih .....	134
g. Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. ....	135
h. Persentase balita tinggi badan di bawah standar (stunting).....	136
i. Angka harapan hidup saat lahir, perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya .....	138
4.2.3. Hambatan warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. ....	139
4.2.4. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Wonosari terhadap warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupatenBoalemo Provinsi Gorontalo. ....	142
<b>4.3. Pembahasan. ....</b>	<b>143</b>
4.3.1. Kontribusi warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari Terhadap Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. ....	149
4.3.2. Indeks Ketahanan pangan di Wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. ....	152
4.3.3. Hambatan warga transmigrasi di dalam membangun Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. ....	157
4.3.4. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Wonosari Terhadap Warga Transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. ....	159
<b>BAB V PENUTUP. ....</b>	<b>162</b>
5.1. Kesimpulan .....	162
5.2. Saran .....	163
Daftar Pustaka .....	166

Lampiran 1. Podoman wawancara .....167  
Lampiran 2. Dokumentasi lapangan .....188

**KONTRIBUSI WARGA TRANSMIGRASI  
DI KECAMATAN WONOSARI TERHADAP KETAHANAN PANGAN  
BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO  
Abstrak**

**Roni Lukum,S.Pd.M.Sc**

Kecamatan Wonosari merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Boalemo sebagai daerah tujuan Transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Pusat dalam rangka menanggulangi tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Dengan demikian wilayah Kecamatan Wonosari sangat baik untuk dilakukan riset mengenai kondisi sosial apa yang terjadi di wilayah tersebut sehubungan dengan penempatan transmigrasi. Biasanya penempatan transmigrasi di suatu wilayah dapat berdampak positif, tetapi juga akan ada gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat lokal. Untuk menelusurinya dilakukan riset dengan judul : "*Kontribusi Warga Transmigrasi Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo*".

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah ingin mengetahui kontribusi dari warga transmigrasi terhadap ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dan manfaat Penelitian untuk mengurangi sentimen negatif warga etnis lokal pada warga transmigrasi yang telah memberikan kontribusi positif bagi program ketahanan pangan Kabupaten Boalemo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil riset menunjukkan warga transmigrasi hampir 65% menempati wilayah kecamatan Wonosari telah berkontribusi terhadap ketersediaan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Hal ini ditunjukkan oleh Produksi beras, produksi hewan ternak, sayur mayur (hortikultura) dan disektor usaha perdagangan sangat besar.

Berdasarkan hasil riset ini akan menambah hubungan harmonis kepada warga transmigrasi dengan etnis lokal yang telah ikut berpartisipasi dalam membangun program pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Rekomendasi penelitian berharap seluruh warga lokal dan pemerintah daerah Kecamatan Wonosari dan pemerintah kabupaten Boalemo ikut bersama menjaga hubungan harmonis diantara warga transmigrasi dengan etnis lokal untuk komitmen dalam mewujudkan program ketahanan Pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

**Kata Kunci : Kontribusi warga Transmigrasi pada ketahanan Pangan.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka program pemerintah Orde Baru menanggulangi tingkat kepadatan penduduk di pulau Jawa Pemerintah pusat melakukan upaya program transmigrasi dalam mencegah tingkat kepadatan penduduk akibat adanya urbanisasi penduduk sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang sangat tersentralisasi melalui bidang sarana prasarana. Kebijakan ini mengakibatkan tingkat kepadatan penduduk di wilayah kepulauan Jawa.

Dengan adanya kebijakan pemerintah Orde Baru yang lebih berorientasi pada pembangunan di pulau Jawa atau yang dikenal dengan *center development of Java* mengakibatkan berbagai problem yang dihadapi oleh pemerintah pusat khususnya di daerah Pulau Jawa. Misalnya tingkat kepadatan penduduk di pulau Jawa mengalami peningkatan. Dapat dikatakan sebagian besar penduduk di Indonesia atau hampir 65 % warga negara Indonesia melakukan urbanisasi ke Pulau Jawa. Kegiatan urbanisasi penduduk inilah yang membuat pemerintah Pusat utamanya di DKI Jakarta menjadi problem tersendiri menyangkut kepadatan penduduknya.

Dengan kondisi laju kepadatan penduduk di Pulau Jawa ini, maka pemerintah Pusat melalui pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melakukan kebijakan pemerintah berupa program transmigrasi. Program Transmigrasi yang dilakukan pemerintah Pusat bagi penduduk di daerah pulau Jawa dengan melakukan pendataan kepada penduduk Jawa yang berkeinginan melakukan transmigrasi ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam melakukan program Transmigrasi dengan memberikan lahan 2 Ha dan rumah ukuran 36 M2 dengan pekarangan rumahnya. Disamping itu pula pemerintah

memberikan bantuan dana dalam mengolah pertanian dan bahkan subsidi usaha.

Dengan upaya tersebut pemerintah pusat berhasil melakukan program transmigrasi kewilayah-wilayah daerah yang tingkat kepadatan penduduknya yang masih jarang. Diantaranya wilayah Provinsi Irian Jaya, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sumatra, Provinsi Sulawesi termasuk di daerah Provinsi Gorontalo. Strategi pemerintah pusat dalam melakukan upaya penanggulangan tingkat kepadatan penduduk di daerah pulau Jawa inilah yang selama ini dapat mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa melalui program transmigrasi. Memang tantangan yang dihadapi oleh mereka warga transmigrasi di setiap daerah tujuan transmigrasi berbeda dimasing-masing daerah. Namun tantangan tersebut dapat dilewati bagi warga transmigrasi tersebut. Misalnya gesekan antara etnis lokal dengan warga transmigrasi akibat kecemburuan sosial. Namun gesekan-gesekan tersebut lambat laun dapat ditekan oleh pemerintah daerah dalam membangun hubungan harmonis antara etnis lokal dengan warga transmigrasi.

Bila melihat di beberapa daerah dimana yang menjadi tujuan penempatan warga transmigrasi oleh pemerintah pusat seperti di Provinsi Irian Jaya, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sumatra, Provinsi Sulawesi dan di Provinsi Gorontalo, terdapat kemajuan dari aspek ketahanan pangan di daerah tujuan diadakannya program Transmigrasi. Untuk daerah provinsi Gorontalo sendiri sebagai daerah penempatan transmigrasi khususnya di daerah kabupaten Boalemo tepatnya di kecamatan Wonosari warga transmigrasi memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan ketahanan pangan bagi daerah kabupaten Boalemo. Kondisi ini terlihat dimana tanah-tanah yang tadinya tidak produktif menjadi lahan produktif sebagai akibat dari semangat warga transmigrasi dalam mengelola lahan pertaniannya. Kondisi saat ini warga transmigrasi yang ada di Kecamatan Wonosari mengalami perubahan yang sangat pesat. Khususnya dalam pengelohan lahan pertanian yang telah memperkuat ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo.

Dampak dari adanya program transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari memberikan pengaruh kepada ketersediaan pangan masyarakat kabupaten Boalemo, karena apa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan akan pangan dapat tersedia baik bagi rumah tangga warga transmigrasi maupun penduduk lokal kabupaten Boalemo yang memerlukan ketersediaan pangan dapat dipenuhi oleh pasar yang ada di daerah Kabupaten Boalemo. Memang secara kasat mata ketersediaan pangan bagi warga masyarakat transmigrasi dan warga masyarakat kabupaten Boalemo terpenuhi, tetapi bukan berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ketahanan pangan sudah semakin baik tanpa adanya riset yang menunjukkan kepada setiap kepala Rumah tangga akan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Fakta ini dapat diungkap melalui pengetahuan akan indikator ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan mengikuti model FAO atau standar indikator yang digunakan BPPS dalam melihat kemampuan daerah dalam membangun ketahanan pangan. Semua upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan akan dipengaruhi oleh variabel ketersediaan pangan atau produksi pangan di suatu daerah. Faktor penentu dalam meningkatkan ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh peran serta warga masyarakat dalam mengolah pertanian. Pengelolaan pertanian yang unggul dan profesional dapat mendukung produktivitas menuju ketahanan pangan di suatu daerah. Dengan demikian bila warga masyarakatnya mampu mengelola pertanian secara profesional akan dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kabupaten Boalemo.

Indikator produktivitas pertanian hanya salah satu dalam mengukur indeks ketahanan pangan di daerah kabupaten Boalemo. Namun masih ada indikator pendorong dalam mencapai ketahanan pangan diantaranya kebutuhan dasar setiap rumah tangga yang terpenuhi seperti kebutuhan akan giji, kebutuhan akan pendidikan, pendapatan warga masyarakat dan juga kebutuhan akan layanan kesehatan. Semua indikator ini akan menjadi penentu apakah daerah Kabupaten Boalemo sebagai satu daerah sasaran program Transmigrasi khususnya di daerah Kecamatan Wonosari dapat berkontribusi

bagi ketahanan pangan di daerah. Atau sebaliknya apakah kehadiran warga transmigrasi akan menjadi beban pemerintah daerah.

Berdasarkan pertanyaan di atas apakah kontribusi warga transmigrasi bagi ketahanan pangan di wilayah kecamatan Wonosari khususnya bagi warga masyarakat di daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, akan dapat ditelusuri melalui hasil riset yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan Wonosari. Namun sekilas pandangan mata kehadiran warga transmigrasi di daerah kabupaten Boalemo khususnya di kecamatan Wonosari telah merubah kondisi lahan pertanian di wilayah itu. Dimana sebelum kehadiran warga transmigrasi di kecamatan Wonosari tanah-tanah yang tadinya tidak produktif menjadi lahan produktif bagi olahan bidang pertanian.

Kondisi saat ini di wilayah kecamatan Wonosari menjadi lumbung padi bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo, dan bukan hanya komoditas beras, namun disertai dengan lahan perkebunan sayur, rica, bawang, perkebunan pepaya, perkebunan bawang, tomat bahkan usaha peternakan pun berkembang dengan pesatnya. Dimana masing-masing warga transmigrasi telah bertenak sapi, kambing, ayam, bebek dll. Semua ini akan mempengaruhi ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo.

Dengan demikian upaya pemerintah pusat di era Orde Baru telah merubah kondisi warga transmigrasi di daerah asal mereka hanya menjadi pengemis dan pemulung, bahkan ada juga warga transmigrasi yang hidup pas-pasan di daerah asalnya menjadi berubah setelah sekian lama menempati daerah tujuan transmigrasi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Boalemo khususnya di kecamatan Wonosari, warga transmigrasi dengan etos kerja yang tinggi akhirnya menjadi pelaku ekonomi di daerah tujuan. Semua ini berkat semangat dan kerja keras warga transmigrasi dalam merubah hidup mereka menjadi seorang petani pada saat di awal masuk daerah Kabupaten Boalemo. Kini warga masyarakat transmigrasi menjadi pemain baru dalam pasar di kabupaten Boalemo. Kondisi ini ditunjukkan banyak warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari membuka usaha perdagangan, misalnya melalui usaha

toko kebutuhan bangunan, usaha perbengkelan dan penjualan onderdil kendaraan bermotor dll.

Keberhasilan warga transmigrasi di daerah Kabupaten Boalemo khususnya di kecamatan Wonosari telah membuka peluang usaha bagi warga penduduk lokal untuk ikut bersama dalam mengelola pertanian, perkebunan dan peternakan di kabupaten Boalemo dalam mewujudkan ketersediaan pangan. Kondisi ini ditunjukkan banyak warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari membuka usaha perdagangan, misalnya melalui usaha toko kebutuhan bangunan, usaha perbengkelan dan penjualan onderdil kendaraan bermotor dan penjualan hasil pangan di toko-toko usaha warga transmigrasi dll.

Keberhasilan warga transmigrasi di daerah Kabupaten Boalemo khususnya di kecamatan Wonosari telah menstimulus bagi warga penduduk lokal untuk ikut bersama dalam mengolah pertanian. Dengan adanya motivasi warga etnis lokal bersama dengan warga transmigrasi membuat program pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat diwujudkan. Semua ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dan dukungan pemerintah daerah Kabupaten, baik pemerintah kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo dengan mengizinkan pabrik pengolahan tebu yang ada di daerah kecamatan Paguyaman sebagai daerah tetangga pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Dengan adanya kehadiran pabrik gula Tolangohula para petani di kedua daerah baik pemerintah kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo dapat menampung bagi petani tebu di kedua daerah tersebut. Kondisi ini akan memberikan pengaruh bagi ketahanan pangan warga masyarakat di daerah kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Sarana pendukung lainnya pemerintah daerah kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo memperbaiki sarana dan prasarana pendukung distribusi pertanian menuju Pabrik Tolangohula. Seperti pengaspalan jalan dan pembukaan jalan baru ketitik pertanian, perkebunan dan peternakan yang digunakan oleh warga transmigrasi. Manfaat yang dirasakan oleh petani

mengurangi biaya angkutan menuju tempat pemasaran atau pabrik dalam menampung hasil usaha bagi petani tebu di kedua daerah baik warga transmigrasi kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Kondisi ini akan memberikan pengaruh bagi ketahanan pangan warga masyarakat di daerah kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo.

Bentuk dukungan inilah yang dapat menjaga stabilitas harga dipasar-pasar tradisional yang ada di wilayah kabupaten Boalemo. Untuk melihat sebesar inflasi hasil-hasil pangan olahan warga transmigrasi akan dapat ditelesuri berapa kenaikan harga kebutuhan dasar yang masih berada di wilayah kabupaten Boalemo. Secara kasat mata perbandingan harga yang ada ditangan pertama produsen sampai ditangan pedagang tidak terlalu besar perbedaannya. Semua ini disebabkan oleh karena intervensi pemerintah daerah dalam membuka akses jalan ke wilayah pertanian. Sehingga ongkos angkutannya pun tidak memerlukan biaya tinggi. Dan ini berdampak kepada harga kebutuhan dasar dalam memenuhi kebutuhan pangan dapat terjangkau dan terpenuhi dipasar-pasar tradisional.

Dengan melihat kondisi warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari pada saat ini yang mengalami perubahan baik dari segi fisik bangunan awal yang mereka tempati berubah menjadi bangunan permanen dengan ukuran yang lebih besar dari rumah yang mereka tempati di awal. Bahkan warga transmigrasi telah memiliki investasi lahan yang sangat besar. Semua ini berkat kerja keras warga transmigrasi di daerah Kabupaten Boalemo khususnya di kecamatan Wonosari. Keberhasilan warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari berdampak positif kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Bolamo melalui hasil pajak yang dibayarkan oleh warga transmigrasi. Apalagi melalui usaha perdagangan dan perbengkelan sangat besar bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Boalemo. Dengan demikian warga transmigrasi memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan pangan dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah.

Gesekan-gesekan yang diakibatkan antara penduduk lokal dengan warga transmigrasi tidak perlu diperbesar, karena sesungguhnya warga transmigrasi sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di daerah Kabupaten Boalemo, melalui usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, perbengkelan dan usaha perdagangan. Kontribusi warga transmigrasi bagi ketahanan pangan di daerah kabupaten Boalemo harus diapresiasi oleh warga masyarakat dan pemerintah kabupaten Boalemo. Karena capaian yang ditorehkan oleh warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari memberikan kesadaran kepada warga etnis lokal betapa perlunya membangun hubungan harmonis antara warga transmigrasi dan penduduk lokal dalam membangun ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari demi terwujudnya kemandirian pangan dan keamanan pangan.

Kolaborasi warga transmigrasi dengan penduduk lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan akan menciptakan kemandirian pangan dan keamanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sehingga pemerintah provinsi Gorontalo tidak akan melakukan kebijakan impor pangan yang biasanya dapat merugikan kepentingan petani dan peternak yang ada di masyarakat kabupaten Boalemo.

Untuk menelusuri lebih lanjut apa yang diberikan warga transmigrasi bagi pembangunan di daerah kabupaten Boalemo, penulis melakukan riset dengan obyek penelitian : ***"Kontribusi Warga Transmigrasi di Kecamatan Wonosari terhadap Ketahanan Pangan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo"***.

Dengan adanya riset ini akan membantu warga masyarakat lokal pentingnya membuka diri dan membangun hubungan harmonis antara etnis lokal dengan warga transmigrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mencoba menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi sasaran mengungkap objek penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kontribusi warga transmigrasi di kecamatan Wonosari terhadap ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
- b. Bagaimana indeks ketahanan pangan pemerintah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
- c. Apakah hambatan warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
- d. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Wonosari terhadap warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai harapan penulis dapat kita kemukakan alasan yang akan menjadi out putnya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kontribusi warga transmigrasi di kecamatan Wonosari terhadap ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
- b. Untuk mengetahui indeks ketahanan Pangan bagi pemerintah Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
- c. Untuk mengetahui hambatan warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

- d. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Wonosari terhadap warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian kontribusi warga transmigrasi terhadap Ketahanan Pangan di kecamatan Wonosari bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam meningkatkan ketahanan pangan bagi warga transmigrasi di kecamatan Wonosari.
- b. Penelitian ini dapat mengungkap betapa pentingnya kehadiran warga transmigrasi di kecamatan Wonosari bagi peningkatan ketahanan Pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
- c. Penelitian ini akan menelusuri kontribusi warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari bagi peningkatan ketahanan Pangan yang akan memperkuat pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
- d. Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi penentuan indeks ketahanan Pangan bagi Pemerintah Kecamatan Wonosari di daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dengan penetapan indeks dapat diketahui seberapa besar peran pemerintah daerah Kabupaten Boalemo melalui pemerintah kecamatan Wonosari dalam melaksanakan program ketahanan pangan sebagai program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten sebagai daerah khusus pengembangan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dalam mewujudkan swasemba pangan bagi pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang “Kontribusi Warga Transmigrasi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Terhadap Ketahanan Pangan bagi Pemerintah

daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo”. Merupakan penelitian yang belum dilaksanakan di daerah Provinsi Gorontalo. Karena penelitian ini lahir dari keinginan peneliti yang merasa perlu melakukan kajian pada objek penelitian ini. Oleh karenanya apabila ada penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini terjadi mungkin objek kajian sama tetapi yang akan membedakan terletak dalam fokus penelitian dan indikator penelitian.

Apabila ada penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, maka untuk menghindari kesamaan tersebut peneliti mengambil fokus dalam penelitian adalah pada kontribusi warga transmigrasi dikecamatan Wonosari dimana titik fokus penelitian dapat diamati pada aspek: a). Usaha pengembangan pertanian b). Usaha pengembangan perkebunan. c). usaha pengembangan peternakan. d). Usaha pengembangan usaha perdagangan e). Usaha pengembangan kerajinan. f). kewajiban pembayaran pajak.g). kontribusi pada sektor PAD.

Sementara untuk fokus ketahanan pangan akan dilihat dari indikator ketahanan pangan sebagai berikut :

- a. Produktivitas
- b. Ketersediaan kebutuhan dasar rumah tangga
- c. Giji rumah tangga
- d. Pendidikan
- e. Pelayanan kesehatan
- f. Pendapatan perkapita

Sebagai tambahan fokus dalam penelitian ini peneliti juga akan mengamati Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat warga transmigrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di kecamatan Wonosari bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dan Untuk mengetahui Upaya pemerintah Kecamatan Wonosari dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Pengertian Pangan

Kebutuhan dasar seluruh umat manusia di semua negara adalah pangan, bila pangan suatu negara mengalami krisis atau kelangkaan akan menjadi ancaman bagi negara tersebut. Ancaman yang diakibatkan oleh masalah pangan seperti kurang gizi, Stunting, bahkan kelaparan dan kemiskinan serta kematian masal. Sehingga perlu bagi suatu negara melakukan program ketahanan pangan disetiap negaranya. Untuk lebih dipahami apa itu pangan sebaiknya kita, memberikan rumusan yang jelas apa sesungguhnya pangan tersebut.

Bila dilihat dari pengertian pangan, (*dari Jurnal Industri pertanian ISSN 2656-6559 Volume 01. Tahun 2019 hal 2*) Pangan memiliki pengertian yang sangat luas mulai dari pangan esensial bagi kehidupan manusia yang sehat dan produktif (keseimbangan kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, dan zat esensial lain) serta pangan yang menyangkut atas kepentingan sosial dan budaya seperti untuk kebugaran, kesenangan, kecantikan dan sebagainya. Definisi pangan tidak hanya berarti beras, melainkan pangan yang terkait dengan berbagai hal lain (emawati, 2016). Menurut pasal 1 angka (1) UU Pangan bahwa pangan merupakan segala sesuatu hal yang berasal dari sumber air dan hayati, baik yang dikemas secara olahan maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku lainnya yang perlu digunakan dalam proses penyiapan, pengelohan, dan pembuatan makanan atau minuman. Pengertian pangan di atas memiliki kesamaan yang termuat pula pada pasal 1 ayat (1) PP label dan iklan pangan serta pasal 1 ayat (1) PP Keamanan, mutu dan gizi pangan.

Berdasarkan pengertian pangan di atas, menunjukkan pangan tidak hanya diartikan secara sempit hanya pada kebutuhan dasar seperti beras, tetapi pangan dapat juga diartikan pada proses produksi makanan olahan dan minuman. Sehingga sangat penting ketika suatu daerah ingin membangun ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada menanam padi, jagung, kedelai dll, tetapi harus juga daerah mengupayakan untuk pengolahan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Misalnya pabrik gula dimana dari perkebunan tebu menjadi kebutuhan dasar gula yang sangat diperlukan bagi masyarakat. Pabrik Tapioka menghasilkan terigu berasal dari bahan baku tepung dari ubi kayu menjadi terigu dll. Pengembangan pangan inilah yang diharapkan bagi pemerintah daerah dalam rangka membangun ketahanan pangan bagi suatu daerah.

Bila kita mengkaji dan menggali lagi urgensi dari pangan dapat kita sajikan beberapa uraian dari referensi yang dikutip (*dari Jurnal Industri pertanian ISSN 2656-6559 Volume 01. Tahun 2019 hal 1-10*). Pangan merupakan bahan yang dimakan setiap hari oleh manusia yang berasal dari sumber air dan hayati yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Menurut pasal 1 angka (1) UU Pangan yang dimana kondisi ketika pangan negara sampai dengan perorangan tidak terpenuhi adalah kondisi kerawanan pangan. Kondisi kerawanan pangan ini dapat diatasi dengan peningkatan ketahanan pangan. (Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015), menyatakan bahwa ketahanan pangan dalam pembangunan nasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, dewan ketahanan pangan (2015) telah melakukan analisa, yang dimana faktor pendukung keberhasilan dalam melaksanakan ketahanan pangan yaitu dengan adanya tiga pilar indikator ketahanan pangan diantaranya : (i) ketersediaan pangan; (ii) akses terhadap pangan; dan (iii) pemanfaatan pangan.

Ketersediaan pangan berhubungan dengan terpenuhinya pangan secara fisik dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan pada daerah tertentu. Kondisi dimana pangan tidak terpenuhi merupakan kondisi rawan pangan. Akses terhadap pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, kondisi dimana individu tidak dapat membeli atau memperoleh pangan disebut dengan kondisi rawan daya beli, sedangkan pemanfaatan pangan berhubungan dengan penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi, kondisi dimana gizi dari pangan tersebut tidak terpenuhi merupakan kondisi rawan gizi.

Berdasarkan kutipan tulisan dalam jurnal di atas menunjukkan betapa pentingnya pemerintah daerah kabupaten Boalemo khususnya *top leadernya* memahami arti dan makna pangan bagi kelangsungan pemerintahan daerah yang dia pimpin. Bila konsep dari pangan tidak dimengerti oleh *top leader*, akan membawa masalah bagi pembangunan ketahanan pangan di daerahnya. Oleh karenanya pentingnya *top leader* dalam memahami apa yang akan dilakukan pemerintah daerah, ketika menjalankan program pembangunan ketahanan pangan. Mengapa ini urgen, karena terkadang kepala daerah kurang memahami konsep pembangunan ketahanan pangan. Sehingga berakibat pada bencana kemanusiaan, misalnya adanya kasus gizi buruk, *stunting* yang rendah, dan banyak lagi permasalahan bila pemerintah daerah khususnya *top leadernya* tidak memahami bagaimana memulai program dalam mewujudkan ketahanan pangan diwilayahnya.

Dengan beberapa pemikiran dalam pembangunan ketahanan pangan di atas, pemerintah daerah harus mengambil bagian dalam mengupayakan investasi atau membuka investasi baik lokal maupun regional untuk mengelola pangan dari bahan baku menjadi bahan jadi di daerahnya. Bila program pangan dapat dimengerti secara kolektif oleh pemerintah daerah dakan dapat mewujudkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan yang berujung

kepada swasembada pangan. Bila tujuan swasembada pangan dapat diraih oleh pemerintah daerah dan daerah memiliki kedaulatan pangan. Akan berimplikasi kepada kesejahteraan rakyat. Dimana petani pun akan menerima dampak kesejahteraan dari hasil usaha pertanian, perkebunan yang dilakukan. Bila ini dapat berlangsung disuatu wilayah yang melaksanakan program pembangunan pangan akan membuat wilayahnya sebagai daerah dengan ketahanan pangan yang sangat tangguh sesuai dengan indeks ketahanan pangan.

### **2.1.2. Pengertian Ketahanan pangan.**

Ketahanan pangan menjadi dasar kebijakan suatu negara dalam menjaga ancaman suatu negara dari kemiskinan, kelaparan bahkan kematian karena kelangkaan pangan. Untuk itu ketahanan pangan merupakan bagian yang terpenting dalam pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian hal terpenting dari ketahanan nasional. Distribusi pangan yang tidak merata menjadi kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat nasional. Fenomena tersebut menjelaskan *hunger paradox* yaitu konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dimana telah matangnya ketahanan pangan nasional (yang dicerminkan oleh ketersediaan kalori dan protein di atas angka kebutuhan gizi), namun kelaparan atau kekurangan gizi masih terjadi dimana-mana (*dari Jurnal Industri pertanian ISSN 2656-6559 Volume 01. Tahun 2019 hal 2*).

Menurut (Andini, 2017) bahwa ditingkat nasional ketahanan pangan mencakup penyediaan pangan dalam jumlah dan kualitas dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan basis konsep ketahanan pangan adalah rumah tangga khususnya di wilayah pedesaan. Secara umum, ketahanan pangan didefinisikan sebagai keadaan dimana setiap orang memiliki aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan pangan agar dapat hidup produktif dan sehat. Namun berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015) tentang pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi yang dimana terpenuhinya pangan bagi negara hingga dengan perorangan yang dapat tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Dari perspektif sejarah istilah ketahanan pangan (*food security*) dalam kebijakan pangan dunia pertama kali digunakan tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara-negara berkembang dari krisis produksi dan suply makanan pokok. Jadi dapat dikatakan bahwa munculnya ketahanan pangan karena terjadi krisis pangan dan kelaparan.

Fokus ketahanan pada masa itu, menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan yang nampak pada definisi ketahanan pangan oleh PBB sebagai berikut : "*food security is availability to avoid acute food shortage ini the even of wide spread coop vailure other disaster* (Syarif, Hidayat, Hardiyannsyah dan Sumali, 1999).

Selanjutnya definisi tersebut disempurnakan pada *International Conference Of Nutrition* 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB sebagai berikut : ketahanan pangan adalah tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah dan mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Di Indonesia secara normal dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, istilah kebijakan dan program ketahanan pangan diadopsi sejak tahun 1992 (Repelita VI) yang defenisi formalnya dicantumkan dalam undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan, pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah : kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata

dan terjangkau". pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena (Maleha dan Susanto dalam *Jurnal Industri pertanian ISSN 2656-6559 Volume 01. Tahun 2019 hal 2*) sebagai berikut :

1. Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang merupakan hak yang paling azasi bagi manusia.
2. Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan dan gizi.
3. Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Dapat dikatakan ketahanan pangan merupakan konsentrasi untuk mewujudkan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi. Dalam ketahanan pangan terdapat tiga komponen penting pembentukan ketahanan pangan yaitu : Produksi, dan ketersediaan pangan, jaminan akses terhadap pangan, serta mutu dan keamanan pangan.

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dalam UU RI No. 7 Tahun 1966 yang mengadopsi FAO (*Food Association Organization*), didapat 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu :

1. Kecukupan ketersediaan pangan
2. Stabilitas ketersediaan pangan
3. Fluktuasi dari musim kemusim atau dari tahun ketahun
4. Akseibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan serta
5. Kualitas/keamanan pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

((<https://jdih.bpk.go.id>>2012/03 Kebijakan Pemerintah Dalam Pencapaian Swasembada).

Untuk lebih menelusuri apa sesungguhnya ketahanan pangan marilah kita simak kutipan pengertian dan makna ketahanan pangan (Kebijakan pemerintah daerah dalam pencapaian swasembada pangan beras pada program peningkatan ketahanan pangan). Dikatakan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik dibidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Oleh sebab itu ketahanan pangan merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang.

Ketahanan pangan sendiri menurut literatur memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu,
2. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses,
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial,
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi,
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Salah satu target yang akan dicapai kementerian pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan melakukan swasembada beras.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Penduduk Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 241 juta jiwa. Pada tahun 2011 data BPS menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras mencapai 139kg/kapita lebih tinggi dibanding dengan negara Malaysia dan Thailand yang hanya berkisar 65kg – 70 kg perkapita pertahun. Beras sebagai makanan pokok utama masyarakat Indonesia sejak tahun 1950 semakin tidak tergantikan meski roda energi diversifikasi konsumsi

sudah lama digulirkan, hal ini terlihat bahwa pada tahun 1950an konsumsi beras nasional sebagai sumber karbohidrat baru sekitar 53% dibandingkan dengan tahun 2011 yang telah mencapai sekitar 95%.

Dalam rencana strategis kementerian pertanian menempatkan beras, sebagai satu dari lima komoditas pangan utama. Kementerian pertanian menargetkan pencapaian swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan atas tanaman pangan pada tahun 2010-2014 yakni padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, karena padi sudah pada posisi swasembada mulai tahun 2007, maka target pencapaian selama 2010-2014 adalah swasembada berkelanjutan dengan sasaran produksi padi sebesar 75,7 juta ton GKB (Gabah, Kering, Giling).

Terkait dengan swasembada beras capaian produksi komoditas pertanian selama tahun 2005-2009 telah menunjukkan prestasi sangat baik, antara lain : peningkatan produksi padi dari 57,16 juta ton tahun 2007 menjadi 60,33 juta ton pada tahun 2008 atau meningkat 3,69%, sehingga terjadi surplus 3,17 juta ton GKG, dan mendorong beberapa perusahaan untuk mengeksport beras kelas premium. Target produksi padi 2009 sebesar 63,5 juta ton, sementara berdasarkan ARAM 111 (Juni 2009) produksi padi telah mencapai 63,8 juta ton atau mencapai 100,5 persen dari target tahun 2009. Peningkatan produksi ini telah menempatkan Indonesia meraih kembali status swasembada beras sejak tahun 2007 (<https://jdlh.bpk.go.id/2012/03> *Kebijakan Pemerintah Dalam Pencapaian Swasembada*).

Berdasarkan pengertian ketahanan pangan baik sifatnya teoritik dan kajian juridis diatas, menunjukkan bahwa program ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah, sangatlah penting untuk didukung oleh semua pihak, karena dengan adanya program ketahanan pangan ancaman kelaparan, kemiskinan, dan kematian masal akan dapat dihindarkan dinegara kita sebagaimana yang terjadi dibelahan negara yang ada di benua Afrika seperti

negara Rwanda, negara Ethiopia dsb. Dengan demikian sangatlah penting program ketahanan pangan harus menjadi prioritas bagi setiap daerah di Indonesia khususnya wilayah pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dalam membangun ketahanan pangan. Posisi pemerintah daerah bila dilihat dari pengertian ketahanan pangan adalah sebagai eksekutor, regulator dan sebagai fasilitator dalam mengawasi program ketahanan pangan di daerah. Sehingga pangan sebagai kebutuhan dasar yang diproduksi tidak bertentangan dengan keyakinan agama khususnya bagi agama mayoritas Islam, sehingga tepat di negara kita ada BPPOM dalam menentukan kekhallalan makanan dan minuman hasil produksi pangan di suatu daerah.

### **2.1.3. Ketersediaan Pangan.**

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan ketersediaan pangan adalah : Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak memenuhi kebutuhan”. Hal tersebut dapat berarti kondisi tersedianya pangan bergantung dari hasil produksi dari cadangan pangan suatu daerah, apabila produksi dan cadangan pangan di daerah tersebut tidak mencukupi maka daerah tersebut mendatangkan pangan dari luar daerah atau bisa disebut sebagai impor (*dari Jurnal Industri pertanian ISSN 2656-6559 Volume 01. Tahun 2019 hal 5*).

Indikator ketersediaan pangan khususnya pada Wilayah I memiliki 23 variabel untuk menentukan kondisi pada indikator ketahanan pangan. Variabel ini meliputi (1) Produksi Padi, (2) Produksi jagung, (3) Produksi Ubi kayu, (4) Produksi Kedelai, (5) Produksi Ubi Jalar, (6) Produksi Padi/kapita, (7) Produksi Jagung/Kapita, (8) Produksi Ubi kayu/Kapita, (9) Produksi Kedelai/Kapita, (10) Produksi Ubi Jalar/Kapita, (11) Luas Panen Padi, (12) Produktivitas Padi, (13) Produktivitas Ubi Kayu, (14) Produktivitas Ubi Jalar, (15) Produktivitas Jagung, (16) Produktivitas Kedelai, (17) Luas panen Jagung, (18) Luas Panen Kedelai,

(19) Luas Panen Ubi kayu, (20) Luas panen Ubi Jalar, (21) kepadatan penduduk,(22) Luas lahan yang mendapatkan air irigasi, (23) Presentase Rumah Tangga yang berusaha di bidang pertanian.

Berdasarkan pengertian dan indikator ketersediaan pangan di atas, dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah apa yang harus dilakukan bila suatu daerah dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program ketahanan pangan yang salah satu indikatornya adalah ketersediaan pangan bagi suatu daerah. Uraian di atas tentang ketersediaan pangan akan memudahkan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan pangan disuatu daerah khususnya untuk wilayah kabupaten Boalemo di Kecamatan Wonosario. Dapat dikatakan program ketahanan pangan merupakan program kolektif antara warga masyarakat yang bergerak disektor pertanian, perkebunan, disektor peternakan bersama pemerintah sebagai penyedia fasilitas dalam hal ini pemerintah daerah harus membangun irigasi dan waduk sebagai fungsi pengairan dan juga memfasilitasi pada program pemasaran serta produksi dari bahan baku menjadi baha jadi. Bila sinergitas tokoh sentral dalam membangun ketahanan pangan ini dilakukan oleh kedua belah pihak apa yang dicita-citakan pemerintah pusat dan daerah dapat tercapai dalam mewujudkan kemandirian pangan dan Swasembada pangan di Negara kita yang kita cintai Negara kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.4. Mutu pangan**

Mutu pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dimasyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Mutu pangan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Variabel mutu terdiri dari (1). Presentase balita yang terlayani Fasilitas kesehatan, (2). Presentase bayi yang terlayani fasilitas kesehatan, (3). Persentase kecukupan vitamin A pada Bayi, (4). Angka

harapan hidup, (5). Persentase Rumah Tangga Berhidup Sehat, (6). Jumlah tenaga kesehatan, (7). Jumlah Puskesmas, (9). Jumlah Rumah Sakit, (10). Presentase penduduk dengan akses air minum layak, (11). Persentase Balita tidak Underweight (gizi buruk + kurang gizi), (12). Persentase Balita tidak stunting (sangat pendek + pendek), (13). persentase perempuan 15 tahun keatas bersekolah.

Indikator mutu berkaitan dengan asupan gizi serta kesehatan masyarakat. Semakin tinggi nilai FSQ maka daerah tersebut dapat dikatakan mempunyai pangan yang bergizi dengan masyarakat yang sehat.

#### **2.1.5. Kemandirian Pangan**

Cita-cita dan harapan semua negara dalam rangka melaksanakan program ketahanan pangan dalam mencapai kemandirian pangan di negaranya. Bila keinginan ini dapat diwujudkan oleh pemerintah pusat dan di daerah, maka program ketahanan pangan dapat diraih. Dampak dari program ketahanan pangan akan melahirkan kemandirian pangan di suatu negara. Sehingga posisi negara kita bukan lagi sebagai pengimpor pangan tetapi menjadi negara pengekspor pangan. Kondisi inilah akan menjadi pendapatan bagi suatu negara dari sektor pangan. Hasilnya akan kita lihat melalui APBN setiap tahun. Dan implikasinya kepada kesejahteraan warga negara Indonesia.

Untuk mengetahui kemandirian pangan marilah kita simak tentang pengertian kemandirian pangan. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial,

ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat (<http://www.bulog.co.id.>beraspangan>).

Berdasarkan pengertian dari kemandirian pangan di atas dapat menjadi landasan kita dalam membangun ketahanan pangan di suatu wilayah. Seluruh

program ketahanan pangan diharapkan outputnya adalah kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan swasembada pangan sebagai tujuan akhir dari program ketahanan pangan disuatu wilayah . khususnya bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Bila kita melihat apa yang menjadi tujuan pelaksanaan program ketahanan pangan yang dikemukakan oleh para penulis artikel membangun kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan (Delima Hasri Azahari 2008 : 175). Komitmen nasional dan dunia untuk mewujudkan ketahanan pangan didasarkan atas peran strategis perwujudan ketahanan pangan dalam :(i) memenuhi salah satu hak azasi manusia ;(ii) membangun kualitas sumber daya manusia; dan (iii)membangun pilar dari ketahanan nasional. Peran memenuhi salah satu hak azasi manusia dinyatakan dalam undang-undang No.7 tahun 1996tentang pangan, bahwa hak setiap orang untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi sama prinsipnya dengan hak memperoleh pangan yang cukup dan hak azasi manusia untuk bebas dari kelaparan (Pakpahan, 2008).

Pangan yang cukup sebagai prasyarat bagi perkembangan organ-otrgan fisik manusia sejak dari kandungan, yang juga berpengaruh pada perkembangan intelegensinya secara optimal sesuai potensi genetiknya generasi yang mempunyai kondisi fisik yang tangguh dan intelegensia yang tinggi, sangat diperlukan untuk melaksanakan pembangunan dalam era persaingan yang sangat ketat. Generasi demikian memerlukan masukan nutrisi makro dan mikro yang cukup dalam proses pembentukan fisik maupun rohaninya.

Selanjutnya ketahanan pangan merupakan pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini dipandang strategis karena tidak satupun negara dapat membangun perekonomian tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pangannya. Khusus bagi Indonesia sektor pangan adalah sekaligus sebagai sektor penentu tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk yang bekerja di *on-farm* yang terdapat di pedesaan yang terdiri dari petani berlahan sempit dan

buruh tani yang sebagian besar adalah rakyat miskin. Tidak kalah pentingnya pangan juga menentukan kesejahteraan konsumen miskin perkotaan yang sebagian besar porsi pendapatannya digunakan untuk konsumsi (Welirang,2007).

Berdasarkan uraian konsep program ketahanan pangan tentang urgensinya dalam mewujudkan kemandirian pangan bagi suatu negara dikatakan bahwa program ketahanan pangan harus dijadikan sebagai prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Memang bila melihat dari uraian di atas petani diklasifikasikan sebagai kelas terendah dalam strata masyarakat di Indonesia. inilah yang harus diubah pada program ketahanan pangan. Mestinya petani di Indonesia bila kemandirian pangan dapat dicapai melalui program ketahanan pangan, maka petani yang dianggap masyarakat kelas rendah akan menjadi masyarakat kelas atas. Mengapa karena mereka sebagai pelaku ekonomi di desa. Hal ini terbukti di wilayah kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo sebagai warga transmigrasi. Saat ini mereka berada pada status kelas menengah di wilayah Kecamatan Wonosari. Sehingga paradigma petani sebagai obyek ketahanan pangan saat ini petani sebagai subyek ekonomi di wilayahnya. Semua ini terjadi akibat keberhasilan dalam melaksanakan program ketahanan pangan.

Dengan demikian dapat dirumuskan ada hal yang harus diubah dalam program pelaksanaan Ketahanan pangan. Dimana petani hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan pangan, dijadikan sebagai petani sebagai pilar ekonomi bagi pembangunan pangan di negara kita. Sehingga kita bisa sama dengan negara eropa yang petaninya sebagai kelas menengah di negaranya. sehingga di negara Eropa profesi PNS dianggap tidak sebagai prioritas warganya. Karena warga masyarakat di Eropa lebih tertarik pada profesi swasta bukan birokrasi. Semetinya pemerintah dan masyarakat kita tidak lagi konservatif menilai bahwa profesi petani itu adalah masyarakat kelas rendah. Justru petanilah sebagai lokomotif pembangunan pangan di negara kita, dan negara harus menyediakan fasilitas untuk itu. Maksudnya bila negara

menyediakan fasilitas dalam mewujudkan ketahanan pangan, petani pun akan mengalami kualitas derajat hidupnya. Artinya jangan ada alasan negara bahwa kita mengalami kelangkaan pangan sehingga kebijakan negara selalu mengimpor pangan dari negara lain. Inilah yang mematikan petani di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa petani kita kondisinya miskin dipedesaan, sementara pengusaha beras atau pangan hidupnya mewah dan parlente.

Berdasarkan fenomena petani dipedesaan sebagai lokomotif dari program ketahanan pangan tidak terulang lagi dimasa-masa mendatang. Sudah saatnya pemerintah pusat merubah strategi kebijakan dalam menempatkan petani sebagai bagian sentral dalam pembangunan pangan di negara kita.

#### **2.1.6. Kedaulatan Pangan**

Indonesia telah memiliki undang-undang Pangan yang baru untuk menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1996 yang telah berusia 16 tahun, yaitu UU No.18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam undang-undang baru ini, persoalan pangan ditujukan untuk mencapai tiga hal sekaligus yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Dengan demikian, UU baru ini akan menjadi identitas bagi pembangunan pertanian dan pangan Indonesia.

Masuknya aspek kedaulatan pangan merupakan konsekuensi bahwa Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya melalui Undang-Undang No 11 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rihgts*). Basis argumennya adalah bahwa selama ini, negara belum secara sistematis mampu mengakui hak atas pangan warganya. Dengan kedaulatan pangan, diharapkan tidak lagi dijumpai persoalan-persoalan dasar tentang pangan, seperti gizi buruk, kelaparan, rawan pangan, dan sebagainya . UU pangan yang baru ini berupaya memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warga negaranya dikutip dalam jurnal Kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan

*nasional Food Sovereignty as the basis to Realize National Food Security* (Syahyuti,Sunarsih dkk 2015 : 96).

Selama ini pendekatan pembangunan pangan di Indonesia mengandalkan kepada pendekatan “ketahanan pangan “. Ketahanan pangan merupakan paradigma yang secara resmi digunakan pemerintah dalam pemenuhan pangan penduduk dan pertanian terkait pangan pada umumnya. Namun dengan undang-undang yang baru diadopi juga paradigma “kedaulatan pangan”. Konsep dan pendekatan kedaulatan pangan dapat melengkapi dan memyempurnakan pencapaian ketahanan pangan (Syahyuti,Sunarsih dkk 2015 : 96 ).

Diadopsinya kedaulatan pangan sebagai salah satu tujuan pembangunan pertanian nasional dalam membutuhkan penyusunan rencana dan pendekatan dan pembangunan pangan yang berbeda. Namun demikian, setelah hampir mencapai tiga tahun sejak diundangkan perumusan dan pemahaman konsep tentang kedaulatan pangan belum memperoleh kesepakatan yang tegas. Berbagai wacana yang berkembang masih membatasi diri kepada ketahanan pangan, bahkan sebagian pihak menampakan penolakan terhadap kedaulatan pangan , sebagai alasannya adalah karena berasal dari pihak NGO. Tulisan ini bertolak dari kondisi tersebut, untuk melakukan analisis review dari berbagai pemikiran yang berkembang dari berbagai kalangan. Untuk memberikan masukan untuk rumusan yang lebih sesuai bagaimana mestinya kedaulatan pangan dimaknai dan dijalankan.

Wacana tentang kedaulatan pangan masih baru di Indonesia dan hamoir tidak ada refrensi ilmiah yang bisa diacu. Berdasarkan perdebatan konsep kedaulatan pangan kami sebagai penulis mengatakan bahwa konsep kedaulatan pangan memiliki makna berbeda dengan konsep ketahanan pangan. Mengapa karena terkadanga suatu negara memiliki ketahanan pangan yang tinggi, tetapi tidak memiliki kedaulatan pangan. Misalnya kebijakan inpor yang sering dilakukan oleh pemerintah. Kebijana inpor menunjukkan bahwa

negara kita belum berdaulat dalam pembangunan pangan. Apalagi harga – harga pangan yang diperoleh melalui impor harga ditentukan oleh negara pengespor pangan.

Berdasarkan asumsi diatas bahwa ketahanan pangan memiliki arti dan makna yang berbeda dalam membentuk kedaulatan pangan. Dapat kami katakan negara yang memiliki kedaulatan pangan akan lebih memiliki power dalam menetapkan harga pangan dunia. Sementara negara yang telah memiliki ketahanan pangan yang tinggi sering tidak berdaulat dalam menetapkan harga. Dapat dikatakan harga selalu dikuasai oleh kelompok negara tertentu bahkan organisasi internasional yang bergerak dalam pangan pun sering mempermainkan harga pangan di suatu negara.

Dengan demikian sangatlah penting kedaulatan pangan pemerintah Indonesia raih. Selain kemampuan dalam memperoleh predikat ketahanan pangan yang tinggi. Artinya makna ketahanan pangan dan kedaulatan pangan berbeda dalam hal implementasinya di suatu negara. Negara yang memiliki kedaulatan pangan akan menjadi pemain atau pelaku ekonomi dunia dalam mengendalikan pangan internasional.

Dapat dikatakan juga bila suatu negara memiliki kedaulatan pangan, akan lebih disegani dalam pergaulan internasional. Inilah makna kedaulatan pangan menurut peneliti. Untuk lebih meyakinkan kembali apakah ada referensi yang mendukung pernyataan di atas, kita perlu juga mengutip pendapat para ahli yang bergerak dalam pangan internasional atau dari para analis kedaulatan pangan sebagaimana yang ada di bawah ini sebagai berikut :

#### **A. Historik Perkembangan Konsep Kedaulatan Pangan Tahun 1992 sampai 2015.**

Tidak bisa dipungkiri, kedaulatan pangan adalah konsep yang lahir sebagai respon dari kekecewaan pembangunan pangan yang terjadi dibanyak belahan dunia. Meskipun pembangunan pertanian dan pangan telah mampu mencapai produksi dan produktivitas yang tinggi, namun sebagian petani terutama dinegara berkembang hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera,

berlangsungya kerusakan sumber daya pertanian, dan juga perdagangan yang tidak adil. Banyak pihak yang tidak puas terhadap kondisi pangan lokal dan perdagangan pangan dunia. Bukti menunjukkan bahwa meskipun ketahanan pangan tercapai, namun belum mampu menjamin kondisi pangan lokal dan juga tidak mampu mengangkat martabat petani.

Ketahanan pangan merupakan konsep yang diterima luas di banyak negara dan telah berjalan cukup lama. Konsep “ketahanan pangan” (*food security*) mulai digodok semenjak akhir tahun 1970-an, sedangkan “kedaulatan pangan” mulai diwacanakan semenjak tahun 1992 atau lebih dari 30 tahun setelahnya.

### **B. Perkembangan Konsep Kedaulatan Pangan di Dunia Internasional.**

Paparan berikut memperlihatkan secara kronologis bagaimana perubahan batasan tekanan, dan fokus dalam kedaulatan pangan semenjak pertama kali diciptakan pada tahun 1992. Perkembangan ini tidak hanya dalam konteks konsep secara *an sich*, namun juga berbagai pemikiran, kesepakatan-kesepakatan, dan aksi yang mendukung kristalisasi konsep kedaulatan pangan yang juga mencakup keterlibatan organisasi pangan resmi dunia yakni FAO.

Konsep kedaulatan pangan dilahirkan pertama kali saat pertemuan petani yang dibentuk tahun 1992 pada kongres *The National Union of Farmers and livestock Owners* (UNAG). Kegiatan ini dikoordinasikan oleh petani yang tersebar mulai dari Afrika, Amerika Utara, Tengah dan Selatan, Asia, Karibia, dan Eropa. Para pencetus dan penggerak ini berada dalam organisasi *Via Campesina* yang mencakup *Family Farmers Association (UK)*, *Confederation Paysanne (France)*, *Braratiya Kisan Union (India)*, *Landless Workers Movement (Brasil)*, *National Family Farm Coalition (USA)* dan para petani tak bertanah *Landless Peoples Movement (South Africa)*.

Pada bulan April 1996 berlangsung pertemuan kedua yang dilaksanakan di Tlaxcala (Mexico). Dari pertemuan ini berhasil dirumuskan visi, yakni kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuannya sendiri untuk menghasilkan pangan dasar dengan menghormati keragaman budaya dan sistem produksinya sendiri.

Masyarakat memiliki hak untuk memproduksi makanannya sendiri diwilayahnya. Kedaulatan pangan merupakan prasyarat untuk mencapai keamanan pangan sejati (*Genuine food Security*) (Via Campesina, 1996). Semenjak kegiatan ini, berbagai publikasi, pernyataan, dan deklarasi telah disampaikan dalam konteks kerangka kerja kedaulatan pangan.

Pemikiran ini dikristalkan sebagai sebuah gerakan, dimana pada tahun 2002 berhasil dibentuk sebuah komite, yaitu International Planning Committee (IPC) untuk kedaulatan pangan. IPC merumuskan bahwa kedaulatan pangan memiliki empat area prioritas atau pilar, yaitu (1) hak terhadap pangan, (2) akses terhadap sumber-sumber daya produktif, (3) pengarusutamaan produksi yang ramah lingkungan (*agroecological production*), serta (4) perdagangan dan pasar lokal, (IPC, 2006). Hak terhadap pangan dikaitkan dengan pengembangan pendekatan hak asasi manusia pada individu, serta pangan bergizi yang diterima secara kultural, sedangkan akses kepada sumber daya produktif berkaitan dengan akses kepada lahan, air, dan sumber genetik.

Kedaulatan pangan dimaknai sebagai suatu model produksi pertanian agroekologis, model perdagangan pertanian yang proteksionis, dan mendorong pasar lokal menggunakan instrumen dari IPC *for Food Security*, pendekatan pada sumber daya genetik pertanian yang bersifat komunal, lebih cenderung antipaten, serta wacana lingkungan rasionalisme hijau (*green rationalism*). Disini kedaulatan pangan diartikan sebagai hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem pangan sendiri sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan karakter budaya masing-masing (IPC, 2006). Kedaulatan pangan mensyaratkan pengendalian sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan sehingga konsep ini tidak mungkin diterapkan di negara yang tidak punya lahan pertanian seperti Singapura (Syahyuti, Sunarsih dkk 2015 :98).

Berdasarkan beberapa rumusan dari organisasi IPC (*International Planning Committee*) terhadap rumusan kedaulatan pangan di atas, menunjukkan kedaulatan pangan memiliki makna yang berbeda dengan konsep ketahanan

pangan. Kedaulatan pangan merupakan proteksi bagi setiap negara yang memiliki lahan pertanian yang luas dalam melakukan sistem produksi, distribusi dan konsumsi pangan. Ketiga hal ini yang membedakan dengan konsep ketahanan pangan. Tetapi program ketahanan pangan merupakan bagian dari misi kedaulatan pangan di suatu negara yang memiliki lahan pertanian yang luas.

Dengan adanya penerimaan konsep kedaulatan pangan secara internasional dapat membatasi dan memproteksi hasil-hasil produksi pangan disuatu negara. Kedaulatan pangan bagi setiap negara akan menjadikan negara yang melakukan program ketahanan pangan lalu mendapatkan hasil swasembada pangan akan mengalami implikasi kesejahteraan bagi petani serta negara yang meraih prestasi tersebut dapat mendistribusikan melalui pasar lokal maupun pasar internasional. Hasil - hasil produksi pangan dari suatu negara yang berhasil dalam melaksanakan program ketahanan nasional dan berujung kepada hasil yang lebih tinggi seperti prestasi dalam mewujudkan swasembada pangan akan menjadi pelaku ekonomi internasional di bidang pangan. Contohnya negara Brasil sebagai negara pengekspor kopi yang diberi lisensi dari lembaga pangan Internasional FAO. Vietnam sebagai negara pengekspor beras. Sementara kita negara RI memiliki hasil yang sama tetapi tidak berdaulat dalam mengekspor dua komoditi tadi seperti beras berasal dari negara Vietnam dan Kopi berasal dari negara Brasil. Artinya bila kedaulatan pangan itu kita miliki negara kita akan menjadi *number one* dalam memainkan peranannya pada pemasaran kopi dan beras.

Asumsi penulis bila negara kita memperoleh hasil yang sangat memuaskan dalam program ketahanan pangan dan mencapai predikat Swasembada pada Beras dan kopi sama dengan negara Brasil dan Vietnam akan bersama berdaulat dalam memainkan peranan sebagai distributor internasional kepada dua komoditi tersebut. Dan dampaknya akan berpengaruh bagi kesejahteraan petani di Indonesia. Bila pemerintah mengambil harga yang tinggi dari petani. Siklus kedaulatan pangan seperti ini yang diharapkan akan

terjadi di negara kita. Sebagaimana yang terjadi pada petani sejahtera di negara Vietnam dan petani kopi di Brasil.

Negara Indonesia sangat kaya dengan hasil-hasil produksi pertanian misalnya petani cengkeh, petani kopra, petani beras. Tetapi petani kita nampaknya derajat kualitas hidupnya, kalah bila dibandingkan dengan negara yang telah memiliki kedaulatan pangan seperti petani kopra di negara Brasil dan petani padi di negara Vietnam. Dengan contoh kasus di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya mengejar ketahanan pangan, tetapi harus dapat naik kelevel yang lebih tinggi yakni mampu menciptakan kedaulatan pangan. Semoga perbedaan penafsiran dari konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dapat menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat terhadap pangan. Dengan kedaulatan pangan yang dapat kita wujudkan akan menjadikan negara dan petani di Indonesia akan lebih meningkat kualitas derajat hidupnya. Inilah yang akan mensupport petani di Indonesia, sehingga dengan jumlah penduduk yang saat ini telah berada pada angka 270-272 juta penduduk akan memilih profesi petani separuh dari jumlah penduduk di Indonesia. minset inilah yang diharapkan kepada warga masyarakat kita yang masih menjadikan primadona dan prioritas bekerja disektor formal menjadi PNS, sementara negara kita ini secara geografis adalah sebagian besar adalah agraris. Bila warga negara kita memahami konsep kedaulatan pangan dan pemerintah kita melaksanakan misi kedaulatan pangan , akan menjadi potensi dalam mencapai kedaulatan pangan di Indonesia dan negara Indonesia akan memainkan peranan pada pasar lokal dan pasar internasional sebagai distributor pangan internasional.

#### **2.1.7. Swasembada pangan**

Negara kita dikenal sebagai negara agraris, dimana ciri negara agraris bila potensi yang dimiliki oleh suatu negara sangat potensial dalam program pembangunan ketahanan pangan. Dan ci tersebut ada dalam kondisi geografis yang dimiliki oleh negara kita. Sehingga tepat lagu Koes Plus lempar kayu jadi tanaman. Dengan demikian program pembangunan ketahanan pangan di

negara kita Republik Indonesia sangatlah cocok bila kita menggapai gol terakhir dari program pembangunan ketahanan pangan yakni menggapai negara dengan predikat sebagai swasembada pangan.

Namun untuk mencapai impian tersebut harus melalui proses yang panjang. Artinya kita tidak hanya didukung oleh potensi geografik saja, tetapi yang terpenting adalah strategi dalam mewujudkan swasembada pangan diketahui oleh *top leader* bersama jajarannya yang bergerak dalam rang lingkup di sektor pertanian, perkebunan, sektor peternakan dan instansi terkait yang berhubungan dengan pengadaan fasilitas pendukung dalam melaksanakan program ketahanan pangan tersebut. Bila ini kurang dikuasai harapan dan impian dalam mewujudkan swasembada pangan tidak akan dapat diwujudkan oleh pemerintahan reformasi saat ini.

Bila kita melihat kondisi di era Orde Baru dimasa kepemimpinan Soeharto kurang lebih 32 tahun berkuasa, pernah memberikan legasi dalam meraih negara swasembada pangan. Mengapa itu terwujud karena di era Orde Baru perencanaan pembangunan pertanian diatur dalam RAPBN dan diletakan dalam program Repelita untuk setiap tahunnya diatur dalam GBHN. Sehingga keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam mencapai prestasi tertinggi dalam membangun ketahanan pangan ini tercapai, dan harus dapat terulang kembali melalui pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dalam dua periode masa jabatannya (2014-2019 s/d 2019- 2024).

Untuk mendukung program pembangunan ketahanan pangan menuju negara swasembada pangan kita harus mengetahui konsep Swasembada pangan dan strategi bagaimana mewujudkan Swasembada pangan tersebut yang dapat kita kaji melalui beberapa refrensi teori dan strategi Swasembada pangan di bawah ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan , mengartikan Swasembada pangan rumah tangga adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Untuk menelusuri lebih lanjut tentang pemahaman kita dalam melaksanakan program ketahanan pangan sebagai sasaran swasembada pangan dapat kita lihat melalui kutipan buku sebagai berikut :

Untuk mencapai program ketahanan pangan ada dua pilihan yaitu dengan cara Swasembada pangan atau kecukupan pangan” swsembada pangan diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, yang sejauh mungkin berasal dari pasokan domestik dengan meminalkan ketergantungan pada perdagangan pangan. Dilain pihak konsep kecukupan pangan adalah sangat berbeda dengan konsep swasembada pangan, menuntut adanya kemampuan menjaga tingkat nasional merupakan prakondisi penting dalam memupuk ketahanan pangan dan stabilitas harga.

Ketahanan pangan nasional selama ini dicapai melalui kebijaksanaan swasembada pangan dan stabilitas harga. Oleh sebab itu pemantapan Swasembada beras merupakan salah satu fokus dalam terwujudnya ketahanan pangan. Hal ini dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan tujuan dari kementerian pertanian yang terdapat dalam peraturan Menteri Pertanian 2010:2014. Berikut merupakan beberapa visi, misi dan tujuan kementerian pertanian yang terkait penetapan target pelaksanaan Swasembada beras sebagai penunjang terwujudnya swasembada beras adalah :

Visi : Terwujudnya Pertanian industrial Unggul Berkelanjutan yang berbasis Sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan,nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani.

Misi :a. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasisi iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.b. menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan . c. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.

Tujuan : 1).Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal.2).Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.

Swasembada pangan merupakan target utama kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Seperti yang tercantum dalam peraturan menteri Pertanian No. 15/Permentan/Rc.110/1/2010 selama lima tahun ke depan (2010-2014). Dalam membangun pertanian di Indonesia, kementerian pertanian mencanangkan (empat) target utama yaitu:

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada berkelanjutan;
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan;
3. Peningkatan nilai tambah, Daya saing, dan Ekspor
4. Peningkatan kesejahteraan Petani.

#### **A. Swasembada Beras**

Swasembada ditargetkan untuk tiga komoditas pangan utama yaitu : Kedelai, gula dan daging sapi. Agar tercapai swasembada sasaran produksi kedelai, gula dan daging sapi pada tahun 2014 adalah kedelai sebesar 2,70 Juta ton dan daging sapi 546 ribu ton, atau masing-masing meningkat rata-rata 20,05% pertahun (kedelai), 17,63% pertahun (gula) dan 7,30 persen per tahun (daging sapi).

Adapun swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung. Agar posisi swasembada padi dan jagung dapat berkelanjutan, maka sasaran peningkatan produksinya harus dipertahankan minimal sama dengan peningkatan permintaan dalam negeri. Dengan memperhitungkan proyeksi laju pertumbuhan penduduk nasional, permintaan bahan baku industri dalam negeri, kebutuhan stok nasional dan peluang ekspor, maka sasaran produksi padi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,70 juta ton gabah kering giling (GKG) dan jagung 29 juta ton, pipilan kering atau masing-masing tumbuh 3,22 persen per tahun dan 10,02 persen pertahun (jagung).

Untuk target pencapaian Swasembada pangan berkelanjutan

1. Swasembada

- a. Kedelai produksi 2,7 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 20,05% per tahun).
- b. Gula produksi 5,7 Juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 17,63% per tahun)
- c. Daging sapi produksi 0,55 juta ton di tahun 2014

## 2. Swasembada berkelanjutan

- a. Padi produksi 75,70 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,22% per tahun)
- b. Jagung produksi 29 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02% per tahun).

### Target sasaran produksi dan rata-rata pertumbuhan tiap tahun selama 2010-2014.

Komoditas	Target	Produksi Tahun 2019 (2 Juta ton)	Sasaran (juta ton)	Produksi	Rata-rata pertumbuhan per tahun
1. Padi	Swasembada Berkelanjutan	63.844)	66,68	75.70	3,22
2. Jagung	Swasembada Berkelanjutan	17.664)	19,80	29,00	10,02
3. Kedelai	Swasembada 2014	1.004)	1,30	2,70	20,05
4. Gula	Swasembada 2014	2.855)	2,99	5,7	17.63
5. Daging Sapi	Swasembada 2014	0.405)	0,41	0,55	7,30

Keterangan : 1) GKG,2) Pipian kering (PK). 3) karkas, 4).angka ramalan 111, 5) angka target.

Berdasarkan kutipan dari (<https://Kompaspedia,Id> ketahanan pangan sejarah, perkembangan,) tentang data swasembada pangan di Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah di era reformasi pun meraih predikat swasembada pangan sebagaimana yang ada didalam tabel target sasaran produksi dan rata-rata pertumbuhan tiap tahun selama 2010-2014. Data tersebut menunjukkan kementerian pertanian di era reformasi meraih swasembada pangan pada hasil produksi padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Hasil prestasi swasembada pangan ini menjadi bagian penting dari program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan pemerintah di era reformasi, yang akan menjadi motivator pemerintah daerah dalam mensukseskan program pembangunan ketahanan pangan yang saat ini digalakan pemerintah reformasi.

### **2.1.8. Memahami konsep Ketahanan Nasional**

#### **a. Pengertian ketahanan nasional**

Ketahanan berasal dari asal kata “tahan”; tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi Ketahanan Nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran, sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal disuatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah *national resilience* yang mengandung pengertian dinamis, dibandingkan pengertian *resistence* dan *endurance*.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala

tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan negara.

Ketahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya (Suradinata, 2005: 47, atau lihat Soemarsono dkk, 2001: 106).

Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasar pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsep inilah yang disebut ketahanan nasional (Soemarsono dkk, 2001: 106). Jadi dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah konsep geostrategi Indonesia.

## **b. Asas-Asas Ketahanan Nasional**

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari:

### **1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan**

Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa dua hal ini kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara kehilangan relevansi keberadaannya. Dua hal ini merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional, tanpa kedua hal ini maka kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Oleh karenanya kesejahteraan dan keamanan merupakan

nilai intrinsik dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan yang telah dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional secara umum.

## **2. Asas Komprehensivitas Integral atau Menyeluruh dan Terpadu**

Ketahanan nasional sebagai sebuah cara dan metode dalam mencapai dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan selaras harus dilaksanakan mencakup ketahanan dari segenap aspek kehidupan berbangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu (integral-komprehensif).

### **a. Asas Kekeluargaan**

Karena di dalam Ketahanan nasional asas kekeluargaan dijunjung tinggi, maka perbedaan-perbedaan dan keragaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia diakui. Perbedaan dan keragaman tersebut harus dikelola dan dijadikan kekayaan dan modal untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dalam konteks internasional, asas kekeluargaan bermakna menghargai perbedaan-perbedaan untuk mengembangkan hubungan kemitraan yang serasi agar tidak berkembang menjadi konflik.

### **b. Asas Mawas Ke Dalam dan Ke Luar**

Seluruh kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Selain itu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara juga sangat mempengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam interaksi timbal balik tersebut maka sering muncul dampak positif maupun negatif. Maka sangat dibutuhkan suatu sikap mawas ke dalam maupun mawas ke Luar. Mawas Ke Dalam, Artinya ketahanan nasional harus berusaha menegok keunggulan dan kelemahan pada diri bangsa sendiri. Dengan cara tersebut bangsa Indonesia dapat mengukur dan meningkatkan ketahanan nasionalnya dari aspek yang kurang. Hal ini juga berarti menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasar nilai-nilai kemandirian yang

proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian sebuah bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau mengandung nasionalisme sempit. Mawas Ke Luar, Ketahanan nasional harus mempunyai asas mawas keluar yang bertujuan untuk dapat mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksinya dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling memberi keuntungan (Soemarsono dkk, 2001: 108).

Dalam mendukung mewujudkan ketahanan nasional dalam suatu negara dimulai bagaimana membangun ketahanan keluarga warga negara menghasilkan kondisi ketahanan wilayah. Sehingga diperlukan beberapa teori dalam menciptakan kondisi ketahanan nasional tersebut untuk dapat dijadikan bagian dari strategi menciptakan kondisi ketahanan wilayah demi mewujudkan negara multikulturalisme. Dan teori ini juga dapat dipakai dalam mengukur indeks ketahanan wilayah disuatu daerah diantaranya teori ini dapat diuraikan di bawah ini.

#### **2.1.9. Teori Perubahan Sosial dalam menentukan strategi ketahanan wilayah.**

Perubahan Sosial merujuk kepada perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari dari cara hidup yang telah diterima karena perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, hingga adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat, terdapat beberapa teori perubahan sosial yaitu teori siklus, teori linear, teori gerakan sosial, teori modernisasi dan teori konflik.

- a. Teori siklus beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membentuk pola yang berulang.
- b. Teori linear atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi dimasyarakat berujung atau menuju satu titik yang sama. teori ini juga merangkum proses evolusi maupun revolusi.
- c. Teori gerakan sosial meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang.
- d. Teori modernisasi menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada suatu negara berkembang akan mencontohi negara industri atau negara maju.
- e. Teori konflik menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari adanya konflik antar kelompok atau golongan tertentu yang kemudian diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori perubahan sosial di atas suatu wilayah akan menuju kepada kondisi ketahanan wilayah yang tangguh bila masyarakat itu mengalami perubahan sosial. Dengan pengkajian teori perubahan sosial sudah saatnya daerah dalam mewujudkan kondisi ketahanan daerah yang tangguh harus melakukan gebrakan perubahan sosial dalam masyarakatnya, karena kita tidak menghendaki masyarakat kita masih dalam kondisi tidak berubah. Perubahan itu diperlukan tetapi tidak menambrak kearifan lokal yang ada pada setiap daerah (<http://www.kolaspintar>blog>).

#### **2.1.10. Teori Penetapan status desa dalam mengukur progresitas desa dalam menentukan ketahanan wilayah.**

Setiap desa pasti mencapai tingkatan tersendiri dalam proses pengembangan untuk memajukan desanya. Karena itu desa dibedakan dalam klasifikasinya antara lain sebagai berikut :

- a. Desa swadaya adalah : desa yang dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Di desa ini masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan

nenek moyang seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Ciri desa ini adalah :

- Daerahnya terisolir atau tertutup
- Penduduknya sedikit
- Mata pencahariannya homogen yang bersifat agraris
- Masyarakatnya memegang teguh adat atau tradisi
- Hubungan personal sangat erat
- Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang
- Teknologi yang ada masih rendah atau bahkan belum ada

b. Desa Swakarya adalah desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran jaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Ciri-ciri desa Swakarya antara lain :

- Tidak terikat dengan adat secara penuh
- Terbuka dengan pengaruh dari luar daerah
- Adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan prasarana penunjang lainnya
- Teknologi sudah mulai digunakan masyarakat
- Akses menuju daerah lebih mudah
- Lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam.

c. Desa Swasembada adalah : Desa swasembada biasa disebut sebagai desa maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju dibandingkan tingkatan desa lain dan sudah bisa mengembangkan ide

yang dimiliki. Mau berpartisipasi dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern. Ciri-ciri desa Swasembada antara lain sebagai berikut :

- Biasanya berlokasi tidak jauh dari kota atau kecamatan
- Penduduknya mulai padat
- Masyarakat sudah terikat oleh adat
- Memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju
- Masyarakat yang lebih kreatif dan kritis
- Aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (<https://www.berdesa.com>).

Berdasarkan teori ini kita dapat menilai tentang kondisi ketahanan wilayah di suatu wilayah dalam rangka mewujudkan negara multikulturalisme. Negara multikulturalisme akan terwujud bila kondisi desa akan lebih meningkat dari status desa awal, dari desa Swadaya, menuju desa Swakarya sampai pada tujuan pembangunan desa yakni desa Swasembada. Bila ini dapat diwujudkan maka stabilitas wilayah akan mendapatkan indeks sangat tangguh dalam penilaian status ketahanan wilayah di suatu daerah.

#### **2.1.11. Teori kemiskinan dalam menentukan status ketahanan wilayah disuatu daerah.**

Demi mewujudkan negara multikulturalisme disuatu wilayah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana menekan angka kemiskinan. Bila angka kemiskinan disuatu wilayah sangat tinggi, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan wilayah disuatu daerah. Mengapa karena kemiskinan sumber dari gesekan sosial, dimana kemiskinan akan banyak memberikan dampak sosial misalnya penjarahan kepada warga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, kemiskinan bisa saja memicu kerusuhan sosial dsb. Artinya bila ingin mewujudkan negara multikultural, maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah menekan angka kemiskinan diwilayahnya.

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan marilah kita telaah dari beberapa analisis teori tentang pengertian dan batasan kemiskinan di bawah ini.

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Terjadinya kemiskinan penduduk secara garis besar disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal penduduk. Kemiskinan dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah : kemiskinan yang disebabkan faktor internal penduduk sendiri. Misalkan disebabkan tingkat pendidikan rendah, keterampilan rendah, budaya dan sebagainya.
- b. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal sehingga kemampuan akses sumberdaya ekonomi rendah, pada gilirannya pendapatan penduduk menjadi rendah.

Menurut Kuncoro (2004), pengukuran kriteria garis kemiskinan di Indonesia diukur untuk kemiskinan absolut, institusi pemerintah yang biasa menetapkan kriteria garis kemiskinan yaitu BPS (1994) kriteria kemiskinan menggunakan ukuran uang rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum makanan dan bukan makanan.

Klasifikasi kemiskinan menurut Hendra Esmara (1986) dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, pangan, sandang, papan, pendidikan.
- b. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

- c. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu (*dr Suparyanto.blogspot.com.teori*).

Berdasarkan teori di atas membuat kita dapat mengetahui strategi apa yang kita gunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Ketahanan wilayah bergantung kepada kondisi kemiskinan yang ada disuatu daerah sehingga identifikasi kemiskinan berdasarkan teori di atas dapat memudahkan dalam menyusun strategi untuk membenahi kemiskinan di daerah di dalam mewujudkan Program Ketahanan Pangan.

## **2.2. Landasan Teori**

Untuk menelusuri jawaban rumusan masalah dalam penelitian Kontribusi Warga Transmigrasi di Kecamatan Wonosari Terhadap ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, dapat kita lihat melalui *toel* indikator dari beberapa variabel penelitian sebagai berikut :

### **2.2.1. Kontribusi Warga Transmigrasi .**

Pengertian kontribusi secara umum dapat diartikan sebagai sumbangan atau hasil yang diberikan kepada sesuatu peran yang diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang atau organisasi yang disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan sosial atau berbagai sektor pembangunan. Untuk menghubungkan dengan fokus penelitian di atas, maka indikator kontribusi warga transmigrasi di kecamatan Wonosari dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :

- a. Kontribusi pada bidang pertanian dan perkebunan
- b. Kontribusi pada bidang peternakan
- c. Kontribusi pada bidang perdagangan

- d. Kontribusi pada bidang industri rumahan (kerajinan)
- e. Kontribusi pada Pajak dan retribusi daerah
- f. Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan indikator di atas dapat kita menganalisis hasil kontribusi yang diberikan warga transmigrasi melalui beberapa instrumen pertanyaan kepada responden dengan didasarkan kepada indikator kontribusi khusus bagi warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari dalam melaksanakan program ketahanan pangan di daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

### **2.2.2. Indeks Ketahanan Pangan.**

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang terjamin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergiji, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya telah dikembangkan sistem penilaian dalam bentuk IKP (indeks ketahanan pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Indeks ketahanan pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, kementerian pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu : ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada 1) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global diantaranya i) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, ii). Keterwakilan, iii). pilar ketahanan pangan dan ,iv). Ketersediaan data tersedia

secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh kebutuhan kota v).

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut :

- a. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih, padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Ketersediaan bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan, sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar menggunakan angka tetap 2014-2016 dari BPS dan kementerian pertanian.
- b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan.
- c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran. Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator produksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori *Engel* menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan, maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran pangan merupakan produksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996, Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil

(Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2017.BPS.

- d. Persentase Rumah Tangga tanpa akses listrik. Tersedianya fasilitas listrik disuatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak kepada kondisi ketahanan pangan. Rasio rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan dan gizi.
- e. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengaruh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan.
- f. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dari air hujan (tidak masuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan, karena di daerah yang akses terhadap air bersihnya rendah akan ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP, Sofiati 2009). Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh.

- g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010 dan Sofati 2009).
- h. Persentase balita tinggi badan di bawah standar (*stunting*). Balita *stunting* adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (standar WHO, 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan.
- i. Angka harapan hidup saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat angka harapan hidup saat lahir berasal dari data Susenas 2017, BPS.

Demikian alat ukur indeks ketahanan pangan disuatu wilayah yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam menentukan apakah daerah kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo di daerah transmigrasi dapat memenuhi sembilan indikator tersebut.

### **2.2.3. Faktor Penghambat warga Transmigrasi dalam mewujudkan ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

Biasanya program ketahanan pangan dilaksanakan menemui hambatan khusus bagi warga transmigrasi yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari. Dan hambatan tersebut bisa terjadi dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Hambatan perijinan Usaha
- b. Hambatan dari gangguan etnis lokal
- c. Perlakuan diskriminasi pemerintah kecamatan.

Berdasarkan indikator faktor penghambat di atas peneliti akan menelusuri hasil jawaban informan penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan indikator di atas akan mengalami tambahan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dilapangan. Dengan demikian indikator faktor-faktor penghambat dapat berkembang sesuai dengan kondisi riset dilapangan.

#### **2.2.4.Upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan dalam mendukung warga transmigrasi dalam Mewujudkan Program ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis Indonesia mengingatkan kecukupan produksi dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian diperlukan penyelarasan peningkatan produksi disatu pihak.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut :

1. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya, serta stabil penyediannya dari waktu ke waktu.
2. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Sistem distribusi bukan semata-mata menyangkut aspek fisik dalam arti pangan tersedia disemua lokasi yang membutuhkan tetapi juga masyarakat. Surplus pangan ditingkat wilayah

belum menjamin kecukupan pangan bagi individu masyarakatnya. Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk.

3. Subsistem pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik. Sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.

Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II 2010-2014 kebijakan pembangunan pertanian kementerian Pertanian tahun 2010-2014 berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan yaitu :

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT);
2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP). Lembaga Mandiri yang mengakar dimasyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SM3) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapangan guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di pedesaan.
3. Pemantapan Swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan.
4. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;
5. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani;
7. Jaminan penguasaan lahan produktif;
8. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;
9. Penguatan kelembagaan pembenihan dan pembibitan nasional;
10. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan;
11. Penguatan akses petani terhadap iptek, dan permodalan bunga rendah;
12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif ;
13. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi dipasar lokal maupun internasional;
14. Pengembangan *Bio-Energi* berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di pedesaan dan mensubsititusi BBM;
15. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilitas harga disentra produksi.
16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu;
17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional;
18. Penguatan sistem perkarantinaan pertanian;
19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kepada kebutuhan petani;
20. Pengembangan industri hilir pertanian di pedesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian,

membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;

21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan harga pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
22. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis;
23. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan *good governance* (<https://jdlh.bpk.go.id/2012/03> *Kebijakan Pemerintah Dalam Pencapaian Swasembada*)

Berdasarkan beberapa program ketahanan pangan di atas, menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan sebuah program yang dirumuskan secara strategik didalam mewujudkan kemampuan negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Sehingga bila program ketahanan pangan dapat dijalankan oleh kepala daerah secara sistematis dan fokus kepada program ketahanan pangan, maka negara kita akan selalu mencapai swasembada pangan. Ini menunjukkan bahwa mewujudkan ketahanan pangan, bukan hanya dilihat dari hasil, tetapi harus melalui proses, inilah yang disebut dengan program-program ketahanan Pangan yang harus dikuasai oleh *top leader* dan instansi terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah, sehingga perlu menelusuri pertanyaan penelitian kepada pihak terkait sebagai berikut :

- a. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa dilingkungan kecamatan Wonosari dalam mewujudkan program ketahanan pangan.
- b. Upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Wonosari dalam mewujudkan program ketahanan pangan.
- c. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam mewujudkan program ketahanan pangan.

Berdasarkan pertanyaan di atas, dapat dijadikan dasar dalam menelusuri kebijakan apa yang ditempuh oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat desa

dalam melaksanakan beberapa program ketahanan pangan di wilayah pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Penelusuran akan lebih diarahkan apakah pemerintah daerah mengambil bagian dari upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Sebagaimana yang ada pada 23 program ketahanan pangan di atas. Bila pemerintah daerah khususnya daerah yang berstatus kabupaten dengan memiliki kewajiban dalam melaksanakan program ketahanan pangan sama sekali mengabaikan sektor pertanian, ini berarti kepala daerah yang memimpin daerah tidak paham dengan status daerah kabupaten sebagai basis dalam pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan sebagai basis dari program ketahanan pangan sebagaimana yang ada di 23 Program ketahanan pangan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Sehingga diperlukan kepala daerah yang mengerti arah kebijakan pengembangan pemerintah daerah dengan status kabupaten yang lebih diarahkan kepada program ketahanan pangan.

Bila konsep pengembangan wilayah status kabupaten disamakan dengan visi pengembangan pemerintah kota, maka arah kebijakan bagi program ketahanan pangan di wilayah pemerintah kabupaten dianggap gagal. Artinya kepala daerah harus mengetahui bagaimana mengembangkan daerah dengan status pemerintah kabupaten sebagai sasaran dari 23 program ketahanan pangan yang diharapkan pemerintah pusat di atas. Memang tidak ada larangan pemerintah kabupaten mengembangkan sektor jasa, tetapi yang dijadikan prioritas adalah pengembangan disektor pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan bagi pemerintah saat ini. Kesadaran tata kelola pemerintah kabupaten harus dimengerti oleh kepala daerah, dimana orientasi pembangunan pemerintah kabupaten adalah memperkuat program ketahanan pangan. Bila ini disadari dan dipahami oleh pemerintah kabupaten, program ketahanan pangan akan menuai hasil yang lebih baik, minimal setiap daerah dengan status kabupaten akan dapat mewujudkan swasembada pangan di daerahnya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka data atau informasi yang hendak dikumpulkan adalah dalam bentuk deskripsi. Disamping itu penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan makna yang terkandung di dalam deskripsi data tersebut, karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009:1)

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek alamiah, atau *Natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada diobyek dan keluar dari obyek relatif tidak berubah.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induksi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2009:3.

Sehingga dalam penelitian Kontribusi Warga Transmigrasi terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo akan memperkuat ataupun menghasilkan suatu Teori baru dan Hipotesis berdasarkan fakta-fakta yang di temukan dilapangan

### **3.1.2. Waktu Dan Tempat**

Berdasarkan tema penelitian mengenai Kontribusi warga Tansmigrasi terhadap Ketahanan Pangan di kecamatan Wonosari bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan kecamatan Wonosari sebagai kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo sebagai daerah yang ditunjuk untuk menerima warga transmigrasi program pemerintah pusat. Dengan adanya penempatan daerah transmigrasi berdampak kepada beberapa problem sosial. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti merasa perlu dalam mengungkap dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam merajuk kebhinekaan antara warga transmigrasi dengan penduduk lokal Gororontalo. Alasan inilah peneliti menetapkan lokasi Kecamatan Wonosari sebagai objek didalam membangun negara multikultural.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini ini dilakukan kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Dimulai dari bulan april atau terhitung dari perencanaan penelitian dilakukan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo sampai dengan bulan desember 2021.

### **3.1.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dilakukan dengan cara menentukan satu topik, hal ini dilakukan karena permasalahan yang ada biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin diteliti hanya dari sudut disiplin ilmu saja dan tidak mungkin diteliti hanya dari semua segi secara serentak. Karena fokus penelitian diartikan sebagai titik temu atau spesifikasi dari suatu masalah yang dikaji, sehingga

dapat lebih fokus pada penelitian. Sehingga pada penelitian Kontribusi Warga Transmigrasi Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari bagi Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dapat dibatasi pada fokus penelitian sebagai berikut :

- 1) Kontribusi Warga Transmigrasi bagi Pemerintah daerah Kecamatan Wonosari sbb :
  - g. Kontribusi pada bidang pertanian dan perkebunan
  - h. Kontribusi pada bidang peternakan
  - i. Kontribusi pada bidang perdagangan
  - j. Kontribusi pada bidang industri rumahan (kerajinan)
  - k. Kontribusi pada Pajak dan retribusi daerah
  - l. Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah
- 2) Indeks Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebagai berikut:
  - a. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih, padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
  - b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
  - c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.
  - d. Persentase Rumah Tangga tanpa akses listrik.
  - e. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun.
  - f. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
  - g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
  - h. Persentase balita tinggi badan di bawah standar (*stunting*).
  - i. Angka harapan hidup saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.

- 3). Faktor Penghambat warga Transmigrasi dalam mewujudkan ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan fokus sebagai berikut :
  - a. Hambatan perijinan Usaha
  - b. Hambatan dari gangguan etnis lokal
  - c. Perlakuan diskriminasi pemerintah kecamatan.
- 4).Upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan dalam mendukung warga transmigrasi dalam Mewujudkan ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo meliputi:
  - d. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa dilingkungan kecamatan Wonosari.
  - e. Upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Wonosari.
  - f. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.

#### **3.1.4. Sumber Data**

Data adalah Hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta atau angka. Dalam penelitian ini, instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri, dimana peneliti secara langsung melakukan interaksi dengan para informan penelitian (dalam hal ini adalah subjek penelitian). Peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan kontak langsung dengan informan guna mendapatkan data yang lebih dengan melalui wawancara dan observasi dilapangan yang berkaitan dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Kontribusi Warga Transmigrasi Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari bagi Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dan observasi dilapangan. Dengan melakukan pendekatan secara emosional terhadap para informan, peneliti berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk melengkapi data-data yang dianggap oleh peneliti masih kurang serta kabur dalam melihat hubungan sebagai suatu realitas sosial masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten Boalemo dan warga masyarakat yang bersumber dari perwakilan warga transmigrasi dengan etnis lokal yang ada di Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelusuran terhadap beberapa bahan pustaka dan literatur yang relevan dengan maalah yang diteliti, misalnya data ketahanan pangan di desa dan di kantor camat Wonosari dan data ketahanan pangan di BPPS Boalemo dan dinas Pertanian Boalemo, jurnal, artikel. Penggunaan data sekunder diperlukan untuk memperkuat teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam melihat masalah yang sedang diteliti dilapangan. Sehingga penelitian ini dapat diakui keabsahannya dan tidak dianggap plagiat jika terdapat suatu penelitian yang sama (Ramlah A. Labodu, 2015:32).

### **3.1.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dilapangan. Maka, setiap peneliti harus menggunakan cara dalam pengumpulan data atau tehnik pengumpulan data dilapangan. Adapun teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yaitu dengan menggunakan tiga teknik yaitu Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1) Observasi

Nasution (1998) dalam (Sugiyono,2009:64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Observasi dilakukan jika data yang diperoleh melalui wawancara kurang merefleksikan informasi yang diinginkan (Durri Andriani, Dkk, 2013:5.13).

### 2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. (Beni Ahmad Saebeni, 2015:288)

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **3.1.6. Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul maka dilakukan kegiatan analisis data. Proses analisis data dilakukan sejak awal hingga selesai pengumpulan data. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, situasi, persepsi, dan konsepsi yang merupakan bagian dari objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif analisis. Dimana deskriptif analisis

mendesripsikan hasil data-data yang ditemukan dilapangan berdasarkan hasil data wawancara, observasi dan data dokumentasi, tanpa mengurangi dan menambahkan informasi apa yang didapatkan dari hasil dilapangan. Dengan demikian analisis deskriptif adalah sebagai analisis hasil penelitian yang bersumber dari data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dideskripsikan oleh peneliti sebagai hasil penelitian dalam riset.

### **3.1.7. Pengecekan dan Keabsahan Data**

Analisis data selain dideskripsikan secara kualitatif, juga akan dianalisis secara kuantitatif yang diperoleh melalui data hasil wawancara dan data dari angket. Sebagai pendukung data hasil observasi, wawancara digunakan juga data dokumentasi untuk membantu peneliti sampai pada kesimpulan akhir penelitian. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan tukar pendapat dengan teman sekawan, meninjau ulang hasil wawancara, melihat kembali data observasi dan data dokumentasi dilapangan. Salah satu aspek yang paling penting dan mutlak dalam penelitian ini adalah keabsahan data. Keabsahan data diperoleh dari data orginal berasal dari hasil wawancara, data observasi dan data dokumentasi pada saat melakukan penelitian.

Dengan demikian pengecekan dan keabsahan data merupakan bagian terpenting dalam melakukan analisis hasil riset dilapangan dalam mencapai kesempurnaan hasil laporan riset yang dilakukan oleh peneliti. Dalam arti tahapan tersebut tidak dapat dikesampingkan dalam menyusun laporan hasil riset penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kecamatan Wonosari.

##### 4.1.1. Batas-batas wilayah Kecamatan Wonosari.

Kecamatan Wonosari merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo dimana kecamatan ini terletak di sebelah Timur Kecamatan Dulupi.

Kecamatan dengan luas wilayah 229.10 KM<sup>2</sup> ini berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo disebelah Utara, Kecamatan Paguyaman dan Dulupi disebelah Selatan, serta kecamatan Dulupi di sebelah Barat.

Bila dilihat dari kondisi geografis Kecamatan Wonosari sebagian besar merupakan daerah lereng/punggung bukit. Jika dilihat dari luas wilayahnya, maka desa yang memiliki luas terbesar adalah Desa Mekar Jaya dan yang memiliki luas terkecil adalah desa Suka Mulya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 1. Batas Wilayah Kecamatan Wonosari**

<b>Batas Borders</b>	<b>Wilayah Region</b>
Utara (North)	Kabupaten Gorontalo <i>Gorontalo Regency</i>
Timur (East)	Kecamatan Paguyaman <i>Paguyaman Subdistrict</i>
Barat (West)	Kecamatan Dulupi <i>Dulupi Subdistrict</i>

**Sumber/Source : Kantor Camat Wonosari/Government of Wonosari Subdistrict 2021**

##### 4.1.2. Jarak antar Desa dengan Ibukota Kecamatan Wonosari.

Kondisi Geografis kecamatan Wonosari akan dapat dilihat melalui jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan desa-desa yang ada diwilayah kecamatan Wonosari. Jarak dapat menentukan status keberadaan desa di

wilayah Kecamatan Wonosari. Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 2. Jarak antar Desa dengan Ibukota Kecamatan Wonosari**

<b>No.</b>	<b>Desa Vilage</b>	<b>Jarak Distance KM</b>
1.	Makmur- Mekar Jaya	15,0
2.	Makmur- Harapan	7,0
3.	Makmur- Suka Maju	7,0
4.	Makmur – Sejahtera	3,0
5.	Makmur – Pangeya	8,0
6.	Makmur – Jati Mulya	2,0
7.	Makmur – Tri Rukun	2,0
8.	Makmur – Raharja	4,0
9.	Makmur – Dimito	10,0
10.	Makmur – Suka Mulya	7,0
11.	Makmur – Sari Tani	27,0
12.	Makmur – Tanjung Harapan	7,0
13.	Makmur – Dulohupa	27,0
14.	Makmur – SP 1	32,0
15.	Makmur – SP 2	14,0

**Sumber/Source : Kantor Camat Wonosari/Government of Wonosari Subdistrict 2021.**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan ada beberapa desa yang jauh dengan pusat pemerintahan kecamatan Wonosari, diantaranya desa terjauh persiapan Desa SP 1 memiliki jarak 32,0 KM, setelah itu desa Sari Tani memiliki jarak 27,0 KM dan desa Dulohupa memiliki jarak 27,0 dari pusat pemerintahan. Dan beberapa desa yang memiliki jarak terjauh kedua dari pusat pemerintahan adalah persiapan desa SP 2 memiliki jarak 14 KM, desa Dimito 10 KM disusul oleh desa Tanjung Harapan (7KM), Desa Suka Mulya (7 KM) dan desa Pangeya (8 KM).

Data ini akan menjadi prioritas dalam membangun desa di Wilayah Kecamatan Wonosari, biasanya desa yang jarak terjauh dari pusat pemerintahan mengalami kemunduran dalam pembangunan desa. Oleh karenanya tugas pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo untuk

membuka akses bagi desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan terutama akses jalan, jembatan, pusat kesehatan, listrik dan sumber air bersih sebagai pendukung dalam mencapai ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

#### **4.1.3. Klasifikasi Desa di Kecamatan Wonosari.**

Untuk menindaklanjuti potensi yang ada di setiap desa dalam mengembangkan ketahanan pangan dapat dilihat dari ketersediaan pangan di setiap desa. Namun kondisi ini dapat juga dilihat dari status desa dimana status desa diklasifikasikan menjadi tiga kategori yakni desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada. Keberadaan status dapat berpengaruh kepada ketersediaan pangan di wilayah kecamatan Wonosari. Untuk menelusuri kondisi ketahanan pangan, maka diperlukan data yang sudah dilakukan survey oleh pihak yang berkompeten seperti BPPS di daerah atau melalui hasil riset yang akan mengklasifikasikan status dari desa berdasarkan indikator masing-masing desa di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat ditemukan melalui profil yang ada di Kecamatan Wonosari seperti yang ada pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 4. Klasifikasi Desa di Kecamatan Wonosari**

No.	Desa <i>Vilage</i>	Klasifikasi Desa		
		Swadaya	Swakarya	Swasembada
1.	Mekar Jaya	-	-	✓
2.	Harapan	-	-	✓
3.	Suka Maju	-	-	✓
4.	Makmur	-	-	✓
5.	Sejahtera	-	-	✓
6.	Pangeya	-	-	✓
7.	Jati Mulya	-	-	✓
8.	Tri Rukun	-	-	✓
9.	Raharja	-	-	✓
10.	Dimito	-	-	✓
11.	Suka Mulya	-	-	✓
12.	Sari Tani	-	-	✓
13.	Tanjung Harapan	-	-	✓
14.	Dulohupa	-	-	✓
15.	SP 1	-	-	✓
16.	SP 2	-	-	✓

**Sumber/Source : Kantor Camat Wonosari/Government of Wonosari Subdistrict 2021.**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa bila dianalisis berdasarkan data yang sudah ada di kantor kecamatan Wonosari memberikan petunjuk bahwa kehadiran warga transmigrasi telah memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Keberhasilan menaikkan status desa yang ada di wilayah kecamatan Wonosari tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Boalemo dalam memberikan intervensi terhadap pengembangan pangan di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dengan adanya penetapan status pemerintah Kecamatan Wonosari semua desa yang ada diwilayahnya sebagai status sebagai desa swasembada menunjukkan bahwa Kecamatan Wonosari dalam membangun ketahanan pangannya dapat dinilai berhasil. Tetapi semua itu masih perlu diricek di setiap desa apakah benar status semua desa yang ada di Wilayah Kecamatan Wonosari sesuai dengan data yang ada di profil Kecamatan Wonosari.

#### 4.1.4. Status Hukum Desa di Kecamatan Wonosari.

Biasanya perkembangan desa itu dapat melalui proses berjenjang sebelum menjadi sebagai desa definitif. Bila dilihat dari 16 (enam belas) desa di wilayah Kecamatan Wonosari ditentukan oleh status dari keberadaan desa tersebut. Dalam menelusuri status desa yang ada di wilayah kecamatan Wonosari sebaiknya kita melihat penepatan status yang telah disematkan pada setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 5. Status Hukum Desa di Kecamatan Wonosari**

***Law status of Vilages in Wonosari Subdistrict***

No.	Desa <i>Vilage</i>	Status Hukum Desa <i>Low Status of The Vilage</i>		
		Definitif <i>Definitive</i>	Persiapan <i>Preliminary</i>	UPT* <i>SUT*</i>
1.	Mekar Jaya	✓	-	-
2.	Harapan	✓	-	-
3.	Suka Maju	✓	-	-
4.	Makmur	✓	-	-
5.	Sejahtera	✓	-	-
6.	Pangeya	✓	-	-
7.	Jati Mulya	✓	-	-
8.	Tri Rukun	✓	-	-
9.	Raharja	✓	-	-
10.	Dimito	✓	-	-
11.	Suka Mulya	✓	-	-
12.	Sari Tani	✓	-	-
13.	Tanjung Harapan	✓	-	-
14.	Dulohupa	✓	-	-
15.	SP 1	-	-	✓
16.	SP 2	-	-	✓
	Kecamatan Wonosari <i>Wonosari Subdistrict</i>	<b>14</b>	-	<b>2</b>

Catatan/Note:\*)Unit Pemukiman Transmigrasi/Settlement unit of Transmigration 2021

Sumber/Source : Kantor Desa Sekecamatan Wonosari /AI Vilage office in Wonosari Subdistrict

#### 4.1.5.Keadaan Geografis

Dalam mendukung ketahanan Pangan disuatu daerah ditentukan oleh seberapa luas areal disetiap desa yang dapat dikembangkan sebagai usaha pertanian, perikanan, peternakan dan usaha yang dapat menggenjot pendapatan bagi pemerintah kecamatan Wonosari. Untuk melihat potensi luas wilayah masing-masing desa di wilayah Kecamatan Wonosari dapat dilihat melalui tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 3. Ketinggian, Luas Wilayah, Persentase luas terhadap luas Kecamatan Wonosari.**

No.	Desa <i>Vilage</i>	Ketinggian <i>Altitude</i> ( <i>mdpl</i> )	Luas Wilayah Area ( <i>Km</i> )	Prosentase Luas <i>Percentage of area</i>
1.	Mekar Jaya	60	44,61	19,47
2.	Harapan	40	10,37	4,53
3.	Suka Maju	36	7,51	3,28
4.	Makmur	53	6,40	2,79
5.	Sejahtera	52	6,40	2,79
6.	Pangeya	47	10,04	4,38
7.	Jati Mulya	45	5,24	2,29
8.	Tri Rukun	50	4,2	1,83
9.	Raharja	44	4,43	1,93
10.	Dimito	68	42,50	18,55
11.	Suka Mulya	67	2,00	0,87
12.	Sari Tani	70	31,24	13,64
13.	Tanjung Harapan	43	6,71	2,93
14.	Dulohupa	36	4,60	2,01
15.	SP 1	91	13,31	5,81
16.	SP 2	91	29,54	12,89

**Sumber/Source : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo/National Land Board of Boalemo Regency tahun 2021**

Bila melihat tabel di atas luas areal lahan desa sangat potensial dalam pengembangan ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Dari data di atas pemerintah kecamatan dapat mengembangkan areal tanah di setiap desa menjadi sumber pangan bagi kecamatan Wonosari. Dan apa yang sekarang ini hampir sebagian besar areal yang ada di desa dapat dikembangkan sebagai areal pertanian bagi warga masyarakat yang

ada di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Kondisi saat ini areal yang banyak ditanami sumber pangan adalah di desa-desa yang ditempati oleh warga transmigrasi. Sementara bagi desa yang mayoritas penduduk lokal masih ada yang lahannya belum terkelola, tetapi dengan hadirnya perusahaan Tolangohula atau pabrik Gula naga manis, membuat lahan pertanian hampir disemua desa ada perkebunan tebu. Tetapi perkebunan tebu tersebut yang menjadi penggarapnya warga masyarakat setempat. Dengan demikian hampir semua lahan yang ada di setiap desa telah terkelola pada usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Semua ini karena wilayah Kecamatan Wonosari menjadi daerah tujuan transmigrasi, sehingga warga masyarakat baik lokal maupun warga transmigrasi bahu membahu mengembangkan usaha ketahanan pangan di setiap desanya.

#### 4.1.6.Keadaan Demografi.

Keberadaan warga masyarakat sangat perlu didata oleh aparat pemerintah kecamatan Wonosari. Dengan tujuan agar dapat diketahui tingkat kepadatan penduduk dimasing-masing desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari. Untuk melihat komposisi penduduk dimasing-masing desa dapat dilihat melalui tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 6. Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Wonosari**

No.	Desa( <i>Vilage</i> )	Laki-Laki ( <i>Mole</i> )	Perempuan <i>Femole</i>	Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
1.	Mekar Jaya	701	620	113
2.	Harapan	1.597	1.558	103
3.	Suka Maju	1.086	1.059	103
4.	Makmur	992	947	105
5.	Sejahtera	871	812	107
6.	Pangeya	1.547	1.424	109
7.	Jati Mulya	861	786	110
8.	Tri Rukun	514	491	105
9.	Raharja	391	369	106
10.	Dimito	1.004	971	103
11.	Suka Mulya	679	613	111

12.	Sari Tani	2.490	2.260	110
13.	Tanjung Harapan	425	405	105
14.	Dulohupa	501	448	112
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari</b>	<b>13.659</b>	<b>12.763</b>	<b>107</b>

**Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Boalemo  
Civil Registration and population service of Boalemo Regency 2021**

Berdasarkan tabel di atas terlihat beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari yang memiliki jumlah penduduk yang besar seperti desa Pangeya jumlah penduduk laki-laki 1.547 dan jumlah penduduk perempuan 1.424 dengan rasio jenis kelamin 109. Hal ini akan menjadi permasalahan bagi desa Pangeya bila dilihat dari rasio jenis kelamin, dimana warga laki-laki untuk masyarakat Pangeya harus bermigrasi ke desa lain bila mencari pasangan hidupnya. Tetapi ini tidak permanent karena terkadang ada warga yang mengalami mortalitas dan ada juga yang menjomblo sampai diakhir hidupnya. Tetapi bila dilihat dari potensi tenaga kerja sangat potensial dalam melakukan usaha dibidang pertanian, peternakan, perkebunan. Inilah yang harus dimanfaatkan pemerintah desa dalam membangun ketahanan pangan di desanya. Demikian juga dengan desa yang memiliki tingkat jumlah penduduk yang jarang seperti di desa Raharja yang memiliki populasi penduduk laki-laki berjumlah 391 dan perempuan berjumlah 369 orang dengan rasio jenis kelamin 106. Dari angka rasio jenis kelamin desa ini masih memiliki ketangguhan dalam mengelola pertanian sebagai wujud dalam membangun ketahanan pangan di desa Raharja. Karena yang akan menjadi masalah bila warga masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki mengalami migrasi ke wilayah kecamatan lain. Bila hal ini terjadi akan berdampak pada program ketahanan pangan di desa Raharja. Apa yang kita lihat diatas hanya sebagai simulasi bila rasio jenis kelamin menunjukkan jumlah laki-laki yang ada di desa itu sedikit angkanya di bawah rasio jenis kelamin 100. Misalnya Rasio jenis kelaminnya hanya 75- 85 atau 99.

Namun untuk Rasio Jenis kelamin di wilayah Kecamatan Wonosari menunjukkan angka di atas 100, ini menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki dapat diandalkan untuk mengolah lahan areal pertanian sebagai program dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Semua ini tinggal komitmen pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana motto dinas Pangan :”**Sukseskan Boalemo Mo Pomulo**”.

Untuk mendukung data keadaan demografi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan program ketahanan pangan dapat juga ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Wonosari. Sehingga diperlukan data yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang di desa-desa di wilayah kecamatan Wonosari. Di bawah ini disajikan data kepadatan penduduk disetiap desa yang ada diwilayah Kecamatan Wonosari sebagai berikut :

**Tabel : 7. Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo**

No.	Desa <i>Village</i>	Luas Wilayah <i>Area</i> (Km2)	Jumlah Penduduk <i>population</i> (orang)	Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i> (orang/Km2)
1.	Mekar Jaya	44,61	1.321	30
2.	Harapan	10,37	3.155	304
3.	Suka Maju	7,51	2.145	286
4.	Makmur	6,40	1.939	303
5.	Sejahtera	6,40	1.683	263
6.	Pangeya	10,04	2.971	296
7.	Jati Mulya	5,24	1.647	314
8.	Tri Rukun	4,2	1.005	239
9.	Raharja	4,43	760	172
10.	Dimito	42,50	1.975	46
11.	Suka Mulya	2,00	1.292	646
12.	Sari Tani	31,24	4.750	152
13.	Tanjung Harapan	6,71	830	124
14.	Dulohupa	4,60	949	206
15.	SP 1	13,31	-	-
16.	SP 2	29,54	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	<b>229,10</b>	<b>26.422</b>	<b>115</b>

**Sumber/Source : Badan Pertanahan Nasional dan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boalemo/*National land Board and civil Registration and population service of Boalemo Regency 2021.***

Berdasarkan tabel di atas desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang produktif telah melakukan keberhasilan dalam mengolah pertanian adalah desa yang memiliki kepadatan penduduk yang berimbang dengan luas area lahan pertanian. Dan ini juga berdasarkan observasi dilapangan lahan pertanian yang sangat produktif berada di desa yang dihuni oleh warga transmigrasi yang memiliki tingkat kepadatan penduduk setiap satu kilometer berkisar kepadatan penduduk sebesar rata-rata 300 tingkat kepadatan penduduknya. Ini terlihat di desa yang mayoritas ditempati oleh warga transmigrasi seperti desa Harapan yang hampir sebagian lahan pertaniannya telah terkelola secara baik oleh warganya. Sementara di beberapa desa yang ditempati oleh warga penduduk lokal, masih banyak lahan tidur yang belum terkelola secara produktif. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah kecamatan didalam memotivasi warga lokal dalam membangun ketahanan pangan di desa-desa yang ditempati oleh warga lokal Gorontalo.

Bila dilihat dari data di atas, sebaiknya penduduk desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya jarang, seharusnya dapat mengelola lahan yang lebih besar dan hasil pangannya pun akan berkali lipat keuntungan hasil pertanian, bila dibandingkan dengan desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk besar. Tetapi juga bagi desa yang memiliki tingkat kepadatan yang besar akan lebih mudah mencapai swasembada pangan karena ditunjang oleh tenaga kerja yang akan bekerja disektor pertanian yang terlalu banyak. Data tabel di atas sebagai jawaban akan program-program mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Namun bila dilihat dari rata-rata kepadatan penduduk di wilayah kecamatan Wonosari berada pada tingkat rata-rata 115 perkilometer penduduk. Ini berarti lahan pertanian akan dapat produktif bila dikelola sebagai lahan pertanian, perkebunan hortikultura, peternakan oleh tingkat kepadatan penduduk berada pada kisaran 115 perkilometer dalam mengelolah areal lahan pertanian yang ada di wilayah kecamatan Wonosari. Tetapi ada juga lahan yang luas diareal lereng gunung yang berada di atas miringan 30-40 derajat yang masih dapat dikembangkan untuk lahan pertanian seperti penanaman jagung dilereng tersebut. Kondisi dilapangan di wilayah areal lahan lereng gunung dan areal lahan di atas kisaran 30 derajat dimanfaatkan warga lokal dan warga transmigrasi untuk menanam tanaman jagung dan tebu.

#### **4.1.7. Keadaan Bidang Pendidikan.**

Pendidikan merupakan parameter dalam mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Karena dengan sarana pendidikan dapat mengembangkan ketahanan pangan disuatu wilayah. Hal ini dapat berpengaruh kepada gaya hidup masyarakat terhadap ketercapaian ketahanan pangan. Sehingga pendidikan dasar merupakan sarana dalam mensosialisasikan program-program akan membangun ketahanan pangan sejak dini. Artinya bila warga masyarakat memiliki pendidikan dasar memadai akan lebih mudah dalam membangun ketahanan pangan disuatu wilayah. Dengan demikian untuk mengetahui apakah suatu wilayah dapat mewujudkan ketahanan pangan dapat dilihat sberapa besar warga masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tersebut. Untuk melihat kondisi di wilayah kecamatan Wonosari dapat kita lihat apa yang telah dilakukan pemerintah daerah di wilayah tersebut. Berdasarkan penelusuran data yang disajikan oleh pemerintah Kecamatan Wonosari dapat kita analisa melalui tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 8. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, serta Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa <i>Vilage</i>	Sekolah <i>School</i>	Murid <i>Pupil</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio Murid- Guru <i>Pupil-Teacher Ratio</i>
1.	Mekar Jaya	3	172	21	8,19
2.	Harapan	2	368	22	16,73
3.	Suka Maju	2	304	25	12,16
4.	Makmur	2	250	17	14,71
5.	Sejahtera	1	200	11	18,18
6.	Pangeya	4	397	36	11,03
7.	Jati Mulya	1	153	10	15,30
8.	Tri Rukun	1	115	10	15,30
9.	Raharja	1	106	11	9,64
10.	Dimito	3	316	25	12,64
11.	Suka Mulya	2	232	19	12,21
12.	Sari Tani	6	660	43	15,35
13.	Tanjung Harapan	2	127	18	7,06
14.	Dulohupa	1	87	10	7,06
15.	SP 1	-	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	31	3.487	278	12,54

Sumber/Source :Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Wonosari/Education. Youth and Sport Departement Branch of Wonosari Subdistrict 2021.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan Wonosari dalam mengupayakan sarana sekolah bagi warga masyarakatnya yang membutuhkan pendidikan dasar telah tercapai hampir sekitar 98% desa yang ada diwilayah kecamatan Wonosari telah terdapat sekolah dasar, yang belum ada sekolah dasar tinggal dua (2) desa seperti desa SP 1 dan SP2 sebagai daerah persiapan desa yang ditempati oleh warga transmigrasi yang baru ditempatkan di Kecamatan Wonosari. Demikian halnya rasio antara siswa dan Gur masih sangat baik, dimana rata-rata rasio siswa dan guru ada diangka kisaran 12,54 persen artinya satu orang guru dapat membina 13 siswa yang idealnya ada pada 1 : 20. Ini merupakan suatu keunggulan dalam pembinaan siswa sekolah dasar di wilayah Kecamatan Wonosari. Dengan adanya kondisi rasio di bawah 1 : 20 wilayah kecamatan Wonosari mengalami kelebihan guru

sekolah Dasar. Dan ini akan mempermudah dalam membelajarkan siswa di sekolah Dasar Negeri.

Untuk melihat lebih lanjut tentang keberadaan sekolah Dasar baik Negeri, kita pun harus melihat sekolah yang berbasis keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari seperti yang kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 9. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, serta Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

<b>No</b>	<b>Desa Vilage</b>	<b>Sekolah School</b>	<b>Murid Pupil</b>	<b>Guru Teacher</b>	<b>Rasio Murid- Guru Pupil-Teacher Ratio</b>
1.	Mekar Jaya	-	-	-	-
2.	Harapan	-	-	-	-
3.	Suka Maju	-	-	-	-
4.	Makmur	-	-	-	-
5.	Sejahtera	-	-	-	-
6.	Pangeya	-	-	-	-
7.	Jati Mulya	-	-	-	-
8.	Tri Rukun	-	-	-	-
9.	Raharja	-	-	-	-
10.	Dimito	-	-	-	-
11.	Suka Mulya	-	-	-	-
12.	Sari Tani	-	-	-	-
13.	Tanjung Harapan	-	-	-	-
14.	Dulohupa	1	54	7	7,71
15.	SP 1	-	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	1	54	7	7,71

**Sumber/Source :Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Wonosari/Education. Youth and Sport Departement Branch of Wonosari Subdistrict 2021.**

Berdasarkan tabel di atas untuk sekolah yang berbasis keagamaan hanya satu sekolah yang ada Madrasah Ibtidaiyah yang ada di desa Dulohupa yang memiliki siswa 54 siswa dengan tenaga guru berjumlah 7 orang.

Keberadaan sekolah berbasis keagamaan sangat diperlukan dalam membangun religiusitas dikalangan siswa. Apalagi di era saat ini banyak pengaruh budaya yang mengintervensi tradisi lokal warga masyarakat. Tetapi sekalipun sekolah Madrasah Ibtidaiyah hanya satu di wilayah kecamatan Wonosari akan diimbangi oleh kehadiran sekolah dasar Negeri yang mengembangkan pendidikan ritual keagamaan ada pada mata pelajaran agama. Sehingga dapat menanggulangi pengaruh budaya asing yang akan mempengaruhi perilaku sosial siswa kita.

Disamping sekolah Dasar kita pun harus melihat kehadiran sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Wonosari dalam rangka membangun perilaku ketahanan pangan bagi warganya. Mengapa pendidikan kita harus dihubungkan dengan program ketahanan pangan, karena melalui pendidikan program ketahanan pangan dapat disosialisasikan melalui kecintaan siswa terhadap tanaman dan tumbuhan yang dapat memperkuat ketahanan pangan disuatu wilayah. Seiring dengan program pemerintah daerah kabupaten Boalemo melalui dinas pangan dengan motto:” **Sukseskan Boalemo Mo Pomulo**”. Semangat motto ini dapat disosialisasikan melalui pendidikan dasar kepada siswa akan kecintaan dalam semangat menanam pohon, tanaman jagung, pada, kedelei, sayur mayur di pekarangan sekolah masing-masing.

Untuk melihat sekolah menengah pertama yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari dapat kita analisis melalui tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 10. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, serta Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

<b>No.</b>	<b>Desa Vilage</b>	<b>Sekolah School</b>	<b>Murid Pupil</b>	<b>Guru Teacher</b>	<b>Rasio Murid- Guru Pupil-Teacher Ratio</b>
1.	Mekar Jaya	1	45	8	5,63
2.	Harapan	1	233	14	16,64
3.	Suka Maju	1	186	10	18,60
4.	Makmur	1	42	7	6,00
5.	Sejahtera	-	-	-	-
6.	Pangeya	2	162	13	12,46
7.	Jati Mulya	1	237	29	8,17
8.	Tri Rukun	-	-	-	-
9.	Raharja	1	108	9	12,00
10.	Dimito	-	-	-	-
11.	Suka Mulya	1	169	11	15,36
12.	Sari Tani	3	226	20	11,30
13.	Tanjung Harapan	-	-	-	-
14.	Duluhupa	-	-	-	-
15.	SP 1	-	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	<b>12</b>	<b>1408</b>	<b>121</b>	<b>11,64</b>

**Sumber/Source :Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Wonosari/Education. Youth and Sport Departement Branch of Wonosari Subdistrict 2021.**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan masih desa yang belum memiliki sekolah Menengah Pertama seperti desa Sejahtera, Desa Tri Rukun, Desa Dimito, Desa Tanjung Harapan, Desa Duluhupa, SP 1 dan SP 2. Bagi warga masyarakat yang ada di desa yang belum ada sekolah menengah Pertama (SMP) mereka melanjutkan studinya ke desa yang sudah memiliki sekolah SMP yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa tujuan. Tetapi untuk rasio guru dan siswa memang sangat baik bila dalam menanamkan pengetahuan kepada siswanya. Karena rasionya tidak melebihi rasio ideal 1 : 20. Rata-rata rasio siswa dan guru di Kecamatan Wonosari berada pada angka 11,64 %.

Tetapi ideal suatu desa harus memiliki sekolah menengah pertama, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah dinas pendidikan dalam memfasilitasi desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo akan kebutuhan sekolah Menengah Pertama. Demikian halnya dengan sekolah Madrasah Tsanawiyah yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 11. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, serta Rasio Murid-Guru Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa <i>Village</i>	Sekolah <i>School</i>	Murid <i>Pupil</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio Murid- Guru <i>Pupil-Teacher Ratio</i>
1.	Mekar Jaya	-	-	-	-
2.	Harapan	-	-	-	-
3.	Suka Maju	-	-	-	-
4.	Makmur	1	66	8	8,25
5.	Sejahtera	-	-	-	-
6.	Pangeya	-	-	-	-
7.	Jati Mulya	-	-	-	-
8.	Tri Rukun	-	-	-	-
9.	Raharja	-	-	-	-
10.	Dimito	1	38	5	7,60
11.	Suka Mulya	-	-	-	-
12.	Sari Tani	-	-	-	-
13.	Tanjung Harapan	-	-	-	-
14.	Dulohupa	-	-	-	-
15.	SP 1	-	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	<b>2</b>	<b>104</b>	<b>13</b>	<b>8,00</b>

Sumber/Source: Cabang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Wonosari/Education, Youth and Sport Departement Branch of Wonosari Subdistrict 2021.

Berdasarkan tabel di atas, diwilaha Kecamatan Wonosari sekolah yang berbasis agama khususnya bagi sekolah setingkat menengah pertama seperti Madrasah Tsanawiyah hadir di wilayah Kecamatan Wonosari dalam

membangun akhlak keagamaan bagi warga masyarakatnya. Ini menunjukkan sekolah ini memiliki kontribusi yang sangat baik dalam menularkan nilai-nilai keagamaan bagi warganya yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Sekalipun kondisi sekolah masih sangat terbatas hanya dua sekolah yang ada di desa Makmur dan di desa Dimito tetapi dapat mengakomodir minat warganya yang ingin memasukan anaknya disekolah Madrasah Tsanawiyah yang kurikulumnya sangat baik dalam mencegah budaya-budaya barat dan ideologi komunisme di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Kehadiran sekolah Madrasah Tsanawilayah (MTs) sangat diperlukan dalam membangun akhlak terhadap kecintaan warganya pada pengembangan ketahanan pangan. Karena terkadang untuk melestarikan alam harus mengenal djat Allah terhadap hubungan antara manusia dengan alam, ini mengandung makna manusia diwajibkan untuk menanam dan menjaga lingkungan alamnya supaya wilayahnya tidak akan mengalami kelangkaan pangan. Semangat ini senada dengan misi atau motto dinas Pangan Boalemo :” **Sukseskan Boalemo Mo Pomulo**”. Makna motto tersebut berharap melalui pendidikan warga masyarakat Boalemo memiliki semangat untuk menanam dan menjaga alam ini supaya dapat memberikan pangan bagi warga di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Dasar yang harus menjadi modal pemerintah Kecamatan dalam memperkuat sosialisasi terhadap pendukung dalam mewujudkan ketahanan Pangan harus dilanjutkan pada pendidikan warga masyarakat melalui pendidikan menengah atas SMA. Mengapa hal ini harus ada di Kecamatan Wonosari, karena pendidikan warga masyarakat di wilayah kecamatan Wonosari dianggap matang bila warganya dapat menikmati dan bersekolah pada pendidikan menengah atas atau SMA. Untuk itu diperlukan minimal satu atau dua sekolah menengah atas ada di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk melihat kemajuan pembangunan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA dapat kita amati melalui data yang telah ada di kantor camat Wonosari dan melalui aplikasi *google* di dunia maya atau data berbasis IT yang dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 12. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, serta Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa <i>Vilage</i>	Sekolah <i>School</i>	Murid <i>Pupil</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio Murid- Guru <i>Pupil-Teacher Ratio</i>
1.	Mekar Jaya	-	-	-	-
2.	Harapan	-	-	-	-
3.	Suka Maju	-	-	-	-
4.	Makmur	-	-	-	-
5.	Sejahtera	-	-	-	-
6.	Pangeya	-	-	-	-
7.	Jati Mulya	1	400	30	3,20
8.	Tri Rukun	-	-	-	-
9.	Raharja	-	-	-	-
10.	Dimito	-	-	-	-
11.	Suka Mulya	1	96	14	6,86
12.	Sari Tani	-	-	-	-
13.	Tanjung Harapan	-	-	-	-
14.	Dulohupa	-	-	-	-
15.	SP 1	-	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	2	496	44	11,27

**Sumber/Source** :Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Wonosari/*Education. Youth and Sport Departement Branch of Wonosari Subdistrict.*

Berdasarkan tabel di atas ternyata sekolah Menengah Atas atau SMA telah memiliki dua sekolah yang telah memperkuat pendidikan bagi warga kecamatan Wonosari dalam memperkuat wawasan pada pengembangan

program ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari. Mengapa ini penting karena SMA sangat baik membekalkan pengetahuan pada pengembangan ketahanan pangan. Dimana keberadaan sekolah Menengah Atas dapat melatih pengetahuan dan keterampilan siswanya untuk melakukan eksperimen pada kecintaan akan program daerah sebagaimana motto dinas pangan Boalemo terhadap pangan : ” **Sukseskan Boalemo Mo Pomulo**”. **Bagi lulusan SLTA** dianggap telah memiliki kompetensi dalam segala hal sekalipun penguasaan pengetahuan masih bersifat umum belum kepada keahlian bidang tertentu. Tetapi bagi lulusan SLTA dianggap telah kompeten dalam memahami regulasi dan mendorong partisipasi dalam membangun desa dianggap telah matang.

Dengan demikian bila dilihat dari data di atas terhadap pembangunan dibidang pendidikan untuk kecamatan Wonosari berada pada posisi sangat tangguh dalam mendukung program pembangunan ketahanan pangan karena ditunjang oleh fasilitas pendidikan sekolah sampai dilepel SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

Kecamatan Wonosari tidak hanya sekolah Menengah Atas (SMA) negeri, tetapi juga dihadirkan dengan sekolah yang berbasis agama didalam menindaklanjuti pembentukan akhlak pada warga masyarakatnya dengan adanya sekolah Madrasah Aliyah (MA) yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 13. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, serta Rasio Murid-Guru Sekolah Madrasah Aliyah (MA) menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

<b>No.</b>	<b>Desa Vilage</b>	<b>Sekolah School</b>	<b>Murid Pupil</b>	<b>Guru Teacher</b>	<b>Rasio Murid- Guru Pupil-Teacher Ratio</b>
1.	Mekar Jaya	-	-	-	-
2.	Harapan	-	-	-	-
3.	Suka Maju	1	62	9	6,89
4.	Makmur	-	-	-	-
5.	Sejahtera	-	-	-	-
6.	Pangeya	-	-	-	-
7.	Jati Mulya				
8.	Tri Rukun	-	-	-	-
9.	Raharja	-	-	-	-
10.	Dimito	-	-	-	-
11.	Suka Mulya	-	-	-	-
12.	Sari Tani	-	-	-	-
13.	Tanjung Harapan	-	-	-	-
14.	Dulohupa	-	-	-	-
15.	SP 1	-	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	1	62	9	6,89

**Sumber/Source :Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Wonosari/Education. Youth and Sport Departement Branch of Wonosari Subdistrict 2021.**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kecamatan Wonosari sangat ditunjang pendidikan dasarnya sampai dilevel sekolah menengah atas baik itu sekolah umum maupun sekolah berbasis pada agama seperti Madrasah Aliyah (MA) yang ada di desa Suka Maju dengan jumlah siswa 62 orang dan tenaga guru 9 orang dengan rasio antara siswa dan guru berada diposisi 6,89. Menunjukkan kecamatan Wonosari siap membangun program ketahanan pangannya melalui sosialisasi pada pendidikan dasar dan mengajarkan

pengetahuan dan keterampilan demi mewujudkan ketahanan pangan di wilayah kecamatan Wonosari melalui pendidikan dasar. Biasanya warga transmigrasi telah dibekali oleh pendidikan non formal dan informal dalam melakukan usaha dalam mewujudkan ketahanan pangan. Tetapi dengan adanya pendidikan formal bagi generasi selanjutnya sangat baik dalam menjalankan program ketahanan pangan yang telah terbangun kepada penduduk warga transmigrasi dan warga lokal yang termotivasi oleh etos kerja warga transmigrasi yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari. Sehingga dengan perpaduan pendidikan non formal, informal dan pendidikan formal telah memperkuat usaha pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam mensukseskan motto :”**Sukseskan Boalemo Mo Pomulo**”.

Disamping sekolah menengah atas SMA dan sekolah Madrasah Aliyah (MA) di wilayah kecamatan Wonosari pun ada sekolah kejuruan (SMK) sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 14. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, serta Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa Vilage	Sekolah School	Murid Pupil	Guru Teacher	Rasio Murid- Guru Pupil-Teacher Ratio
1.	Mekar Jaya	-	-	-	-
2.	Harapan	1	368	28	13,14
3.	Suka Maju	-	-	-	-
4.	Makmur	-	-	-	-
5.	Sejahtera	-	-	-	-
6.	Pangeya	1	93	18	5,17
7.	Jati Mulya				
8.	Tri Rukun	-	-	-	-
9.	Raharja	-	-	-	-
10.	Dimito	-	-	-	-
11.	Suka Mulya	-	-	-	-
12.	Sari Tani	-	-	-	-
13.	Tanjung Harapan	-	-	-	-
14.	Dulohupa	-	-	-	-
15.	SP 1	-	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	<b>2</b>	<b>461</b>	<b>46</b>	<b>10,02</b>

**Sumber/Source :Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Wonosari/Education. Youth and Sport Departement Branch of Wonosari Subdistrict 2021.**

Berdasarkan tabel di atas kecamatan Wonosari sangat tangguh dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam mensosialisasikan program ketahanan pangan melalui lembaga pendidikan formal. Dengan adanya dua sekolah kejuruan yang ada diwilayah kecamatan Wonosari akan memperkuat program ketahanan pangan melalui pendidikan. Apalagi kalau kurikulum sekolah kejuruan diarahkan kepada kondisi pertanian yang ada dikecamatan Wonosari yang hampir sebagian besar areal pertanian. Bila ini disikapi oleh pemerintah daerah bersama sekolah yang ada dalam mendukung ketahanan pangan di daerah, akan lebih efektif dan efisien terhadap pembangunan program ketahanan pangan di wilayah kecamatan Wonosari dan akan memberikan pengaruh kepada visi Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Pangan dalam mewujudkan motto: " **Sukseskan Boalemo Mo Pomulo**".

#### **4.1.8. Keadaan bidang kesehatan.**

Untuk melihat kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan sarana pendukung kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Tujuan sarana kesehatan adalah dalam memperperpanjang angka harapan hidup masyarakat. Sehingga keberhasilan dibidang kesehatan masyarakat ditentukan oleh angka harapan hidup yang ditentukan oleh pemerintah pusat bahkan oleh standar WHO. Standar angka harapan hidup nasional berkisar diatas 77 tahun. Artinya faktor harapan hidup menjadi cita-cita dalam mewujudkan masyarakat sehat. Dimana harapan hidup masyarakat di kecamatan Wonosari harus di atas angka harapan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam merealisasikan angka harapan hidup dapat difasilitasi melalui infrastruktur kesehatan dan tenaga medis yang tersedia di suatu wilayah seperti keberadaan Rumah Sakit, Puskesmas dan pusat layanan kesehatan (PUSTU) di setiap desa. Untuk menelusuri pemerintah kecamatan Wonosari dapat

melaksanakan program kesehatan dapat kita amati melalui data yang telah ada di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel :15.Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Wonosari  
Number oh Health Facility by Village Subdistrict.**

No.	Desa Vilage	Puskesmas Public Health Center	Puskesmas Pembantu Public Health Sub Center	Puskesmas Keliling Mobile Public Health
1.	Mekar Jaya	-	1	-
2.	Harapan	-	1	-
3.	Suka Maju	-	1	-
4.	Makmur	1	-	1
5.	Sejahtera	-	1	-
6.	Pangeya	-	2	-
7.	Jati Mulya	-	1	-
8.	Tri Rukun	-	1	-
9.	Raharja	-	-	-
10.	Dimito	-	1	-
11.	Suka Mulya	-	1	-
12.	Sari Tani	1	5	-
13.	Tanjung Harapan	-	1	-
14.	Dulohupa	-	1	-
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>

Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari/All Village office in Wonosari Subdistrict 2021.

Berdasarkan tabel di atas untuk sarana kesehatan telah memadai dalam memfasilitasi bila ada warga masyarakatnya mengalami gangguan kesehatan. Dimana fasilitas puskesmas terdiri dari dua (2) puskesmas dan tujuh belas (17) Puskesmas pembantu dengan satu (1) buah puskesmas keliling dalam mengakomodir kebutuhan warga masyarakatnya. Tetapi bagi desa yang belum

memiliki sarana kesehatan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mengadakannya.

Sarana kesehatan lainnya dalam mendukung kesehatan masyarakat dapat kita lihat melalui kehadiran sarana lainnya seperti Posyandu, Polindes, dan tempat praktek dokter. Sebaran prasarana penunjang kesehatan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel :16.Lanjutan Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Wonosari/ Number oh Health Facility by Village Subdistrict.**

No.	Desa Vilage	Posyandu Material &Child Health Center	Polindes Village Clinic	Tempat Praktek Dokter Clinic
1.	Mekar Jaya	1	-	-
2.	Harapan	1	-	-
3.	Suka Maju	1	1	-
4.	Makmur	2	1	3
5.	Sejahtera	1	-	-
6.	Pangeya	1	-	-
7.	Jati Mulya	1	1	1
8.	Tri Rukun	1	-	-
9.	Raharja	1	-	-
10.	Dimito	3	-	-
11.	Suka Mulya	2	1	-
12.	Sari Tani	5	-	-
13.	Tanjung Harapan	1	-	-
14.	Dulohupa	1	-	-
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari/All Village office in Wonosari Subdistrict 2021.

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan Wonosari sarana pendukung kesehatan telah cukup memadai dalam mengatasi kesehatan masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan oleh angka keberadaan Posyandu berjumlah 22 hampir disetiap desa terkecuali SP1 dan SP2 yang belum memiliki Posyandu dan didukung oleh keberadaan fasilitas Polindes di beberapa desa dengan jumlah empat buah (4) dan juga kehadiran tempat praktek dokter di beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari berjumlah empat (4) yang ada di desa Makmur tiga dan di desa Jati Mulya satu (1). Kehadiran beberapa sarana kesehatan di wilayah kecamatan Wonosari akan dapat membantu kesehatan masyarakat.

Fasilitas pendukung kesehatan di wilayah Kecamatan Wonosari bukan hanya itu saja yang tersedia dalam mendukung penanganan kesehatan. Namun wilayah Kecamatan Wonosari pun didukung oleh beberapa fasilitas yang ada, baik yang dibangun pemerintah daerah maupun usaha perorangan yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari seperti yang dapat kita amati pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 17. Lanjutan Lanjutan Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Wonosari/ Number oh Health Facilty by Village Subdistrict.**

No.	Desa <i>Vilage</i>	Tempat Praktek Bidan <i>Midwife Clinic House</i>	Apotek <i>Pharmacy</i>	Toko Obat <i>Drugstore</i>
1.	Mekar Jaya	-	-	-
2.	Harapan	2	-	-
3.	Suka Maju	-	-	-
4.	Makmur	-	-	1
5.	Sejahtera	1	-	-
6.	Pangeya	-	-	-
7.	Jati Mulya	1	-	-
8.	Tri Rukun	2	-	2
9.	Raharja	1	-	-
10.	Dimito	-	-	-
11.	Suka Mulya	1	-	-
12.	Sari Tani	3	-	-
13.	Tanjung Harapan	-	-	-
14.	Dulohupa	-	-	-
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari/*All Village office in Wonosari Subdistrict 2021.*

Tabel di atas memberikan petunjuk bahwa kecamatan Wonosari sangat baik dengan kehadiran tenaga Bidan desa yang saat ini berjumlah 11 tenaga bidan Desa yang tersebar di beberapa desa di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Demikian halnya dengan toko obat sebagai kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari telah berjumlah tiga buah toko obat. Dengan demikian warga masyarakat telah terbantu akan kebutuhan dasar kesehatannya. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran

warga masyarakat akan hidup sehat dan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.

Berdasarkan data fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo sudah semakin baik, tetapi juga harus di dukung oleh sarana fasilitas Rumah Sakit yang ada di kabupaten Boalemo. Bila dilihat jarak antara Rumah sakit dengan kecamatan Wonosari berkisar 7 KM s/d 10 KM yang akan ditempuh dalam waktu 20 s/d 30 menit dapat berada di Rumah sakit. Baik itu Rumah Sakit Boalemo maupun Rumah Sakit Tombulilato. Kehadiran Rumah sakit akan lebih memberikan dukungan kepada kesehatan masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Untuk melihat kekuatan bidang kesehatan bagi pemerintah Kecamatan Wonosari harus juga diperhatikan tenaga medis sebagai kebutuhan sangat vital bagi pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Untuk pemerintah kecamatan Wonosari dapat diamati melalui hasil penelusuran data di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel :18.Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Wonosari.**

<b>No.</b>	<b>Desa Vilage</b>	<b>Dokter Doctor</b>	<b>Perawat Nurse</b>	<b>Bidan Midwife</b>
1.	Mekar Jaya	-	-	1
2.	Harapan	-	-	4
3.	Suka Maju	-	3	3
4.	Makmur	3	3	1
5.	Sejahtera	-	-	4
6.	Pangeya	-	-	2
7.	Jati Mulya	1	1	1
8.	Tri Rukun	-	6	2
9.	Raharja	-	1	1
10.	Dimito	-	-	1
11.	Suka Mulya	-	-	1
12.	Sari Tani	3	9	10
13.	Tanjung Harapan	-	-	1
14.	Dulohupa	-	-	1
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

**Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari/All Village office in Wonosari Subdistrict 2021.**

Berdasarkan tabel di atas tenaga medis bagi wilayah Kecamatan Wonosari telah sedikit memberikan dukungan pada pelayanan kesehatan masyarakat. Walaupun ada beberapa desa yang belum memiliki tenaga medis. Tetapi ini akan dapat diakomodir desa lain dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga medis bagi desa yang tidak memiliki tenaga medis dalam mengatasi kesehatan masyarakatnya. Memang idealnya setiap desa harus memiliki tenaga dokter, tenaga perawat dan tenaga bidan. Tetapi dengan kondisi yang ada saat ini sedikit dapat mempermudah mengatasi kesehatan masyarakat yang memerlukan bantuan pengobatan bagi pasiennya sebelum di rujuk

kerumah sakit terdekat yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

#### 4.1.9. Keadaan Agriculture ( Pertanian).

Kondisi Pertanian di Wilayah Kecamatan Wonosari dapat diamati melalui data pertanian yang terdiri atas luas panen tanaman padi dan palawija, produksi tanaman sayur, produksi tanaman buah, dan luas tanaman perkebunan, dan jumlah ternak. Produksi tanaman padi dan palawija tidak dapat ditampilkan untuk tahun 2016, karena sedang berlangsung proses perubahan metode perhitungan hasil panen. Untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 19. Luas Panen Padi dan Palawija.**

No.	Komoditi <i>Commodity</i>	Luas Panen <i>Harvested Area</i> (ha)
1.	Padi/ <i>Paddy</i>	6.201
2.	Jagung/ <i>Maize</i>	14.359
3.	Ubi Kayu/ <i>Cassava</i>	8
4.	Ubi jalar/ <i>Sweet Pototo</i>	3
5.	Kedelai/ <i>Saybean</i>	1
6.	Kacang Hijau/ <i>Mungbeans</i>	7
7.	Kacang Tanah/ <i>Peanut</i>	16

**Sumber /Source : Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo tahun 2021.**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kecamatan Wonosari untuk komoditas pangan telah mengembangkan lahan pertanian untuk tujuh tanaman seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang hijau dan kacang tanah dalam memperkuat ketahanan pangan bagi warga masyarakatnya dan memberikan kontribusi bagi warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Data di atas belum memberikan jawaban berapa ton perpanen atau pertahun bagi setiap komoditi pertanian yang dilakukan oleh

warga transmigrasi. Dan data di atas belum merepresentasikan tentang kebutuhan pangan bagi warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari. Untuk menelusuri tentang kesediaan pangan bagi warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari, harus memiliki data yang pasti tentang produksi per ton dan pertahun. Sehingga jawaban ketersediaan pangan dapat terjawab sudah.

Demikian halnya dengan kontribusi warga transmigrasi belum dapat terjawab dari data di atas. Untuk mengetahui berapa kontribusi warga transmigrasi bagi ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari baru akan terjawab bila hasil riset dapat mengungkap perkapita warga transmigrasi dalam mengelola lahan pertanian. Untuk itu diperlukan data pendukung lain yang ada di dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.

Untuk menelusuri program ketahanan pangan dapat juga kita melihat hasil holtikultura yang dilakukan warga transmigrasi bersama warga etnis lokal, diantaranya dapat dilihat melalui produksi tanaman sayur yang ada pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 20. Produksi Tanaman Sayur di Kecamatan Wonosari**

No.	Komoditi <i>Comudity</i>	Produksi <i>Production</i>
1.	Bawang Merah/ <i>Shallot</i>	482
2.	Sawi/ <i>Lettuce</i>	454
3.	Kacang Panjang/ <i>Long beans</i>	298
4.	Cabai/ <i>Chili</i>	138
5.	Cabai Rawit/ <i>Chili Pepper</i>	3.082
6.	Tomat/ <i>Tomato</i>	460
7.	Terung/ <i>Eggplant</i>	246
8.	Buncis/ <i>Bean</i>	49
9.	Ketimun/ <i>Cucumber</i>	410
10.	Kangkung/ <i>Water Spinach</i>	254
11.	Bayam/ <i>Spinach</i>	200

**Sumber/Source : Dinas Pertanian kabupaten Boalemo 2021**

Berdasarkan tabel di atas warga masyarakat kecamatan Wonosari telah berupaya melaksanakan program pangan melalui tanaman sayur mayur bagi

kebutuhan masyarakat yang ada di kabupaten Boalemo. Potensi sayur mayur untuk hasil pertanian di kecamatan Wonosari bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan akan pangan bagi warga kecamatan Wonosari, tetapi dapat juga memenuhi kebutuhan dari warga masyarakat di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dengan melihat data di atas pemerintah kecamatan Wonosari akan menjadi daerah tujuan pengembangan pangan yang akan menjadikan kabupaten Boalemo sebagai penyedia pangan bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Seperti daerah kabupaten lain dan kota Gorontalo. Bila ini dikembangkan oleh pemerintah daerah akan berakibat kepada kesejahteraan warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari khususnya bagi petani yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari.

Etos kerja warga transmigrasi dalam pengembangan program pangan perlu diapreseasi oleh warga lokal dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Sebagai wujud nyata keuletan warga transmigrasi dalam membangun daerah kabupaten Boalemo dapat dilihat dari kontribusi terbesar terhadap penyediaan pangan bagi pemerintah Kabupaten Boalemo. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan warga transmigrasi meningkatkan produksi buah sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 21. Produksi Tanaman Buah di Kecamatan Wonosari.**

<b>No.</b>	<b>Komoditi Comudity</b>	<b>Produksi Production (kuintal)</b>
1.	Alpukat/ <i>Avocado</i>	-
2.	Duku/ <i>langsat</i>	-
3.	Durian/ <i>Durian</i>	398,00
4.	Jambu Biji/ <i>Guava</i>	-
5.	Jambu air/ <i>Water apple</i>	-
6.	Jeruk siam	295,24
7.	Jeruk besar	-
8.	Mangga/ <i>Manggo</i>	9,60
9.	Manggis/ <i>Mangosteen</i>	-
10.	Melon/ <i>Melon</i>	14,10
11.	Nangka/ <i>Jackfruit</i>	540,25
12.	Nanas/ <i>Pineapple</i>	451,43
13.	Pepaya/ <i>Papaya</i>	685,50
14.	Pisang/ <i>Banana</i>	9.647,56
15.	Rambutan/ <i>Hairfruit</i>	311,78
16.	Salak/ <i>Snakefruit</i>	-
17.	Sawo/ <i>Sapodilla</i>	0,99
18.	Belimbing/ <i>Starfruit</i>	-
19.	Semangka/ <i>Watermelon</i>	14,50

**Sumber/Source :Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo/Agriculture and plantation  
Departement Of Boalemo Regency 2021.**

Berdasarkan tabel di atas program pengembangan ketahanan pangan bagi pemerintah kecamatan Wonosari telah melaksanakan penanaman buah guna memenuhi kebutuhan dasar akan nutrisi warga masyarakat di Kabupaten Boalemo dengan penanaman tanaman buah. Hasil dari apa yang dilakukan oleh warga transmigrasi biasa ditemui dipasar-pasar tradisional yang anda bisa ditemukan di wilayah Kabupaten Boalemo dengan daya beli masyarakat dapat

dijangkau. Roda perputaran ekonomi di kecamatan Wonosari sangat terbantuan dengan warga transmigrasi dan warga lokal melakukan penanaman tanaman buah. Biasanya kebutuhan dasar nutrisi seperti ini masuk kewilayah Gorontalo berasal dari daerah tetangga seperti Kotamobagu dll. Tetapi dengan budidaya tanaman buah di Kecamatan Wonosari telah dapat dipenuhi dipasar-pasar tradisional di wilayah Gorontalo. Perputaran usaha tanaman buah mengangkat tarap hidup bagi masyarakat petani di Kecamatan Wonosari.

Program pangan yang dikembangkan oleh warga masyarakat transmigrasi dan warga lokal di Kecamatan Wonosari akan membantu kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di kabupaten Boalemo. Bila melihat potensi pada pengembangan ketahanan pangan dapat dilihat melalui luas tanaman serta produksi tanaman perkebunan rakyat sebagaimana yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 22.Luas Tanaman serta Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat di Kecamatan Wonosari.**

No.	Komoditi <i>Comudity</i>	Luas Tanaman <i>Extensive Plantation</i>	Produksi <i>Production</i> (ton)
1.	Kelapa/ <i>Coconut</i>	1.199,20	477,58
2.	Kelapa Sawit/ <i>Oil Palm</i>	2.515,25	-
3.	Kakap/ <i>Cocoa</i>	947,23	268
4.	Cengkeh/ <i>Clove</i>	42,00	-
5.	Tebu/ <i>Sugarcane</i>	2.269,79	-
6.	Kemiri/ <i>kemiri</i>	12,00	1,50
7.	Kopi/ <i>Coffe Bean</i>	15,00	2,00
8.	Jambu Mete/ <i>Cashew</i>	5,70	-
9.	Aren/ <i>Sugar Palm</i>	10,70	1,23
10.	Kapuk/ <i>kapok</i>	-	-
11.	Pala/ <i>Nutmeg</i>	3,00	-

Sumber/*Source* :Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo/*Agriculture and plantation Departement Of Boalemo Regency 2021.*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Wonosari sangat potensial dalam mengembangkan ketahanan pangan dengan

produksi yang sangat memadai dalam kebutuhan pangan bagi warga masyarakat di kabupaten Boalemo, sekalipun di atas masih ada data yang belum terisi. Tetapi apa yang dicantumkan pada tabel di atas merupakan program pengembangan ketahanan pangan bagi pemerintah kecamatan Wonosari.

Dalam mendukung ketahanan pangan di atas, juga dapat dilihat dari usaha peternakan warga masyarakat transmigrasi yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan. Karena membangun ketahanan pangan juga dapat dilihat dari keberhasilan pengembangan peternakan dengan melalui program pakan ternak yang diperoleh melalui usaha pertanian warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari.

Untuk membuktikan apakah ada usaha peternakan di wilayah Kecamatan Wonosari dapat kita telusuri dari data populasi ternak di Kecamatan Wonosari. Pengembangan peternakan di daerah kecamatan Wonosari akan berpengaruh terhadap kebutuhan daging di wilayah kabupaten Boalemo. Hal ini akan terlihat pada saat menjelang hari raya Idul Adha. Pada saat itu kebutuhan akan hewan korban sangat tinggi, dimana banyak orang yang ingin melakukan korban mencari sapi, kambing untuk dikorbankan pada hari raya Idul Adha selama 3 hari.

Dengan demikian usaha peternakan yang dikembangkan oleh peternak akan menaikkan tingkat kesejahteraan bagi warga masyarakat di wilayah Kecamatan Wonosari. Untuk melihat potensi tersebut dapat kita amati melalui berapa populasi ternak di kecamatan Wonosari pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 23. Populasi Ternak di Kecamatan Wonosari**

<b>No.</b>	<b>Jenis Ternak <i>Type of Livestock</i></b>	<b>Populasi <i>Production</i></b>
1.	Sapi Potong/ <i>Beef Cattle</i>	13.437
2.	Sapi Perah/ <i>Dairy Cow</i>	-
3.	Kambing / <i>Goat</i>	2.411
4.	Babi/ <i>Pig</i>	1.357
5.	Kuda/ <i>Horse</i>	22
6.	Kerbau/ <i>Water Buffalo</i>	-
7.	Ayam Buras/ <i>Chicken</i>	4.025
8.	Ayam Petelur/ <i>Laying Hens</i>	-
9.	Ayam Pedaging/ <i>Broiler</i>	26.254
10.	Itik/ <i>Duck</i>	3.795

**Sumber/Source :Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo/*Agriculture and plantation Departement Of Boalemo Regency 2021.***

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan warga masyarakat transmigrasi dan warga lokal telah mengembangkan sektor peternakan yang diperoleh melalui pakan ternak hasil pertanian masyarakat. Artinya pengembangan peternakan mudah dikembangkan di wilayah Kecamatan Wonosari, karena ada usaha pertanian yang dikembangkan oleh warga masyarakat. Berdasarkan data di atas usaha peternakan berkembang di wilayah Kecamatan Wonosari yang akan memperkuat usaha program ketahanan pangan bagi pemerintah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Hubungan antara program usaha peternakan dengan program ketahanan pangan adalah kebutuhan akan stok daging bagi warga masyarakat Kabupaten Boalemo yang memerlukan kebutuhan akan daging ternak. Sehingga pakan ternak dan ketersediaan daging bagi warga masyarakat akan menjadi salah satu indikator dalam menentukan ketahanan pangan di suatu wilayah. Dengan adanya usaha peternakan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan Wonosari dan warga masyarakat Kabupaten Boalemo, karena pemerintah daerah tidak perlu melakukan kebijakan impor dari daerah lain atau negara lain dalam memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat di Kabupaten Boalemo.

#### 4.1.10.Keadaan Infrastruktur Pendukung Program Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari.

Infra struktur merupakan sarana dalam mendukung program ketahanan pangan di suatu wilayah. Dimana dengan adanya infra struktur yang memadai akan memudahkan warga dalam mengembangkan usaha disektor pertanian, perkebunan dan disektor perdagangan. Dengan demikian sarana infrastruktur akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Boalemo dalam mendukung usaha program pembangunan pangan di wilayah Kabupaten Boalemo, khususnya di wilayah Kecamatan Wonosari.

Untuk melihat intervensi pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam melaksanakan program pembangunan ketahanan pangan dapat dilihat melalui kondisi jalan Menurut Desa dan jenis permukaan terluas pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 24. Kondisi Jalan Menurut Desa dan Jenis Permukaan terluas di Kecamatan Wonosari.**

No.	Desa <i>Vilage</i>	Aspal <i>Asphalt</i>	Diperkeras <i>Handened</i>	Tanah <i>Dirt</i>	Lainnya <i>Others</i>
1.	Mekar Jaya	-	✓	-	-
2.	Harapan	✓	-	-	-
3.	Suka Maju	✓	-	-	-
4.	Makmur	-	✓	-	-
5.	Sejahtera	-	✓	-	-
6.	Pangeya	-	✓	-	-
7.	Jati Mulya	✓	-	-	-
8.	Tri Rukun	✓	-	-	-
9.	Raharja	-	✓	-	-
10.	Dimito	-	✓	-	-
11.	Suka Mulya	-	✓	-	-
12.	Sari Tani	-	✓	-	-
13.	Tanjung Harapan	-	✓	-	-
14.	Dulohupa	-	✓	-	-
15.	SP 1	-	✓	-	-
16.	SP 2	-	✓	-	-

**Sumber /Source : Kantor Desa Se Kecamatan Wonosari/ All Vilage Office In Wonosari Subdistrict.**

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2016 jalan desa masih banyak yang belum teraspal masih dalam kondisi pengerasan, tetapi di tahun 2021 kondisi jalan menuju desa sebagai sarana dalam memudahkan petani dan pedagan untuk melakukan upaya pengambilan sumber pangan bagi warga transmigrasi dan penduduk lokal sudah semakin baik, artinya jalan masuk kedesa-desa hampir 95% telah diaspal. Tetapi ada kondisi jalan yang mulai rusak karena curah hujan yang tinggi mengakibatkan banyak ruas jalan kembali berlubang. Hal inilah yang dilakukan upaya perbaikan oleh pemerintah daerah untuk menganggarkan kembali melalui APBD pemerintah kabupaten Boalemo.

Intervensi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sangat penting dalam mendukung program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Boalemo dalam menunjang sarana infra struktur pendukung program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari, seperti perbaikan jembatan, jalan rusak dsb. Semua ini dilakukan dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari dan diwilayah kecamatan lainnya sebagai penghubung transportasi dari hasil program usaha dalam mendukung ketahanan pangan di kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk menelusuri kondisi infrastruktur menuju jalan ibu kota Kecamatan Wonosari dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 25. Kondisi Jalan dari Desa Ke Ibu Kota Kecamatan Wonosari.**

<b>No.</b>	<b>Desa Vilage</b>	<b>Aspal Asphalt</b>	<b>Diperkeras Handened</b>	<b>Tanah Dirt</b>	<b>Lainnya Others</b>
1.	Mekar Jaya	✓	-	-	-
2.	Harapan	✓	-	-	-
3.	Suka Maju	✓	-	-	-
4.	Makmur	✓	-	-	-
5.	Sejahtera	✓	-	-	-
6.	Pangeya	✓	-	-	-
7.	Jati Mulya	✓	-	-	-
8.	Tri Rukun	✓	-	-	-
9.	Raharja	✓	-	-	-
10.	Dimito	✓	-	-	-
11.	Suka Mulya	✓	-	-	-
12.	Sari Tani	✓	-	-	-
13.	Tanjung Harapan	✓	-	-	-
14.	Dulohupa	✓	-	-	-
15.	SP 1	✓	-	-	-
16.	SP 2	✓	-	-	-

**Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah kecamatan Wonosari tentang infrastruktur dalam menunjang ketahanan pangan khususnya akses jalan menuju ibu kota kecamatan telah terbuka dan kondisinya jalannya telah diaspal. Namun kondisi jalan saat ini ada yang rusak karena longsor dan curah hujan yang tinggi. Sehingga diperlukan perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo dalam memperlancar akses petani menyalurkan hasil-hasil pertanian kesentra-sentra perdagangan di Ibu kota Kecamatan sampai ketinggian kabupaten Boalemo.

Infrastruktur jalan sangat diperlukan dalam memperkuat program ketahanan pangan bagi pemerintah kecamatan Wonosari yang saat ini warga transmigrasi memiliki etos yang tinggi dalam mengelola pertanian, perkebunan, peternakan dan berbagai usaha yang akan memperkuat ketahanan pangan bagi pemerintah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

#### 4.1.11.Keadaan Sektor Industri, Perdagangan dan keuangan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Perkembangan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kondisi sektor industri, perdagangan dan keuangan. Semakin aktif kegiatan tersebut semakin aktifnya pergerakan perekonomian di suatu wilayah. Untuk menelusuri indikator dalam memperkuat keberhasilan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari dapat kita lihat data yang ada di database pemerintah Kabupaten Boalemo di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 26. Jumlah industri Besar/sedang Menurut Desa di Kecamatan Wonosari.**

No.	Desa <i>Vilage</i>	Industri Besar <i>Lage Class Industri</i> ( $\geq 100$ pekerja )	Industri sedang <i>Middle Class Industri</i> (20-29 pekerja)
1.	Mekar Jaya	-	-
2.	Harapan	-	-
3.	Suka Maju	-	-
4.	Makmur	-	-
5.	Sejahtera	-	-
6.	Pangeya	-	-
7.	Jati Mulya	-	-
8.	Tri Rukun	-	-
9.	Raharja	-	-
10.	Dimito	-	-
11.	Suka Mulya	-	-
12.	Sari Tani	-	-
13.	Tanjung Harapan	-	-
14.	Dulohupa	-	-
15.	SP 1	-	-
16.	SP 2	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari <i>Wonosari /Subdistrict</i></b>		

**Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari 2021**

Berdasarkan tabel di atas untuk sektor industri besar dan industri sedang warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari belum memiliki industri tersebut. Sehingga diperlukan industri tersebut dalam membangun wilayah. Tetapi potensi pengembangan industri kearah itu sudah ada bila dilihat dari kondisi usaha yang dikembangkan warganya.

Untuk menelusuri potensi tersebut kita akan lihat melalui usaha industri mikro/kecil dalam memperkuat program ketahanan pangan yang ada di setiap desa di wilayah Kecamatan Wonosari seperti yang ada pada data tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 27. Jumlah Industri Mikro Menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa <i>Vilage</i>	Jenis Industri <i>Type of industry</i>		
		Bahan dari kulit <i>Leather Based Industry</i>	Bahan dari Kayu <i>Word Based Industry</i>	Bahan dari logam <i>Metal Based Industry</i>
1.	Mekar Jaya	-	-	-
2.	Harapan	-	3	-
3.	Suka Maju	-	-	-
4.	Makmur	-	1	-
5.	Sejahtera	-	4	-
6.	Pangeya	-	2	-
7.	Jati Mulya	-	2	-
8.	Tri Rukun	-	2	-
9.	Raharja	-	1	-
10.	Dimito	-	3	-
11.	Suka Mulya	-	-	-
12.	Sari Tani	-	6	-
13.	Tanjung Harapan	-	3	-
14.	Dulohupa	-	-	1
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari <i>Wonosari /Subdistrict</i></b>	-	<b>26</b>	<b>2</b>

**Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari 2021.**

Berdasarkan tabel di atas jenis industri yang dikembangkan lebih besar terbuat dari bahan kayu berjumlah 26 yang tersebar di sepuluh desa dengan jumlah bervariasi. Kegiatan industri yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari sebagian besar dilakukan oleh warga transmigrasi dan juga beberapa pelaku ekonomi dari warga lokal. Dengan adanya pengembangan sektor industri mikro di wilayah Kecamatan Wonosari dapat membantu sektor penerimaan pada PAD di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Dengan adanya kontribusi warga transmigrasi dan beberapa etnis lokal akan dapat digunakan dalam memperbaiki beberapa infrastruktur yang akan dapat mendukung sektor program ketahanan pangan. Kita ketahui bersama bahwa PAD di kabupaten Boalemo akan dikembalikan lagi bagi warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari melalui program perbaikan jalan dan jembatan sebagai akses utama dalam memasarkan hasil-hasil pangan yang dikelola oleh warga masyarakat transmigrasi dan beberapa warga lokal Gorontalo.

Demikian juga dengan bahan industri lain yang dikembangkan oleh warga masyarakat yang di Kecamatan Wonosari yang berasal dari bahan anyaman, gerabah dan kerajinan kain seperti yang ada dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 28.Lanjutan Jumlah Industri Mikro Menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa ( <i>Village</i> )	Jenis Industri <i>Type of industry</i>		
		Anyaman <i>Plait</i>	Gerabah <i>Potery</i>	Kerajinan kain <i>Cloth</i>
1.	Mekar Jaya	-	-	-
2.	Harapan	-	-	2
3.	Suka Maju	3	2	5
4.	Makmur	-	-	3
5.	Sejahtera	2	1	1
6.	Pangeya	-	1	2
7.	Jati Mulya	-	-	4
8.	Tri Rukun	6	-	2
9.	Raharja	-	-	2
10.	Dimito	3	-	1
11.	Suka Mulya	-	-	2
12.	Sari Tani	-	-	-
13.	Tanjung Harapan	1	-	1
14.	Dulohupa	-	-	-
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>25</b>

Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari 2021.

Demikian juga dengan sektor industri makanan dan minuman yang dilakukan oleh warga masyarakatnya di dalam meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari sebagai parameter dalam

melihat keberadaan warga masyarakat kita telah memenuhi syarat sebagai warga masyarakat yang memiliki kemandirian pangan, karena daya beli warga masyarakat telah semakin berkecukupan yang dapat kita lihat melalui pengembangan usaha seperti yang ada pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 29. Lanjutan Jumlah Industri Mikro Menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa <i>Village</i>	Jenis Industri <i>Type of industry</i>		
		Makanan dan minuman <i>Food &amp; Beverages</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
1.	Mekar Jaya	1	1	2
2.	Harapan	32	10	37
3.	Suka Maju	2	2	14
4.	Makmur	40	-	44
5.	Sejahtera	4	5	17
6.	Pangeya	3	-	8
7.	Jati Mulya	3	6	15
8.	Tri Rukun	6	5	20
9.	Raharja	1	6	11
10.	Dimito	2	-	9
11.	Suka Mulya	5	-	7
12.	Sari Tani	15	-	21
13.	Tanjung Harapan	4	-	9
14.	Dulohupa	3	-	4
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari <i>Wonosari Subdistrict</i></b>	<b>121</b>	<b>35</b>	<b>218</b>

Sumber / *Source* : Kantor Desa se kecamatan Wonosari 2021

Berdasarkan tabel di atas total jenis industri berjumlah 218 yang merupakan akumulasi dari semua usaha warga masyarakat di Kecamatan Wonosari sangat potensial dalam mendukung program ketahanan pangan, karena warga transmigrasi sebagian besar sebagai pelaku usaha dalam menambah sumber pendapatan daerah dan berimplikasi bagi kesejahteraan

warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## **4.2. Hasil Penelitian.**

### **4.2.1. Kontribusi Warga Transmigrasi Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

Ketahanan pangan merupakan program pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan bagi pemerintah pusat, sehingga pangan sebagai kebutuhan dasar warga negara dapat disediakan oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Oleh karenanya dalam mewujudkan kondisi ketahanan pangan, warga masyarakat di suatu daerah harus berusaha dalam melakukan pemanfaatan lahan yang ada. Oleh karenanya kehadiran warga transmigrasi di daerah Kecamatan wonosari telah berpengaruh bagi keterediaan pangan bagi warga masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi warga transmigrasi bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo dapat kita lihat melalui indikator kontribusi diantaranya sebagai berikut :

#### **a. Kontribusi pada bidang pertanian dan perkebunan.**

Bila melihat hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa orang responden penelitian, diantaranya sekretaris Dinas pangan Kabupaten Boalemo bapak Rosman Mantu ketika disedorkan pertanyaan seberapa besar kontribusi warga transmigrasi bagi program ketahanan pangan di daerah Kabupaten Boalemo memberikan jawaban sebagai berikut :

“ Menurut beliau warga transmigrasi mulai dari desa Bongo 1, Bongo 2 , desa Bongo 3 sampai dengan SP1 dan SP2, persiapan desa SP3 kehadiran warga transmigrasi pelan-pelan telah merubah pola-pola kehidupan warga lokal, dari segi cara bercocok tanam dan beternak yang merupakan bagian dari program pangan yang diprogramkan

oleh Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Jenis pangan yang banyak di tanam oleh warga transmigrasi seperti padi, jagung, ubi-ubian bahkan tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sehingga untuk mengenal atau mengidentifikasi mana warga transmigrasi dan mana warga etnis lokal ketika memasuki kecamatan Wonosari sangat mudah diidentifikasi melalui pekarangan rumah warga. Dimana untuk mengetahui rumah warga transmigrasi dapat diketahui melalui jenis tanaman yang banyak ditanam di pekarangan rumah warga transmigrasi, sedangkan rumah warga etnis lokal areal pekarangan rumahnya biasa hanya ditanami pisang. Dan bila kita memasuki desa Tri Rukun yang ditempati oleh tiga etnis, yaitu etnis Bali, Minahasa dan etnis Gorontalo disana akan terlihat juga perbedaan pada pekarangan rumah warga transmigrasi dan warga lokal, namun yang kita apresiasi hubungan harmonis diantara etnis lokal dengan warga transmigrasi sangat terjalin. Bila kita melihat dari segi ketahanan pangan memang warga transmigrasi sangat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ketahanan pangan (Padi, Jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan). Ketika ditanya apakah warga masyarakat dapat menjangkau harga pangan jawabannya dapat dijangkau oleh masyarakat. Intervensi dari dinas pangan adalah program Kebijakan P2L (Pekarangan Pangan lestari dulunya ada KRBL pekarangan keluarga) karena adanya pandemik maka anggaran mengalami refocusing dan realokasi anggaran sehingga bantuan untuk program tersebut hanya dilakukan melalui DAK. Program P2L sering disampaikan oleh bapak bupati dengan program Barito S (bawang, Rica, Tomat dan sayuran) untuk ditanam di pekarangan rumah warga dengan tujuan pemerintah daerah kabupaten Boalemo ingin mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Kabupaten Boalemo. Bila dibandingkan tentang kontribusi terbesar terhadap pangan maka dapat dilihat melalui luasan lahan dari 7 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo. Dimana kecamatan Wonosari terbesar luasan sawah dan luasan hortikultura dibandingkan dengan kecamatan Paguyaman, tetapi untuk luasan jagung masih wilayah kecamatan paguyaman yang besar. Tetapi untuk prestasi kontribusi pangan bagi warga masyarakat Kabupaten Boalemo masih kecamatan Wonosari yang terbesar. Sehingga dikatakan Kecamatan Wonosari sebagai wilayah lumbung pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Sehingga Kecamatan Wonosari yang sebagian besar ditempati warga transmigrasi sangat mempengaruhi ketersediaan pangan bagi warga masyarakat di Kabupaten Boalemo. Sehingga itu bila kecamatan Wonosari keluar dari wilayah kabupaten Boalemo akan dapat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Boalemo. Penempatan warga transmigrasi tidak hanya di kecamatan Wonosari tetapi juga ada di kecamatan paguyaman seperti di desa

Bongo 4, desa Bongo dan desa Bualo yang sama-sama membangun program ketahanan pangan. Rerword pemda terhadap transmigrasi ditangani oleh dinas transmigrasi dibiayai dari APBN. Saat ini kondisi desa yang ada di Kecamatan Wonosari tentang ketersediaan listrik sudah sampai masuk kedesa SP3. Listriknya sudah sampai kepunghujung desa itu artinya warga transmigrasi dan warga etnis lokal telah dibantu dengan kehadiran listrik dalam menunjang program ketahanan pangan diwilayahnya. Menurut bapak sekdis Warga transmigrasi sangat tangguh dalam mengolah lahan pertanian, mengembangkan peternakan sehingga sebagian warga etnis lokal sudah mulai menjiblak cara kerja warga trasmigrasi. Dan disampaikan pula oleh Pak sekdis bahwa pelaku ekonomi terbesar di Kecamatan Wonosari adalah 99% adalah warga transmigrasi sehubungan dengan penguasaan perdagangan. Tetapi bila dibandingak dengan tujuh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo berdasarkan perputaran uang menurut BRI lebih banyak di BRI kecamatan Wonosari dibandingkan dengan kecamatan Tilamuta. Perputaran uang disebabkan oleh usaha pertokoan dan usaha yang dikembangkan oleh warga transmigrasi, sehingga kecamatan Wonosari hampir sama dengan ibukota Kabupaten Boalemo. Inilah gambaran tentang kontribusi warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari semoga warga masyarakat yang ada diwilayah Kabupaten Boalemo untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan warga transmigrasi dalam mensukseskan program pangan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sesuai dengan motto dinas pangan :"***Dulolo Mopomulo***" sebagai wujud dalam menjalankan program ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warga masyarakat di wilayah Kabupaten Boalemo dan sebagai sasaran akhir dari program ketahanan pangan adalah mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan nasional ( wawancara, tanggal 22 Juni 2021)".

Berdasarkan jawaban responden dalam penelitian ini menunjukkan betapa besarnya kontribusi yang diberikan oleh warga transmigrasi terhadap program ketahanan pangan bagi pemerintah kecamatan Wonosari dan memberikan manfaat bagi ketersediaan pangan bagi warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Ketika ditanyakan kepada responden bagaimana bila kecamatan Wonosari menjadi bagian wilayah Kabupaten Gorontalo, beliau menjawab kami akan pertahankan wilayah kecamatan Wonosari menjadi tetap bagian dari

wilayah Kabupaten Boalemo, karena dua wilayah antara kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman sebagai wilayah basis lumbung pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Boalemo akan tetap mempertahankan dua kecamatan itu sebagai bagian dari wilayah Pemerintah Kabupaten Boalemo. Apa lagi di Kecamatan Paguyaman tetangga dari kecamatan Wonosari memiliki pabrik Gula Tolanguhula yang mensuplai kebutuhan gula secara nasional, akan menjadi lahan bagi warga masyarakat di dua kecamatan dalam membudidayakan pertanian dalam penanaman jenis tanaman tebu oleh warga transmigrasi. Kehadiran Pabrik Gula di Kecamatan Paguyaman telah merubah kehidupan warga transmigrasi yang bekerja disektor pertanian. Hampir sebagian besar warga transmigrasi di dua wilayah tersebut menggantungkan hidupnya sebagai penggarap dan sebagai penobang tebu. Dilapangan kami melihat pekerja penobang tebu lebih banyak dilakukan oleh warga transmigrasi, ketimbang etnis lokal. Ini berarti pendapatan rumah tangga bagi warga transmigrasi pun bertambah makmur dengang etos kerja yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sebagai penobang tebu di kawasan lahan perkebunan pabrik gula Tolanguhula. Dengan kondisi pabrik Gula di wilayah Kecamatan Paguyaman dan bertetangga dengan kecamatan Wonosari dengan penduduk terbanyak warga transmigrasi telah merubah dua kawasan sebagai daerah lumbung pangan bagi pemerintah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dengan demikian sangat beralasan pemerintah Kabupaten Boalemo mempertahankan dua kecamatan sebagai lumbung pangan bagi pemerintah Kabupaten Boalemo.

Argumentasi informan penelitian sekertaris Dinas pangan Pemerintah Kabupaten Boalemo tersebut menunjukkan betapa besarnya kontribusi warga transmigrasi kepada program ketahanan pangan di wilayah Pemerintah kabupaten Boalemo dari berbagai sektor diantaranya sektor pertanian, perkebunan,peternakan, industri rumahan dan perdagangan. Dengan

kesadaran akan pentingnya warga transmigrasi bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah pemerintahan kabupaten Boalemo, pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih besar dalam membuka akses jalan dan jembatan dalam memudahkan transportasi untuk melakukan evakuasi hasil-hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan sampai ke akses pemasaran. Sehingga keberhasilan panen warga transmigrasi dan etnis lokal dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi warga masyarakat kabupaten Boalemo dan sekitarnya. Inilah intervensi pemerintah daerah dalam mendukung program pangan di wilayah kecamatan Wonosari dan kecamatan Paguyaman sebagai wilayah lumbung pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Jawaban responden tersebut di atas sesuai dengan apa yang ada pada data yang diberikan oleh pihak pemerintah kecamatan melalui *website* profil kecamatan Wonosari pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 30.Luas Panen Padi dan Palawija.**

<b>No.</b>	<b>Komoditi <i>Commodity</i></b>	<b>Luas Panen <i>Harvested Area</i> (ha)</b>
1.	Padi/ <i>Paddy</i>	6.201
2.	Jagung/ <i>Maize</i>	14.359
3.	Ubi Kayu/ <i>Cassava</i>	8
4.	Ubi jalar/ <i>Sweet Pototo</i>	3
5.	Kedelai/ <i>Saybean</i>	1
6.	Kacang Hijau/ <i>Mungbeans</i>	7
7.	Kacang Tanah/ <i>Peanut</i>	16

**Sumber /Source : Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo tahun 2021.**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kecamatan Wonosari untuk komoditas pangan telah mengembangkan lahan pertanian untuk tujuh tanaman seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang hijau dan kacang tanah

dalam memperkuat ketahanan pangan bagi warga masyarakatnya dan memberikan kontribusi bagi warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Data di atas belum memberikan jawaban berapa ton perpanen atau pertahun bagi setiap komoditi pertanian yang dilakukan oleh warga transmigrasi. Dan data di atas belum merepresentasikan tentang kebutuhan pangan bagi warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari. Untuk menelusuri tentang ketersediaan pangan bagi warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari, harus memiliki data yang pasti tentang produksi per ton dan pertahun. Sehingga jawaban ketersediaan pangan dapat terjawab sudah.

Demikian halnya dengan kontribusi warga transmigrasi belum dapat terjawab dari data di atas. Untuk mengetahui berapa kontribusi warga transmigrasi bagi ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari, baru akan terjawab bila hasil riset dapat mengungkap perkapita warga transmigrasi dalam mengelola lahan pertanian. Untuk itu diperlukan data pendukung lain yang ada di dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.

Untuk menelusuri program ketahanan pangan dapat juga kita melihat hasil holtikultura yang dilakukan warga transmigrasi bersama warga etnis lokal, diantaranya dapat dilihat melalui produksi tanaman sayur yang ada pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 31. Produksi Tanaman Sayur di Kecamatan Wonosari**

<b>No.</b>	<b>Komoditi Comudity</b>	<b>Produksi Production</b>
1.	Bawang Merah/ <i>Shallot</i>	482
2.	Sawi/ <i>Lettuce</i>	454
3.	Kacang Panjang/ <i>Long beans</i>	298
4.	Cabai/ <i>Chili</i>	138
5.	Cabai Rawit/ <i>Chili Pepper</i>	3.082
6.	Tomat/ <i>Tomato</i>	460
7.	Terung/ <i>Eggplant</i>	246
8.	Buncis/ <i>Bean</i>	49
9.	Ketimun/ <i>Cucumber</i>	410
10.	Kangkung/ <i>Water Spinach</i>	254
11.	Bayam/ <i>Spinach</i>	200

**Sumber/Source : Dinas Pertanian kabupaten Boalemo tahun 2021**

Berdasarkan tabel di atas warga masyarakat kecamatan Wonosari telah berupaya melaksanakan program pangan melalui tanaman sayur mayur bagi kebutuhan masyarakat yang ada di kabupaten Boalemo. Potensi sayur mayur untuk hasil pertanian di kecamatan Wonosari bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan akan pangan bagi warga kecamatan Wonosari, tetapi dapat juga memenuhi kebutuhan dari warga masyarakat di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dengan melihat data di atas pemerintah kecamatan Wonosari akan menjadi daerah tujuan pengembangan pangan yang akan menjadikan kabupaten Boalemo sebagai penyedia pangan bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Seperti daerah kabupaten Gorontalo lain dan kota Gorontalo. Bila ini dikembangkan oleh pemerintah daerah akan berakibat kepada kesejahteraan warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari, khususnya bagi petani yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari.

Etos kerja warga transmigrasi dalam pengembangan program pangan perlu diapresiasi oleh warga lokal dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Sebagai wujud nyata keuletan warga transmigrasi dalam membangun daerah kabupaten Boalemo dapat dilihat dari kontribusi terbesar terhadap

penyediaan pangan bagi pemerintah Kabupaten Boalemo. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan warga transmigrasi meningkatkan produksi buah sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 32. Produksi Tanaman Buah di Kecamatan Wonosari.**

<b>No.</b>	<b>Komoditi Comudity</b>	<b>Produksi Production (kuintal)</b>
1.	Alpukat/ <i>Avocado</i>	-
2.	Duku/ <i>langsat</i>	-
3.	Durian/ <i>Durian</i>	398,00
4.	Jambu Biji/ <i>Guava</i>	-
5.	Jambu air/ <i>Water apple</i>	-
6.	Jeruk siam	295,24
7.	Jeruk besar	-
8.	Mangga/ <i>Manggo</i>	9,60
9.	Manggis/ <i>Mangosteen</i>	-
10.	Melon/ <i>Melon</i>	14,10
11.	Nangka/ <i>Jackfruit</i>	540,25
12.	Nanas/ <i>Pineapple</i>	451,43
13.	Pepaya/ <i>Papaya</i>	685,50
14.	Pisang/ <i>Banana</i>	9.647,56
15.	Rambutan/ <i>Hairfruit</i>	311,78
16.	Salak/ <i>Snakefruit</i>	-
17.	Sawo/ <i>Sapodilla</i>	0,99
18.	Belimbing/ <i>Starfruit</i>	-
19.	Semangka/ <i>Watermelon</i>	14,50

**Sumber/Source :Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo *Agriculture and plantation Departement Of Boalemo Regency* tahun 2021.**

Berdasarkan tabel di atas program pengembangan ketahanan pangan bagi pemerintah kecamatan Wonosari telah melaksanakan penanaman buah guna memenuhi kebutuhan dasar akan nutrisi warga masyarakat di Kabupaten Boalemo dengan penanaman tanaman buah. Hasil dari apa yang dilakukan oleh warga transmigrasi biasa ditemui dipasar-pasar tradisional yang anda bisa temukan di wilayah Kabupaten Boalemo dengan daya beli masyarakat yang dapat dijangkau. Roda perputaran ekonomi di kecamatan Wonosari sangat terbantuan dengan kehadiran warga transmigrasi dan warga lokal melakukan penanaman tanaman buah. Biasanya kebutuhan dasar nutrisi seperti ini masuk kewilayah Gorontalo berasal dari daerah tetangga seperti Kotamobagu dll. Tetapi dengan budidaya tanaman buah di Kecamatan Wonosari telah dapat

dipenuhi dipasar-pasar tradisional di wilayah Gorontalo. Perputaran usaha tanaman buah mengangkat tarap hidup bagi masyarakat petani di Kecamatan Wonosari.

Berdasarkan hasil observasi dan data hasil wawancara menunjukkan betapa besarnya kontribusi warga transmigrasi dalam berpartisipasi terhadap program ketahanan pangan di wilayah kecamatan Wonosari dan memberikan kontribusi bagi ketersediaan pangan bagi warga masyarakat di daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dalam menelusuri terhadap kontribusi ketahanan pangan bagi warga transmigrasi, kami juga mewawancarai salah satu aparat kecamatan Wonosari bapak Neng Akerta yang memiliki jabatan strategis mempertanyakan hal yang sama tentang eksistensi warga transmigrasi terhadap kontribusinya pada program ketahanan pangan jawaban responden sebagai berikut :

“Gambaran secara umum warga transmigrasi memasuki wilayah kecamatan Wonosari pada awal tahun 1979 ditempatkan di desa Harapan sebagai transmigrasi angkatan pertama, kemudian ditempatkan di desa Bongo 2 terdiri tiga dusun yaitu dusun Raharja, dusun Tri Rukun, Dusun Makmur yang saat ini dusun tersebut telah berubah statusnya menjadi desa. Selanjutnya ditempatkan di desa Bongo 3 yang terdiri dari dusun Suka Mulyo, dusun Dumito sekarang status dusun tersebut juga telah menjadi desa mandiri dan penempatan selanjutnya di desa persiapan SP1 dan SP2. Sebagian besar mata pencaharian warga transmigrasi sebagai petani. Di awal masuk warga transmigrasi hanya menanam hortikultura seperti kedelai, setelah itu, berkembang dengan persawahan diawali dengan sawah tadah hujan. Dan saat tahun 2000 didirikan Bendungan raksasa di Kecamatan Wonosari, membuat warga transmigrasi untuk mengolah pertanian sudah semakin baik, sehingga produksi pangan mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Dalam pengelolaan pertanian komoditas pertanian yang dikembangkan adalah jenis komoditas jagung, setelah jagung mengalami produksi peningkatan untuk setiap tahunnya, warga transmigrasi juga mengolah sawah dengan mengembangkan tanaman padi yang saat ini produksi beras pun mengalami peningkatan produksinya. Ketika dikonfirmasi tentang penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Wonosari memberikan

tanggapan bahwa Sebagian besar warga yang ada di Kecamatan Wonosari ditempati oleh warga transmigrasi dan selebihnya berasal dari transmigrasi lokal, seperti desa Suka Maju penduduk etnis Gorontalo dari daerah-daerah lain. Mereka berasal dari Transmigrasi mandiri artinya warga etnis lokal dari daerah lain datang sendiri ke kecamatan Wonosari. Sebagai lanjutan penempatan transmigrasi pemerintah pusat saat ini ditempatkan di desa SP3 sebagai persiapan desa mandiri. Bila melihat dari kondisi areal pertanian desa yang terluas lahan pertanian adalah desa Harapan, desa Suka Maju dan desa Jati Mulyo, tetapi sebagian lahan sawahnya masih ada tanah tadah hujan, untuk pengairannya masih dibantu dengan pompa melalui sumur suntik. Dengan adanya etos kerja yang tinggi dari warga transmigrasi membuat kecamatan Wonosari, untuk Ketersediaan pangan sudah sangat mencukupi dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya terhadap pangan. Dapat dikatakan program ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada pangan untuk kecamatan Wonosari telah meraih status tersebut sebagai wilayah kecamatan dari tujuh kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Boalemo yang mampu meraih prestasi sebagai kecamatan berstatus Swasembada Pangan. Dengan adanya status tersebut untuk kabupaten Boalemo tidak lagi melakukan kebijakan infor dalam memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat yang ada di kabupaten Boalemo. Tetapi bila mengalami gagal panen kadang-kadang pengusaha dari luar Kecamatan Wonosari masuk ke wilayah kabupaten Boalemo. Namun masalah gagal panen tersebut tidak mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo, karena stok pangan masih sangat tersedia dalam memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat yang ada di Kabupaten Boalemo. Semua ini terjadi karena dua wilayah di daerah Kabupaten Boalemo yaitu kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman sebagai wilayah produksi pangan yang dapat menanggulangi masalah gagal panen tersebut. Dan ini sangat membantu warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan dalam mempertahankan hidupnya. Pada intinya khusus untuk kecamatan Wonosari sangat mencukupi dalam kebutuhan pangan seperti beras, jagung, hortikultura buah-buahan dan sayur mayur stoknya sangat tersedia. Dengan kondisi tersebut kecamatan Wonosari dapat dikatakan sebagai wilayah lumbung pangan yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Untuk hasil pertanian seperti Kecamatan Wonosari berada pada peringkat pertama, peringkat keduanya adalah Kecamatan Paguyaman, tetapi Kecamatan Paguyaman didominasi oleh warga transmigrasi lokal atau penduduk lokal, dimana hanya ada satu atau dua desa yang ditempati oleh warga transmigrasi. Ketika dikonfirmasi keadaan bagaimana dengan status

desa yang ada di wilayah kecamatan Wonosari, tanggapan informan menyampaikan masih desa berkembang bila dilihat dari bidang lain seperti pendidikan. Tetapi pada bidang pertanian desa-desa di Kecamatan Wonosari berhasil meraih status Swasembada Pangan. Mengapa saya katakan status desa masih berkembang, karena ada sebagian warga masyarakatnya belum memprioritaskan pendidikan. Mereka warga transmigrasi lebih memprioritaskan pada usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan usaha rumahan, berdagang yang dapat mensejahterakan kehidupan warga masyarakat transmigrasi, ketimbang pendidikan. Namun bila dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat memadai karena di beberapa desa di Kecamatan Wonosari untuk tingkatan sekolah dasar ada fasilitasnya, SLTP dan sekolah Madrasah Ibtidaiyah, SLTA dan Madrasah Aliyah ada di pusat kecamatan yang tersebar di beberapa desa yang dekat dengan ibu kota kecamatan. Begitu juga dari segi kemampuan ekonomi, warga transmigrasi sangat mapan ekonominya. Tetapi yang masih bermasalah adalah, kemauan sebagian kecil warga transmigrasi dalam menyekolahkan anaknya, sampai ke jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Untuk bidang Kesehatan sudah cukup dilihat dari kehadiran dua Puskesmas dalam melayani 16 desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari. Apalagi di beberapa desa ditunjang oleh Pustu (Puskesmas Pembantu) dalam menangani kesehatan masyarakat yang jauh dari jangkauan Puskesmas, tenaga minimal kesehatannya terdiri dari satu orang perawat dan satu orang bidan. Tinggal yang bermasalah adalah tenaga dokter yang dianggap masih kurang. Demikian juga dengan permasalahan *stunting*. Di Kecamatan Wonosari *Stunting* tinggal ada satu dua orang balita saja. Di bidang perdagangan memang di dominasi oleh warga transmigrasi, tetapi etnis lokal pun bersama dalam membuka usaha, tetapi usaha dengan skala besar memang dikuasai oleh warga transmigrasi. Tetapi bila melihat identifikasi mana warga transmigrasi dan warga lokal, menurutnya sudah tidak dapat dibedakan, karena telah terjadi proses pembauran, dimana ada orang Jawa, Bali tau berbahasa Gorontalo, begitu pula sebaliknya, etnis lokal dapat berbahasa Jawa dan bahasa etnis Bali. Untuk permasalahan listrik tidak lagi menjadi masalah, karena hampir semua desa telah ada aliran listrik, terkecuali untuk desa SP3 sebagai desa persiapan yang baru ditempatkan warga transmigrasi. Tetapi yang bermasalah PDAM. Dimana baru sebagian desa dimasuki oleh sambungan pipa PDAM. Untuk menanggulangi masalah air bersih tersebut, warga masyarakatnya menggunakan sumur suntik. Selanjutnya untuk kontribusi pajak dan retribusi desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari, memberikan kontribusi sekitar 200 jutaan pertahun. Peringkat kedua dalam besaran PBB di wilayah Kabupaten Boalemo di posisi pertama adalah kecamatan Paguyaman.

Ketika dikonfirmasi etnis mana yang lebih besar memberikan kontribusi kepada PBB dari 16 desa. Dikatakan 50 persen etnis lokal dan 50 persen warga transmigrasi, karena mayoritas penduduk yang ada di wilayah kecamatan Wonosari adalah etnis lokal. Tetapi dengan adanya warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari dapat menumbuhkan motivasi etnis lokal Gorontalo untuk membangun program ketahanan pangan secara bersama. Ketika dikonfirmasi apakah ada konflik diantara warga transmigrasi dan etnis lokal, dikatakan alhamdulillah hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik di wilayah Kecamatan Wonosari. Usaha yang dilakukan pemerintah Kecamatan Wonosari dalam menjaga kerukunan hubungan harmonis antara warga transmigrasi dengan etnis lokal adalah dengan cara mengakrabkan melalui komunikasi yang baik kepada etnis lokal dengan warga transmigrasi, menanamkan saling pengertian diantara warga transmigrasi dan warga etnis lokal di wilayahnya. Dikatakan juga bahwa data ini masih bersifat gambaran umum saja, untuk menelusuri lebih lanjut dipersilahkan untuk bertanya kepada informan lain atau instansi yang terkait dengan riset. Dengan keramahan pelayanan dari bapak Neng Akerta menghadirkan staf khusus untuk bidang perpajakan ketika ditanyakan tentang data-data kewajiban pajak bagi setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari, dikatakan data mentah dari informasi tertulis dari PBB mereka dapatkan dari BPKAD yang diteruskan kekecamatan. Untuk PBB khusus untuk Kecamatan Wonosari, berada pada posisi di atas 200 jutaan, pada tahun 2021 sekitar dua ratus delapan belas juta. Tetapi pada dua tahun kemarin kewajiban PBB yang disetor ke pemerintah daerah Kabupaten Boalemo mengalami penurunan 50% (wawancara tanggal 22 Juni 2021).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas menunjukkan keberadaan warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat ke wilayah Kabupaten Boalemo dengan kehidupan awal mereka mengembangkan usaha pertanian dan hingga saat ini warga transmigrasi berhasil membawa wilayah Kecamatan Wonosari sebagai wilayah yang meraih prestasi dalam Swasembada Pangan. Dengan demikian betapa besar kontribusi yang diberikan warga transmigrasi kepada pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam mensukseskan program ketahanan pangan di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk menelusuri kehidupan warga transmigrasi, kami pun memasuki desa Mekar Jaya dan bertanya tentang kondisi warga transmigrasi di desa

tetangganya desa Harapan yang mayoritas warga transmigrasi. Karena desa Mekar Jaya penduduknya adalah etnis lokal Gorontalo atau berasal dari transmigrasi lokal, kami menemui di kantor desa Mekar Jaya kepada beberapa aparat desa mempertanyakan tentang bagaimana kondisi warga transmigrasi masuk ke wilayah Kecamatan Wonosari dan apa kontribusi terbesar yang dihasilkan dari warga transmigrasi. Tanggapan atas pertanyaan tersebut disampaikan salah seorang staf ibu lina adalah sebagai berikut :

“Warga etnis lokal mendukung apa yang telah dilakukan oleh Warga transmigrasi dalam mengelola berbagai sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo, bahkan kami sebagai warga lokal pun secara bersama melakukan program pertanian dan sering terjadi komunikasi bagaimana mengolah pertanian yang benar. Kami tidak merasa keberatan dengan warga transmigrasi justru banyak hal kami bisa lakukan bergaul bersama warga transmigrasi. Hubungan kami selama ini tidak pernah menimbulkan konflik, justru warga lokal mendukung segala aktivitas warga transmigrasi dalam melakukan usaha diberbagai sektor, khususnya sektor pertanian, sektor peternakan, perkebunan dan pengembangan usaha. Ketika ditanyakan status desa Mekar Jaya justru Mekar Jaya desanya masih berstatus Desa Swadaya (wawancara 30 Juni 2021).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas menunjukkan adanya keakraban antara warga transmigrasi dengan warga etnis lokal dalam melaksanakan program pembangunan ketahanan pangan secara bersama, tidak terjadi gesekan diantara kedua etnis dalam membangun ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari. Namun bila dibandingkan dengan desa Mekar Jaya dan desa Harapan yang ditempati warga transmigrasi terjadi disparitas terhadap status desa, dimana untuk desa Harapan berstatus desa Swasembada atau desa Maju, sementara desa Mekar Jaya berstatus desa Swadaya atau desa berkembang. Dengan disparitas ini menunjukkan akselerasi desa yang ditempati oleh warga transmigrasi, lebih cepat tingkatannya menuju desa Swasembada, ketimbang desa Mekar Jaya yang ditempati warga etnis lokal. Tetapi yang perlu diapresiasi terhadap dua desa yang bertetangga di Kecamatan Wonosari adalah hubungan antara desa Mekar Jaya dan Desa

Harapan sangat akrab dalam melakukan program ketahanan pangan untuk desanya. Disinilah poin tertinggi bagi pembangunan negara multikulturalisme yang terjadi pada warga masyarakat warga transmigrasi dan warga etnis lokal di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk menindaklanjuti pertanyaan penelitian, kami pun melakukan wawancara dengan salah satu dari warga desa Mekar Jaya bertanya kondisi awal warga transmigrasi memasuki wilayah Kecamatan Wonosari dan kondisi saat ini, tanggapan informan tersebut menyatakan sebagai berikut :

"Warga transmigrasi pada saat masuk ke wilayah Kecamatan Wonosari hanya diberikan lahan 2 Ha dan dengan rumah tinggal dan pekarangan. Dengan bentuk rumah tinggal papan dengan ukuran 36M2. Saat ini kehidupan warga transmigrasi tidak lagi terlihat aslinya. Mereka sudah berubah kehidupannya. Karena saat ini mereka telah memiliki bangunan rumah permanen lebih luas dengan kondisi pada saat mereka awal datang di kecamatan Wonosari. Kehidupan mereka berubah, karena berhasil dalam mengolah lahan pertanian dilokasi penempatan warga transmigrasi disebagian besar desa yang ada di kecamatan Wonosari ( Wawancara tanggal 30 Juni, 2021)".

Dari hasil wawancara kami dari dua orang warga etnis lokal di desa Mekar Jaya yang mayoritas etnis lokal, menunjukkan adanya fakta sosial memang warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari telah berkontribusi besar dalam mewujudkan program ketahanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan warga masyarakat lokal sangat mendukung kehadiran warga transmigrasi di kecamatan Wonosari, karena telah membawa wilayah Kecamatan Wonosari sebagai kecamatan yang berhasil mewujudkan Swasembada pangan. Inilah salah satu wujud bahwa warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari sangat berarti bagi kelangsungan hidup mereka, bukan hanya warga masyarakat di Kecamatan Wonosari, tetapi apa yang dicapai warga transmigrasi dalam mewujudkan Swasembada Pangan telah menjadikan kecamatan Wonosari sebagai wilayah lumbung pangan di daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk menelusuri keberhasilan langsung warga transmigrasi peneliti menyambangi kantor desa Harapan dimana warga masyarakat yang ada di desa Harapan yang mayoritas penduduknya adalah warga transmigrasi. Ketika dikonfirmasi melalui sekretaris desa Harapan ibu Siti Muntamah warga transmigrasi memberikan jawaban yang sama terhadap kontribusi warga transmigrasi terhadap ketahanan pangan di desanya sebagai berikut :

“Jumlah warga transmigrasi terdiri dari jumlah KK Ada 1014 dan jumlah jiwanya 3250 warga transmigrasi banyak membuka lahan pertanian dan perkebunan saat ini kondisinya sudah sangat baik karena desa Harapan sudah dilalui oleh irigasi. Sehingga panen hasil pertanian dalam setahun bisa panen dua kali, untuk tahun ini 2021 kita tidak bisa menggarap karena irigasinya sementara diperbaiki oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Tetapi kebutuhan akan pangan bagi warga masyarakat di desa Harapan terpenuhi karena warga disini ada yang bertani sawah dan ada juga berladang (jagung), sayur mayur, buah-buahan, sehingga ketika mereka tidak dapat menanam karena saluran irigasi diperbaiki, masih ada stok pangan dalam menutupi selama perbaikan irigasi dilaksanakan. Bila melihat kondisi beberapa jenis petani di desa Harapan terdiri dari ada petani penggarap, ada petani pemilik tanah, ada petani sebagai buruh tani. Tetapi posisi Warga transmigrasi lebih banyak sebagai pemilik tanah. Di awal masuk warga transmigrasi memperoleh jatah 1 ha pertanian sawah,  $\frac{1}{4}$  ha perladangan dan 1 pantango untuk perumahan, sehingga total tanah yang dimiliki warga transmigrasi adalah 2 Ha. Tetapi dengan lahan yang diberikan kepada warga transmigrasi ditangan mereka tanah tersebut menjadi produktif. Di awal mereka menggarap lahan hanya menggunakan air hujan, ketika irigasi masuk melewati desa Harapan. Potensi pertanian sawah dan peladangan warga transmigrasi mengalami peningkatan produksi padi dan jagung dan tanaman hortikultura, sehingga membawa kepada kesejahteraan warga transmigrasi menjadi membaik. Demikian halnya kondisi perkembangan desa khusus untuk akses air bersih, listrik sudah terpenuhi, bahkan perbankan pun telah masuk di desa Harapan dengan hadirnya dua bank BRI dan BNI,serta Pertamina, didukung oleh kantor Polsek Kecamatan Wonosari yang ditempatkan di desa Harapan, sehingga status desa Harapan mengalami peningkatan menjadi satu desa Swasembada atau desa maju. Dilihat dari interaksi warga transmigrasi dengan etnis lokal sangat baik walaupun warga lokal hanya 5% ada di desa Harapan. Ketika dikonfirmasi. Bentuk intervensi dari desa Harapan untuk mendukung program ketahanan pangan bagi warganya dikatakan pemerintah desa Harapan selalu mencari jalan ketika ada

bantuan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang turun, kami selalu mengajukan proposal untuk petani, cara mendistribusikan dilakukan secara berkelompok, karena di desa Harapan sudah terbentuk kelompok tani. Untuk produksi hasil pangan perton pertahun desa Harapan tidak memiliki data tersebut. Data tersebut hanya ada pada Kantor PPL berada diwilayah dinas pertanian Boalemo. Demikian halnya dengan kondisi *Stunting* di desa Harapan menurutnya tahun 2018 ada, tetapi untuk tahun sekarang terindikasi ada, namun kriteria *stunting* masih membingungkan bagi mereka kriteria *stunting* itu apa, karena ada anak yang badanya gemuk, tetapi dia pendek, dia sehat dinamakan *stunting*. Ada juga anaknya baik-baik saja, anak ukurannya pas, anaknya pintar dinamakan *stunting*, tetapi upaya desa Harapan mengatasi *stunting* dengan cara memberikan bantuan makanan tambahan seperti susu setiap kali sebulan dan memberikan pengawasan lebih terhadap perkembangan Balita di Desa Harapan. Khusus untu pajak desa Harapan ditahun 2020 menyeter pajaknya sebesar 27 juta sekian, dan untuk ditahun 2021 setoran pajak jumlahnya Rp.28.390.301,00. Ketika dikonfirmasi masih adakah penanda awal masuknya warga transmigrasi dengan menempati rumah papan dengan ukuran 36 M2. Kondisi ini sudah tidak ada lagi. Seluruh bangunan warga transmigrasi di desa Harapan sudah menjadi permanen. dikatakan warga transmigrasi di awal masuk pada tahun 1979 tidak dapat ditemukan lagi, ini menunjukan tingkat kesejahteraan warga transmigrasi sudah sangat mapan ekonominya, lagi pula saat ini pelaku ekonomi terbesar di desa Harapan adalah warga transmigrasi dan warga lokal juga termasuk bergerak dibidang perdangan. Tetapi yang mondominasi pada pelaku ekonomi adalah warga transmigrasi. Mengapa ini terjadi karena penduduk lokal terlalu minim di desa Harapan hanya sekitar 5%. Ketika dikonfirmasi kembali seperti apa lahan yang ada di desa Harapan pada saat mereka masuk, menurutnya areal ini masih hutan, apakah pemerintah yang cetak, ternyata warga transmigrasilah yang membuka lahan sendiri. Mereka hanya diberikan rumah saja, kanan kiri nya hutan. Warga transmigrasilah yang menobang sendiri. Sehingga dapat dikatakan keberhasilan perubahan dalam membuka lahan di desa Harapan mulai dari nol mengelola pertanian dan membuka lahan pertanian. Dengan tanah dua hektar yang dibuka sendiri, akhirnya warga transmigrasi menuai keberhasilan setelah dibangun beberapa fasilitas penunjang oleh pemerintah daerah seperti irigasi, bantuan pupuk dan obat-obatan. Ketika dikonfirmasi apakah warga lokal termotivasi dengan etos kerja warga transmigrasi apakah ada gesekan. Justru yang terjadi kolaborasi antara warga transmigrasi dengan warga etnis lokal secara bersama membangun desa Harapan disektor pertanian dan perdagangan. Demikian juga dengan Perwakilan politik dari warga transmigrasi yang duduk di DPRD ada satu orang dari desa Harapan namanya Fakurohman anggota DPRD Boalemo (wawancara tanggal 30 Juni 2021)".

Berdasarkan jawaban informan di atas ada kesamaan dari jawaban informan sebelumnya yang mempertegas betapa besar kontribusi warga transmigrasi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Boalemo, sangat kita apresiasi etos kerja warga transmigrasi di awal masuk dengan kondisi saat ini membawa desa Harapan dan kecamatan Wonosari menjadi kecamatan dengan predikat lumbung pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Semangat dari warga transmigrasi yang berdampak kepada motivasi warga etnis lokal secara bersama dalam melaksanakan program pembangunan ketahanan Pangan, inilah yang perlu kita apresiasi. Sehingga warga masyarakat di kabupaten Boalemo merasa menyatu dengan warga transmigrasi dalam program pembangunan ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari.

Untuk menelusurinya kebenaran dari fakta dan data tersebut, kami pun melakukan wawancara dengan beberapa warga masyarakat lokal di bawah ini sebagai berikut :

“Warga Transmigrasi di desanya sangat berperan dalam melaksanakan program ketahanan pangan, dimana warga transmigrasi banyak mengelolah lahan pertanian dan melakukan penanaman hortikultura. Dengan adanya etos kerja yang tinggi desa harapan saat ini telah menjadi desa Swasembada atau status desa maju. Semuanya berkat etos kerja warga transmigrasi dan mempengaruhi etnis lokal bersama-sama mengembangkan usaha pertanian sehingga kehidupan desa harapan sangat maju sebelum adanya warga transmigrasi menempati desa tersebut (wawancara tanggal 22 Juni 2021)”.

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas warga masyarakat lokal mengakui peran sentral warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari pada kontribusi pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, sehingga warga lokal pun sangat mendukung apa yang dilakukan oleh warga transmigrasi. Bahkan warga lokal bersama warga transmigrasi dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Artinya warga lokal pun demi mempertahankan hidup dalam menunjang kebutuhan rumah tangganya

melakukan secara bersama dengan desa tetangga yang mayoritas warga transmigrasi atau mereka sebagai minoritas di desa penempatan warga transmigrasi sama-sama melaksanakan program ketahanan pangan. Diskusi antara etnis lokal dan warga transmigrasi yang berhubungan dengan masalah pertanian, peternakan, perkebunan, usaha perdagangan selalu terjadi diantara kedua etnis antara warga transmigrasi dan warga etnis lokal, membuat warga lokal pun termotivasi secara bersama dalam melaksanakan program ketahanan pangan, karena program ketahanan pangan dapat merubah kehidupan kesejahteraan bagi warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari. Interaksi positif inilah yang membawa wilayah kecamatan Wonosari menjadi wilayah lumbung pangan di Kabupaten Boalemo Perovinsi Gorontalo.

Untuk lebih meyakinkan kami sebagai peneliti terhadap objek riset tentang kontribusi warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari terhadap ketahanan Pangan di Kabupaten Boalemo, kami pun memasuki desa Jati Mulyo dengan menjambangi salah satu staf desa Jati Mulyo Ibu Isro Ana mengkonfirmasi tentang kondisi warga masyarakatnya yang mayoritas penduduknya warga transmigrasi. Ketika dikonfirmasi bagaimana kondisi warga masyarakatnya dalam melaksanakan program ketahanan pangan dan penilaian terhadap indeks ketahanan pangan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Penduduk dari Desa Jati Mulyo mayoritas warga transmigrasi, pekerjaan warga masyarakatnya berprofesi sebagai petani dengan mengembangkan usaha pertanian, peternakan, perkebunan. Luas areal yang dimiliki oleh warga transmigrasi setiap satu KK dengan luas areal lahan 2 Ha dan saat ini lahan yang dikelola sangat produktif, dimana warga transmigrasi dalam kegiatan panen setiap tahunnya dilaksanakan dua kali panen pada posisi normal. Bila terjadi kondisi musim kering panennya hanya sekali. Bila dilihat dari status desanya dapat dikatakan sebagai desa Maju atau desa Swasembada, tetapi untuk status resmi dari pihak kecamatan bagi desa Jati Mulyo belum diketahui apakah desa swakarya atau desa maju (desa Swasembedah). Bila dilihat dari jawabannya tentang indeks ketahanan pangan ketika ditanyakan tentang kondisi air bersih, memberikan jawaban sumber air bersih sudah ada, tetapi kualitas airnya ada yang

tidak jernih, seperti yang ada pada dusun 1 dan dusun 4 kualitas air PAM nya tidak jernih. Demikian dengan indikator listrik. Untuk listrik di desa Jati Mulyo sudah tersambung kerumah-rumah warga. Khusus untuk indikator ketahanan pangan tentang *stunting* kegiatan yang dilakukan oleh desa Jati Mulyo melakukan kegiatan Posyandu secara rutin dengan pihak Puskesmas Kecamatan Wonosari, dan biasanya ada satgas dari unsur desa dan staf Puskesmas mengunjungi rumah-rumah warga masyarakatnya melakukan pengobatan atau imunisasi atau sosialisasi kesehatan kepada warga masyarakat. Ketika dikonfirmasi tentang kondisi hubungan antara warga transmigrasi dengan warga etnis lokal Gorontalo, dikatakan hubungan masih rukun-rukun tidak pernah terjadi konflik antara warga transmigrasi dengan warga etnis lokal di desa Jati Mulyo. Ketika ditanyakan pula bagaimana kondisi warga transmigrasi saat ini, jawaban informan menyampaikan bahwa kondisi kesejahteraan warga transmigrasi saat ini sangat baik, dimana warga transmigrasi kehidupannya, sudah sangat mapan. Berdasarkan jawaban informan mengatakan pula bahwa warga transmigrasi sebagian besar hunian tempat tinggalnya sudah permanen tinggal sebagian kecil yang belum permanen. Menurut informan mereka yang tinggal dalam hunian belum permanen adalah para lansia, tetapi generasi berikutnya telah tinggal dihunian permanen. Para lansia generasi pertama tidak terlalu memprioritaskan fisik untuk tempat tinggal, tetapi hasil produksi pertanian dan pendapatan ekonomi yang menjadi prioritas pada saat itu. sehingga kebutuhan dasar mereka saat ini tercukupi. Untuk keterjangkaun terhadap kebutuhan dasar seperti daya beli masyarakatnya memenuhi bagi kebutuhan dasar warganya, karena warga transmigrasi untuk pendapatan setiap rumah tangganya diperoleh dari hasil olahan pertanian ketika dijual di pasar-pasar tradisional (wawancara, tanggal 30 Juni 2021)".

Demikian halnya jawaban dari warga desa Jati Mulyo dari warga etnis lokal, ketika ditemui memberikan tanggapan yang sama dengan jawaban informan di atas terhadap kontribusi warga transmigrasi bagi program ketahanan pangan sebagai berikut :

"Warga transmigrasi di desanya sangat berkontribusi dalam melaksanakan program ketahanan pangan, dimana warga transmigrasi dari lahan yang diberikan pemerintah awalnya lahan tidur, saat ini sudah menjadi lahan produktif bagi pengembangan pertanian dan perkebunan. Bahkan warga transmigrasi berkontribusi besar terhadap perekonomian di desa dan menambah PAD untuk pemerintah kabupaten Boalemo (wawancara tanggal 30 Juni 2021)".

Demikianlah penelusuran peneliti terhadap kontribusi dibidang pertanian warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

**b. Kontribusi pada bidang peternakan sebagai bagian dari program ketahanan pangan.**

Upaya pemerintah kecamatan Wonosari dalam melaksanakan program ketahanan pangan banyak terbantu oleh etos kerja dari warga transmigrasi yang ditempatkan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Wonosari. Aktivitas warga transmigrasi tidak hanya bergerak dalam sektor pertanian, namun warga transmigrasi juga melakukan upaya pengembangan peternakan dalam memperkuat ketahanan keluarganya. Dan hasil dari usaha mereka pun mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam memenuhi kebutuhan akan daging bagi warga masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Pengembangan peternakan sangat mudah dilakukan oleh warga transmigrasi, karena dengan membuka usaha pertanian pakan peternakan pun sangat besar bagi program peternakan yang dilakukan oleh warga masyarakat Transmigrasi bersama dengan warga etnis lokal.

Program peternakan pun ketika dikonfirmasi kepada pihak yang berkompeten terhadap program peternakan yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari menyampaikan jawaban atas pertanyaan terhadap kontribusi yang diberikan warga transmigrasi bagi program peternakan mengatakan sebagai berikut :

“Upaya warga transmigrasi dalam pengembangan peternakan sangat baik dilakukan oleh warganya, karena pakan bagi peternakan sangat mudah diperoleh untuk pengembangan peternakan. Karena banyak lahan warga transmigrasi yang ditanami jagung, padi sebagai bahan dasar pakan ternak. Sehingga usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan sapi, kambing, ternak ayam, ternak itik mudah dikembangkan di wilayah kecamatan Wonosari (wawancara tanggal 30 Juni 2021)”.

Berdasarkan jawaban responden di atas, menunjukkan betapa besar kontribusi warga transmigrasi terhadap ketahanan pangan di wilayah kecamatan Wonosari. Dan ini juga terlihat pada data yang ada dalam profil kecamatan Wonosari tentang usaha peternakan yang ada di wilayah kecamatan Wonosari sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 33. Populasi Ternak di Kecamatan Wonosari**

<b>No.</b>	<b>Jenis Ternak Type of Livestock</b>	<b>Populasi Production</b>
1.	Sapi Potong/ <i>Beef Cattle</i>	13.437
2.	Sapi Perah/ <i>Dairy Cow</i>	-
3.	Kambing / <i>Goat</i>	2.411
4.	Babi/ <i>Pig</i>	1.357
5.	Kuda/ <i>Horse</i>	22
6.	Kerbau/ <i>Water Buffalo</i>	-
7.	Ayam Buras/ <i>Chicken</i>	4.025
8.	Ayam Petelur/ <i>Laying Hens</i>	-
9.	Ayam Pedaging/ <i>Broiler</i>	26.254
10.	Itik/ <i>Duck</i>	3.795

**Sumber/Source** :Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo/*Agriculture and plantation Departement Of Boalemo Regency* tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan ada korelasi antara apa yang dikemukakan oleh informan penelitian dengan data populasi ternak di kecamatan Wonosari bahwa etos kerja warga transmigrasi dan dampak etos kerja warga transmigrasi telah mempengaruhi perilaku warga etnis lokal untuk ikut mengembangkan usaha peternakan di wilayah kecamatan Wonosari. Dengan adanya hasil dari upaya peternakan yang dilakukan oleh warga transmigrasi dan etnis lokal telah berkontribusi bagi program ketahanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, terutama terhadap stok daging bagi kebutuhan warga masyarakat di kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

**c. Kontribusi pada bidang perdagangan sebagai bagian dari program ketahanan pangan.**

Bila melihat kondisi warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari saat ini, sangat berbeda dengan kondisi pada saat mereka masuk di awal tahun 1979 ketika memasuki wilayah kecamatan Wonosari. Kemajuan desa-desa yang ditempati oleh warga transmigrasi menjadi status desa swasembada atau status desa maju. Hal ini terlihat dengan usaha perdagangan yang banyak dibuka warga transmigrasi, seperti toko bangunan, toko kebutuhan harian, toko kain, warung makan, dan usaha lainnya.

Untuk memperkuat apa yang dilakukan oleh warga transmigrasi terhadap kontribusinya pada sektor perdagangan dapat kita simak jawaban responden ibu sekretaris Desa Harapan ibu Siti Muntamah ketika ditemui di kantor desa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

“Pelaku usaha terbanyak di desa Harapan dan sekitarnya adalah warga transmigrasi dan juga warga etnis lokal Gorontalo. Warga transmigrasi di desanya banyak membuka tempat usaha perdagangan, sehingga pendapatan desa pun mengalami peningkatan melalui sektor pajak. Dimana pajak yang disetorkan kepada pemerintah daerah kisaran 27 juta, namun total pajak bagi semua desa lebih kurang 200 juta pertahun. Ini semua berkat usaha perdagangan yang dilakukan oleh warga transmigrasi dan berdampak kepada pengembangan usaha dari warga etnis lokal Gorontalo dalam membuka usaha perdagangan di wilayah Kecamatan Wonosari (wawancara 30 Juni 2021)”.

Berdasarkan jawaban responden di atas kontribusi warga transmigrasi disektor perdagangan pun sangat besar bagi pemerintah kecamatan Wonosari dan berdampak kepada PAD bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Dan yang menarik pelaku ekonomi terbesar di wilayah Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo adalah warga transmigrasi. Tetapi potensi konflik akibat kemajuan usaha warga transmigrasi tidak terjadi, justru warga etnis lokal mengikuti usaha yang dikembangkan oleh warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari.

Untuk menelusuri kontribusi warga transmigrasi dan usaha etnis lokal disektor perdagangan dapat kita lihat melalui data yang disajikan melalui profil kecamatan Wonosari pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 34. Jumlah Industri Mikro Menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa <i>Village</i>	Jenis Industri <i>Type of industry</i>		
		Makanan dan minuman <i>Food &amp; Beverages</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
1.	Mekar Jaya	1	1	2
2.	Harapan	32	10	37
3.	Suka Maju	2	2	14
4.	Makmur	40	-	44
5.	Sejahtera	4	5	17
6.	Pangeya	3	-	8
7.	Jati Mulya	3	6	15
8.	Tri Rukun	6	5	20
9.	Raharja	1	6	11
10.	Dimito	2	-	9
11.	Suka Mulya	5	-	7
12.	Sari Tani	15	-	21
13.	Tanjung Harapan	4	-	9
14.	Dulohupa	3	-	4
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari <i>Wonosari /Subdistrict</i></b>	<b>121</b>	<b>35</b>	<b>218</b>

Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas total jenis industri berjumlah 218 yang merupakan akumulasi dari semua usaha warga masyarakat di Kecamatan Wonosari sangat potensial dalam mendukung program ketahanan pangan, karena warga transmigrasi sebagian besar sebagai pelaku usaha dalam menambah sumber pendapatan daerah dan berimplikasi bagi kesejahteraan warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

**d.Kontribusi pada bidang industri rumahan (kerajinan) sebagai bagian dari program ketahanan pangan.**

Pengembangan program pangan tidak hanya dapat kita lihat melalui usaha warga transmigrasi melakukan pengelolaan pertanian, peternakan dan perkebunan, tetapi satu hal yang dapat menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat seberapa besar daya beli masyarakatnya akan kebutuhan pangan. Untuk itu yang menjadi ukurannya adalah pendapatan perkapita bagi warga masyarakatnya yang akan disuplai dari bentuk-bentuk keterampilan masyarakat mengembangkan industri rumahan. Sehingga parameter kesejahteraan akan terlihat dari pengembangan industri rumahan (kerajinan) yang ada pada warga masyarakatnya.

Untuk menelusuri apakah di wilayah Kecamatan Wonosari berkembang usaha disektor industri rumahan, dapat kita lihat melalui data pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel : 35.Jumlah Industri Mikro Menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa <i>Village</i>	Jenis Industri <i>Type of industry</i>		
		Bahan dari kulit <i>Leather Based Industry</i>	Bahan dari Kayu <i>Wood Based Industry</i>	Bahan dari logam <i>Metal Based Industry</i>
1.	Mekar Jaya	-	-	-
2.	Harapan	-	3	-
3.	Suka Maju	-	-	-
4.	Makmur	-	1	-
5.	Sejahtera	-	4	-
6.	Pangeya	-	2	-
7.	Jati Mulya	-	2	-
8.	Tri Rukun	-	2	-
9.	Raharja	-	1	-
10.	Dimito	-	3	-
11.	Suka Mulya	-	-	-
12.	Sari Tani	-	6	-
13.	Tanjung Harapan	-	3	-
14.	Dulohupa	-	-	1
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari <i>Wonosari /Subdistrict</i></b>	-	<b>26</b>	<b>2</b>

Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas jenis industri yang dikembangkan lebih besar terbuat dari bahan kayu berjumlah 26 yang tersebar di sepuluh desa dengan jumlah bervariasi. Kegiatan industri yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari sebagian besar dilakukan oleh warga transmigrasi dan juga beberapa pelaku ekonomi dari warga lokal. Dengan adanya pengembangan sektor industri mikro di wilayah Kecamatan Wonosari dapat membantu sektor penerimaan pada PAD di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Dengan adanya kontribusi warga transmigrasi dan beberapa etnis lokal akan dapat digunakan dalam memperbaiki beberapa infrastruktur yang akan dapat mendukung sektor program ketahanan pangan. Kita ketahui bersama bahwa PAD di kabupaten Boalemo akan dikembalikan lagi bagi warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari melalui program perbaikan jalan dan jembatan sebagai akses utama dalam memasarkan hasil-hasil pangan yang dikelola oleh warga masyarakat transmigrasi dan beberapa warga lokal Gorontalo.

Demikian juga dengan bahan industri lain yang dikembangkan oleh warga masyarakat yang di Kecamatan Wonosari yang berasal dari bahan anyaman, gerabah dan kerajinan kain seperti yang ada dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel :36.Lanjutan Jumlah Industri Mikro Menurut Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.**

No.	Desa ( <i>Vilage</i> )	Jenis Industri <i>Type of industry</i>		
		Anyaman <i>Plait</i>	Gerabah <i>Potery</i>	Kerajinan kain <i>Cloth</i>
1.	Mekar Jaya	-	-	-
2.	Harapan	-	-	2
3.	Suka Maju	3	2	5
4.	Makmur	-	-	3
5.	Sejahtera	2	1	1
6.	Pangeya	-	1	2
7.	Jati Mulya	-	-	4
8.	Tri Rukun	6	-	2
9.	Raharja	-	-	2
10.	Dimito	3	-	1
11.	Suka Mulya	-	-	2

12.	Sari Tani	-	-	-
13.	Tanjung Harapan	1	-	1
14.	Dulohupa	-	-	-
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari /Subdistrict</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>25</b>

Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari tahun 2021

Berdasarkan data observasi terhadap kontribusi warga transmigrasi kepada industri rumahan yang akan memperkuat ketersediaan pangan bagi warga masyarakat dapat dilihat melalui usaha pengembangan industri rumahan yang telah dilakukan oleh warga transmigrasi dan etnis lokal. Data di atas menjelaskan keberhasilan warga transmigrasi dalam merubah taraf hidup warga masyarakatnya melalui kerajinan sebagai industri rumahan yang akan memperkuat ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan akan pangan. Bahkan dengan adanya industri rumahan yang diambil dari bahan-bahan pertanian akan merubah kehidupan warga masyarakatnya menjadi sejahtera. Inilah yang dinamakan merubah perilaku warga masyarakat untuk dapat lebih kreatif dalam mempertahankan hidup. Artinya pola hidup warga masyarakat kreatif akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan ini sangat berpengaruh kepada kualitas hidup warga masyarakat. Dimana warga masyarakat transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari masuk pada kualifikasi kualitas hidup yang sangat tangguh dalam menjalani kehidupannya. Dan kebiasaan warga transmigrasi ini akan tertularkan kepada warga etnis lokal tentang kreativitas membuka industri rumahan.

**e.Kontribusi Pada pajak, Retribusi daerah dan pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai bagian dari program ketahanan pangan.**

Bila melihat kemajuan dari usaha yang dikembangkan oleh warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, sangat potensial dalam mensuplai pendapatan asli daerah yang

akan diperoleh melalui kewajiban warga transmigrasi terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Apa yang dikemukakan di atas ternyata memiliki kesamaan dengan apa yang ditanggapi oleh informan penelitian ketika di wawancarai di kantor camat kecamatan Wonosari bapak Neng Akerta ketika ditanyakan berapa kontribusi warga transmigrasi dan warga etnis lokal disetiap desa khususnya bagi PAD yang berasal dari sumber pendapatan desa. Tanggapannya terhadap pertanyaan tersebut sebagai berikut :

“Sumber pendapatan daerah Kabupaten Boalemo yang diperoleh dari dana pajak dan retribusi dari setiap desa lebih kurang 218 juta pertahun. Dengan angka yang sangat besar bagi kontribusi terhadap suplai PAD Pemerintah kabupaten Boalemo membuat program-program dalam mewujudkan ketahanan pangan pun dikecurkan pemerintah kabupaten Boalemo ke desa-desa dalam bentuk distribusi pupuk, obat hama dsb bahkan infrastruktur seperti jalan desa dan jembatan, irigasi pun diberikan pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Perhatian pemerintah daerah kabupaten Boalemo sangat besar bagi pemerintah kecamatan Wonosari dalam menunjang program ketahanan pangan bagi warga transmigrasi dan etnis lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Pemerintah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo (wawancara tanggal 22 Juni 2021)”.

Jawaban informan penelitian di atas menunjukkan kontribusi warga transmigrasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boalemo sangat besar, karena menurut data bahwa suplai pajak terbesar disemua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo, kecamatan Wonosari sebagai peringkat kedua setelah kecamatan Paguyaman dalam pembayaran pajak dan retribusi. Hal ini menunjukkan dua kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah warga transmigrasi memiliki andil besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Sehingga akan membuat kesadaran bagi warga masyarakat untuk membangun hubungan harmonis dengan warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari. Inilah pentingnya kita melakukan survey terhadap kontribusi warga transmigrasi terhadap ketahanan pangan bagi

pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dengan tujuan dan harapan semoga kontribusi warga transmigrasi terhadap ketahanan pangan yang termasuk dalam program pembangunan daerah tidak diabaikan oleh warga masyarakat, tetapi warga masyarakat lokal menghormati dan mau belajar akan keberhasilan yang ditorehkan oleh warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari. Riset ini telah membuktikan peran serta warga transmigrasi terhadap pembangunan daerah melalui program ketahanan pangan sangat berhasil di desa-desa yang ditempati oleh warga transmigrasi. Dan yang terpenting pada hasil riset ini menemukan bahwa warga etnis lokal, mampu hidup berdampingan dengan warga transmigrasi melalui berbagai interaksi diberbagai bidang usaha. Inilah yang menjadi harapan *The Founding Pathers* membangun negara *Nation State* negara kebangsaan. Dan cita-cita tersebut dapat diwujudkan di wilayah kabupaten Boalemo khususnya di wilayah Kecamatan Wonosari yang ditempati sebageaian besar warganya berasal dari warga transmigrasi.

#### **4.2.2. Indeks Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.**

Untuk mengetahui apakah kecamatan Wonosari telah masuk kepada kondisi ketahanan pangan dapat dilihat melalui indikator ketahanan pangan diantaranya sebagai berikut :

##### **a. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan air bersih. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan air bersih, padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.**

Bila dilihat dari data yang telah ada bahwa wilayah kecamatan Wonosari hampir disemua desa yang ada telah memiliki akses air bersih yang diperoleh melalui sumur suntik dan ada juga bersumber dari PDAM yang disalurkan kerumah-rumah warga. Demikian juga dengan kebutuhan beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar telah terpenuhi di wilayah kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Harapan ketika ditemui di kantor desa harapan menyampaikan terhadap ketersediaan air bersih mengemukakan warganya telah cukup tersedia akses air bersih melalui pengairan, ada sumbernya dari PAM dan ada juga dari sumber air tanah yang diperoleh melalui sumur suntik atau DAP.

**b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.**

Bila melihat dari hasil observasi kondisi warga transmigrasi dan warga etnis lokal tidak dalam kondisi pada garis kemiskinan, hampir rata-rata warga transmigrasi dan warga etnis lokal yang ada di wilayah kecamatan Wonosari telah memiliki kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga dapat ditunjukkan sebagian besar rumah warga transmigrasi telah permanen, begitu juga rumah tinggal warga etnis lokal. Semua ini terjadi akibat dari etos kerja warga masyarakat yang bergerak diberbagai sektor usaha, misalnya pengolahan pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor industri dan perdagangan menambah penghasilan rumah tangga dan berakibat pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari. Sehingga melihat atau menentukan warga masyarakat pada taraf kemiskinan di wilayah Kecamatan Wonosari dilihat dari kondisi fisik dan perolehan lahan pada pengolahan pertanian warga masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi bila ukuran kemiskinan itu dilihat dari pendapatan perkapita masih perlu penelitian lebih lanjut.

**c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.**

Warga transmigrasi dan warga etnis lokal pengeluaran untuk pangan tidak membebani warga masyarakatnya, karena kebutuhan akan pangan telah dipenuhi dengan mengelola pertanian, perkebunan, peternakan, industri rumahan dan sektor perdagangan yang dilakukan oleh warga masyarakatnya pengeluaran 65% tidak terserap semua, mengapa untuk kebutuhan pangan bagi warga transmigrasi dan warga etnis lokal terbantuan dengan usaha pertanian, peternakan, perkebunan, industri dan perdagangan telah membantu

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap ketersediaan pangan, bahkan pengeluaran 65% tidak terserap, karena semua telah mereka lakukan sendiri untuk memenuhi kebutuhan akan pangan. Sehingga prosentase pengeluaran untuk pangan tidak terpakai, tetapi digunakan untuk keperluan kebutuhan lainnya.

#### **d. Persentase Rumah Tangga tanpa akses listrik.**

Warga transmigrasi semua warganya telah menikmati listrik dan hampir tidak ditemukan desa yang belum menikmati listrik. Kalaupun ada mungkin ada pada desa-desa persiapan seperti desa SP1, SP2 dan SP3 yang status desa tersebut masih desa persiapan desa mandiri yang dijadikan sebagai daerah penempatan baru bagi warga transmigrasi. Disanalah akses listrik itu masih diupayakan pengadaannya oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Dengan kesadaran pemerintah daerah Kabupaten Boalemo terhadap tanggung jawabnya dalam mengupayakan kebutuhan dasar bagi warga masyarakatnya khususnya fasilitas listrik akan membuat wilayah Kabupaten Boalemo stabilitas keamanan dan kenyamanan warganya merasa terlindungi. Karena memang tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warga masyarakat yang membayar pajak untuk menerima fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakatnya. Sehingga ketika indikator ketahanan pangan memasukan pemasangan listrik disetiap desa dengan tujuan warga masyarakatnya akan terjadi produktivitas pendapatan warga masyarakat. Indeks ini juga akan mempengaruhi pada tingkat daya beli masyarakat akan mengalami peningkatan. Sehingga kualitas hidup masyarakatnya pun mengalami peningkatan.

Dengan kesadaran pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam menyempurnakan seluruh indeks ketahanan pangan di wilayahnya, akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga masyarakatnya. Sehingga itu perlu membangun dengan teori. Bila pembangunan suatu daerah tidak memiliki gaidens akan mengalami permasalahan kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan keoala daerah yang memiliki kualitas dalam

memimpin di daerah. Upaya penjaringan kepala daerah melalui metode demokrasi adalah pemilihan langsung kepala daerah. Dengan tujuan kepala daerah yang akan memimpin daerah akan dinilai oleh warga yang berkualitas di bidang pendidikan dan calon kepala daerah pun harus calon yang menguasai manajemen keilmuan dalam membangun daerah.

Permasalahan saat ini adalah kepala daerah dipilih oleh warga yang kualitas pendidikan rendah dan calon kepala daerah tingkat pendidikan rendah, akhirnya calon terpilih sebagai kepala daerahpun kualitas rendah. Bila ini terjadi maka kualitas warga masyarakatnya pun akan mengalami permasalahan. Dengan demikian tanggung jawab membangun daerah melalui program ketahanan pangan dibutuhkan seorang *leader* yang betul-betul memahami konsep membangun daerah dengan mewujudkan ketahanan pangan. Untuk kabupaten Boalemo karena calon kepala daerah berlatar belakang petani yang sukses di daerahnya dan terpilih sebagai kepala daerah, maka konsennya dibidang pangan pun terasa di wilayah kabupaten Boalemo sampai di Kecamatan Wonosari.

#### **e. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.**

Data untuk lamanya sekolah bagi perempuan belum memiliki data yang pasti, namun kondisi fasilitas pendidikan di Kecamatan Wonosari sudah cukup memadai dalam mendidik warga masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan di wilayah Kecamatan Wonosari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang penting pada pemerintah kecamatan Wonosari bapak Neng Akerta, ketika dikonfirmasi bagaimana kondisi pendidikan di wilayahnya memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut sebagai berikut :

“Untuk pendidikan di wilayah Kecamatan Wonosari sudah cukup dalam memberantas buta huruf, karena kecamatan Wonosari telah didukung oleh infrastruktur pendidikan, tetapi permasalahan pada masyarakat masih pada *mainset* terhadap pentingnya pendidikan. Mengapa itu terjadi karena warganya lebih banyak pada praktek dalam menghasilkan uang seperti mengelolah pertanian, mengembangkan peternakan, membuka usaha perkebunan,

membuka usaha industri rumahan dan perdagangan, sehingga tujuan hidup mereka telah terpenuhi, artinya mereka bekerja untuk mencari uang. Uang pun mereka sudah dapatkan melalui usaha yang selama ini mereka jalani. Sehingga pendidikan bagi sebagian kecil masyarakat warga transmigrasi dianggap tidak berguna lagi. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau tujuan untuk sekolah tinggi atau Perguruan Tinggi hanya untuk menghasilkan uang, sementara usaha yang mereka lakukan sudah menghasilkan uang yang banyak dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Dapat dikatakan masih ada sebagian warga transmigrasi dan penduduk lokal meragukan akan pentingnya pendidikan. Namun dengan adanya fasilitas pendidikan di wilayah kecamatan Wonosari perlahan akan merubah gaya hidup warga masyarakat warga transmigrasi terhadap pentingnya pendidikan bagi warga masyarakat. Kualitas pendidikan akan juga mempengaruhi kualitas generasi suatu bangsa (wawancara tanggal 22 Juni 2021)".

Bila dihubungkan dengan indikator terhadap ketahanan pangan tentang rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun akan dapat teratasi, mengapa demikian, karena peserta didik yang ada dikelas 8 s/d kelas 9 jenis kelamin perempuan banyak menikmati pendidikan tersebut, sehingga harapannya kaum perempuan kita harus mengetahui tentang membaca, menulis dan berhitung dalam artian kaum perempuan mengalami keterbelakangan dalam pendidikan, sementara posisi perempuan yang akan menjadi cikal bakal sebagai ibu dari generasi berikutnya telah memiliki wawasan dalam memperbaiki generasinya. Sehingga bila dilihat dari kehadiran infrastruktur pendidikan di Wilayah Kecamatan Wonosari dinilai cukup memadai dalam membangun generasi yang cerdas dimasa depan. Karena wanita adalah tiang negara artinya bila perempuan lemah pada pendidikan akan mempengaruhi kualitas generasi dimasa yang akan datang. Sementara harapan pemerintah generasi masa kini dan masa yang akan datang menjadi generasi emas. Ini dapat tercapai bila generasi yang melahirkan, merawat dan membesarkan mereka lahir dari seorang ibu yang telah mampu mengenal dunia pendidikan, minimal mampu berhitung, membaca, menulis agar supaya perwujudan pemerintah melahirkan generasi emas dapat diwujudkan. Bila

perempuan di Indonesia memiliki kompetensi yang sama dengan kaum laki-laki, negara kita dianggap mampu melaksanakan salah satu syarat dari pelaksanaan negara demokrasi seperti program gender, dan issue gender pun digunakan dalam indikator indeks ketahanan pangan pada suatu negara.

Untuk penilaian indeks ketahanan pangan sesuai dengan indeks Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Akan dapat diatasi di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, karena kondisi kecamatan Wonosari khusus dibidang pendidikan fasilitas pendukungnya, sangat memadai dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari. Semua ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam mewujudkan ketahanan Pangan diseluruh wilayah kecamatan termasuk kecamatan Wonosari.

#### **f. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.**

Bila melihat kondisi warga transmigrasi dan warga etnis lokal rumah tangga tanpa akses air bersih jarang ditemukan, karena semua desa yang ada sistem pengairan air bersih bisa diperoleh melalui saluran pengairan PDAM dan melalui sumur suntik atau DAP. Namun kondisi berdasarkan hasil observasi pun kami lanjutkan melalui hasil wawancara dengan salah satu staf kantor desa Jati Mulyo Ibu Isro Ana mempertanyakan tentang kondisi akses air bersih di desanya, tanggapan atas pertanyaan tersebut sebagai berikut :

“Akses air bersih di desanya sudah ada dari perusahaan air minum atau PDAM daerah, tetapi kondisinya ada air yang belum begitu jernih, sementara harapannya air yang dapat dikonsumsi harus dari sumber air yang jernih. Hal ini hanya terjadi di beberapa dusun kami yaitu di dusun 1 dan di dusun 4, tetapi untuk menanggulangnya banyak rakyat dengan kemampuan sendiri melakukannya dengan menggunakan sumur suntik atau DAP. Jadi untuk kebutuhan air bersih warga dengan mudah memperoleh terhadap akses air bersih di desanya. Tetapi untuk desa-desa masih pada tahap persiapan seperti desa SP1, SP2 dan SP3 akan diupayakan pengadaan air bersih melalui saluran PDAM tersambung ke desa tersebut (wawancara tanggal 30 Juni 2021)”.

Berdasarkan keterangan salah satu informan dari staf desa di wilayah Kecamatan Wonosari, secara keseluruhan desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari telah tercukupi kebutuhan air bersihnya, namun ada juga masalah terhadap kualitas air yang dihasilkan. Tetapi bagi desa SP1, SP2 dan SP3 pemerintah daerah berupaya untuk mengadakan sambungan PDAM di desa-desa yang masih belum tersambung PDAM. Dengan jawaban tersebut pemerintah desa melalui pemerintah kecamatan mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab pemerintahan dalam menyediakan akses air bersih kepada desa-desa yang belum memiliki saluran PDAM, untuk mengantisipasinya dilakukan dengan penggunaan sumur suntik, tetapi sumur suntik harus berbaringan dengan aliran listrik masuk di desa tersebut. Sehingga kendala pengadaan air bersih akan menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untuk pengadaannya.

**g. Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.**

Untuk tenaga kesehatan bagi warga transmigrasi masih sangat dibutuhkan, karena antara rasio jumlah penduduk dengan tenaga kesehatan masih perlu diadakan bagi tenaga medis, sekalipun tenaga kesehatan telah ada di wilayah Kecamatan Wonosari yang tersebar dibeberapa desa. Permasalahan di Kecamatan Wonosari adalah tenaga dokter yang dianggap belum memadai dengan rasio jumlah penduduk yang saat ini tenaga dokter hanya berjumlah tujuh orang, sementara jumlah penduduk 26.422 jiwa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 37. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Wonosari.**

No.	Desa Village	Dokter Doctor	Perawat Nurse	Bidan Midwife
1.	Mekar Jaya	-	-	1
2.	Harapan	-	-	4
3.	Suka Maju	-	3	3
4.	Makmur	3	3	1
5.	Sejahtera	-	-	4
6.	Pangeya	-	-	2
7.	Jati Mulya	1	1	1
8.	Tri Rukun	-	6	2
9.	Raharja	-	1	1
10.	Dimito	-	-	1
11.	Suka Mulya	-	-	1
12.	Sari Tani	3	9	10
13.	Tanjung Harapan	-	-	1
14.	Dulohupa	-	-	1
15.	SP 1	-	-	-
16.	SP 2	-	-	-
	<b>Kecamatan Wonosari Wonosari Subdistrict</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

Sumber /Source : Kantor Desa se kecamatan Wonosari/All Village office in Wonosari Subdistrict 2021.

Dengan jumlah tenaga medis dengan rasio jumlah penduduk sebesar 26.422 jiwa dan tenaga dokter tujuh orang dianggap kurang memadai dalam menanggulangi kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Wonosari, namun mengantisipasi tenaga medis diwilayah Kecamatan Wonosari akan dapat ditunjang di wilayah kecamatan tetangga seperti kecamatan Paguyaman yang memiliki tenaga dokter. Dan bila sangat membutuhkan pasien dirujuk kerumah sakit terdekat masih diwilayah Kabupaten Boalemo. Seperti Rumah Sakit di wilayah Kecamatan Tilamuta dan rumah Sakit yang ada di Kecamatan Boliyohuto yang jaraknya kurang lebih 15 s/d 20 Km yang ditempuh dalam waktu 45 menit atau satu jam perjalanan menggunakan mobil angkutan atau mobil ambulance dari pusat kecamatan Wonosari.

#### **h. Persentase balita tinggi badan di bawah standar (*stunting*).**

Kondisi *stunting* bagi balita di wilayah Kecamatan Wonosari masih ada, tetapi terkadang karena gen dari orang tuanya. Namun kondisi *stunting* karena kekurangan gizi disebabkan oleh karena tidak tersedia pangan tidak

ditemukan di wilayah kecamatan Wonosari. Untuk menelusuri kondisi *stunting* di Kecamatan Wonosari kami peneliti menemui dua desa dan kecamatan dalam mendapatkan informasi *stunting* tersebut, jawaban dari informan sebagaimana yang dikemukakan oleh sekretaris Desa Harapan ibu Siti Muntamah memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Kondisi *Stunting* di desa Harapan menurutnya tahun 2018 ada, tetapi untuk tahun sekarang terindikasi ada, namun kriteria *stunting* masih membingungkan bagi mereka kriteria *stunting* itu apa, karena ada anak yang badanya gemuk, tetapi dia pendek, dia sehat dinamakan *stunting*. Ada juga anaknya baik-baik saja, anak ukurannya pas, anaknya pintar dinamakan *stunting*, tetapi upaya desa Harapan mengatasi *stunting* dengan cara memberikan bantuan makanan tambahan seperti susu setiap kali sebulan dan memberikan pengawasan lebih terhadap perkembangan Balita di Desa Harapan (wawancara tanggal 30 Juni 2021)”.

Berdasarkan pernyataan informan di atas, miskonsepsi *stunting* masih membingungkan staf desa, sehingga diperlukan sosialisai dari tenaga Puskesmas menjelaskan seperti apa kondisi *stunting* yang sebenarnya, tetapi usaha dari pemerintah desa dalam menanggulangi *stunting* telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagaimana yang disampaikan oleh informan seperti memberikan bantuan makanan tambahan seperti susu setiap kali sebulan dan memberikan pengawasan lebih terhadap perkembangan Balita di Desa Harapan. Dengan adanya intervensi dari pemerintah daerah melalui pemerintahan kecamatan sampai ketingkat desa permasalahan *stunting* untuk wilayah Kecamatan Wonosari telah menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mewujudkan generasi emas melalui program ketahanan pangan yang salah satu indeks dalam mengukur kualitas ketahanan pangan adalah permasalahan *stunting* yang saat ini menjadi konsen pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Dengan sistem komando dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan program *stunting* tersebut, sehingga pemerintahan kecamatan Wonosari sampai ketingkat desa melaksanakan upaya mengatasi *stunting* bagi balita bersama-sama dengan pihak tenaga

kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di bantu oleh PUSTU (Puskesmas pembantu). Sinergitas mengatasi *stunting* inilah yang terjadi di wilayah Kecamatan Wonosari saat ini. Dengan demikian indeks ketahanan pangan di atas telah dilaksanakan pemerintah kecamatan Wonosari yang menjadi syarat dalam mengukur ketahanan pangan, sehingga sempurnalah variabel dari ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari. Dari hasil penelusuran peneliti mengenai *stunting* di wilayah kecamatan Wonosari telah terjawab sudah dengan prestasi yang sangat tangguh dalam mewujudkan ketahanan pangan di Wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

**i. Angka harapan hidup saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.**

Untuk data ini belum tersedia, tetapi data tersebut akan ditelusuri pada Puskesmas yang ada di wilayah kecamatan Wonosari. Tetapi bila dilihat dari kondisi perekonomian warga transmigrasi dan fasilitas kesehatan yang ada, sangat baik dalam menaikkan angka harapan hidup saat lahir. Apalagi pemerintah daerah sangat konsen dengan permasalahan *stunting* sehingga akan berpengaruh terhadap angka harapan hidup saat lahir. Memang ini juga menjadi prioritas bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, sehingga langkah strategis dalam mengatasi tingkat mortalitas bayi diadakan PUSTU di setiap desa, selain fasilitas Puskesmas yang ada di pusat Kecamatan Wonosari. Program-Program yang dilakukan desa dan Puskesmas adalah melalui Posyandu di setiap desa yang rutin dilaksanakan ada juga satgas dari desa dan tenaga Puskesmas mengunjungi rumah warga dalam merawat masyarakat khususnya balita. Aktivitas ini yang saat ini terjadi di Wilayah Kecamatan Wonosari dalam menanggulangi tingkat mortalitas pada angka harapan hidup saat lahir.

#### **4.2.3.Hambatan warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.**

Bila dilihat hasil obeservasi hambatan warga transmigrasi dalam melakukan program ketahanan pangan terbilang tidak ditemukan karena berdasarkan data hasil wawancara dengan para informan tidak menjelaskan bahwa warga transmigrasi memiliki hambatan dalam melaksanakan program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari. Justru dukungan warga masyarakat etnis lokal dan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten Boalemo memberikan perhatian yang sangat besar bagi warga transmigrasi terhadap usaha warga transmigrasi dibidang pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan dan disektor industri dan perdagangan. Semua usaha yang dikembangkan oleh warga transmigrasi malah justru mendapat bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan penelitian tentang hambatan warga transmigrasi dalam pengembangan program ketahanan pangan bagi warga transmigrasi tidak menemukan permasalahan. Ini menunjukkan bahwa semua usaha dari warga transmigrasi sangat didukung oleh warga masyarakat dan disuport oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo seperti dengan adanya dukungan pembangunan irigasi saat ini telah dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian wilayah Kecamatan Wonosari akan semakin berkembang pesat dalam mempertahankan prestasi sebagai kecamatan basis lumbung pangan bagi pemerintah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dengan adanya temuan yang sangat tangguh tentang dukungan warga masyarakat lokal dan pemerintah daerah kabupaten Boalemo terhadap ketahanan pangan bagi warga transmigrasi di kecamatan Wonosari akan membuat wilayah kabupaten Boalemo sebagai daerah dengan status kemandirian pangan dan status ini akan membawa dampak kepada

kesejahteraan bagi warga masyarakat di wilayah Kabupaten Boalemo. Karena pemerintah daerah tidak akan menempuh kebijakan infor terhadap bahan pangan yang akan mengancam pendapatan warga transmigrasi dan warga etnis lokal Gorontalo. Semua kebutuhan dasar telah tercukupi dan tersedia di wilayah kabupaten Boalemo. Kondisi kemandirian pangan inilah cita-cita semua daerah pada program pengembangan ketahanan pangan. Bahkan kalau perlu wilayah kabupaten Boalemo menuju daerah yang akan berhasil mendapatkan prestasi terhadap wilayah swasembada pangan sebagaimana prestasi yang pernah diraih pemerintah Orde Baru, sebagai negara yang mampu berprestasi dalam Swasembada Pangan.

Prestasi inilah yang akan menjadi sasaran terkahir dari program ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Semoga dengan adanya warga transmigrasi berada di wilayah Kabupaten Boalemo, akan mempercepat terhadap cita-cita mewujudkan prestasi daerah di Indonesia yang menjadi status berhasil dalam program ketahanan pangan dengan prestasi daerah Swasembadah pangan.

Bila melihat kondisi saat ini di wilayah Kecamatan Wonosari yang sangat giat warganya khususnya warga transmigrasi melakukan program ketahanan pangan, dengan kegiatan bertani, beternak, membuka usaha kerajinan dan berdagang, akan dapat mewujudkan cita-cita sebagai daerah Swasembadah Pangan di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Ketika kami menghubungi orang penting dipemerintahan kecamatan Wonosari bapak Neng Akerta dan mempertanyakan apakah Prestasi Swasembada Pangan dapat diwujudkan oleh warga masyarakat transmigrasi yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi dalam mewujudkan program ketahanan pangan, memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut adalah :

"Pemerintah Kecamatan Wonosari mendapatkan prestasi Swasembada Pangan, sehingga posisi kecamatan Wonosari yang ada di Kabupaten

Boalemo memiliki andil terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Boalemo dan berada pada peringkat pertama setelah kecamatan Paguyaman dalam capaian keberhasilan prestasi program ketahanan pangan. Sehingga predikat Swasembada Pangan telah diraih oleh pemerintah Kecamatan Wonosari. Bahkan telah kedua kalinya prestasi itu disandang sebagai kecamatan yang mampu mewujudkan Swasembada Pangan. Dampak dari predikat tersebut pada warga masyarakatnya adalah taraf hidup masyarakatnya mengalami peningkatan kesejahteraan. Kontribusi keberhasilan dalam mewujudkan Swasembada Pangan ini dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat di Kabupaten Boalemo melalui pemasaran hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan di pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo. Mengapa karena ketersediaan pangan dapat tercukupi dan masyarakat dapat menjangkau untuk membelinya karena harga-harga tidak terlalu memberatkan penghasilan masyarakat. Bila dibandingkan ketika pemerintah daerah melakukan kebijakan infor pangan atau para pelaku ekonomi mengambil hasil pangan dari daerah lain, sudah tentunya harga kurang dijangkau masyarakat. Kebijakan infor atau pedagang mengambil dari daerah lain tersebut akan dapat mempengaruhi pendapatan warga masyarakat petani, dan masyarakat tidak dapat menjangkau harga yang dibeli dari daerah lain. Sehingga itu keberhasilan warga transmigrasi dan warga lokal dalam meraih Swasembada Pangan dapat dipertahankan oleh pemerintah kecamatan Wonosari sebagai penyedia pangan di Kabupaten Boalemo dengan cara mensupport segala aktivitas yang dilakukan oleh warga transmigrasi dan etnis lokal dalam melaksanakan program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari (wawancara tanggal 22 Juni 2021)".

Jawaban informan penelitian di atas menunjukkan etos kerja warga transmigrasi dan etnis lokal berasal dari transmigrasi lokal mampu mewujudkan prestasi Swasembada Pangan sebagai wujud dari adanya program ketahanan pangan yang digalakan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo dan disuport oleh pemerintah kecamatan Wonosari. Prestasi ini harus menjadi penyemangat bagi warga masyarakat lokal dan sekitarnya, betapa pentingnya kehadiran warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari terhadap kontribusinya dalam ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

#### **4.2.4. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Wonosari terhadap warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.**

Program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari tidak bisa hanya diserahkan kepada warga masyarakatnya saja, tetapi harus ada dukungan dari pemerintah kecamatan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketika diwawancarai salah satu dari aparat penting di kantor camat bapak Neng Akerta memberikan tanggapan tentang apa yang dilakukan pemerintah kecamatan terhadap Program Ketahanan Pangan bagi warga transmigrasi yang ada di wilayahnya sebagai berikut :

“Pemerintah Kecamatan Wonosari memfasilitasi semua desa yang ada di wilayahnya, khususnya dalam menyalurkan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten Boalemo dengan tidak berlaku diskriminasi kepada semua warga masyarakatnya. Dan kami selalu berkoordinasi dengan kepala desa tentang program-program desa khususnya dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Bentuk perhatian kami seperti penyaluran pupuk dan obat-obatan hama dan juga mendampingi pemerintah daerah dalam menyalurkan sumbangan peralatan pengolahan pertanian seperti traktor, bahkan benih padi pun mereka terlibat untuk semua desa. Pendampingan pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program ketahanan pangan kepada semua desa yang ada di wilayah kecamatan Wonosari sangat diperlukan dalam mensukseskan program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari (wawancara tanggal 22 Juni 2021)”.

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas telah menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah kecamatan terhadap warga transmigrasi di wilayahnya dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Dengan tujuan pemerintah kecamatan Wonosari ikut serta dalam mensukseskan Boalemo **Mopumulo** sebagai **motto** dari dinas pangan pemerintah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Jawaban hasil riset di atas menunjukkan betapa urgennya warga transmigrasi bagi pelaksanaan Program ketahanan Pangan. Jawaban hasil riset telah membuktikan kepada warga masyarakat yang ada di kabupaten Boalemo

bahwa kontribusi warga transmigrasi terhadap ketahanan pangan terbukti dilokasi penelitian. Dengan adanya hasil riset ini akan lebih merukunkan antara hubungan etnis lokal Gorontalo dan warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari. Karena dengan prestasi yang sangat besar terhadap kontribusi warga transmigrasi pada program ketahanan pangan, menunjukkan betapa berartinya kehadiran warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari, dan berdampak kepada ketersediaan pangan bagi warga masyarakat sekabupaten Boalemo. Inilah hasil prestasi warga transmigrasi terhadap kontribusi pada program ketahanan pangan yang sangat besar, bagi daerah kabupaten Boalemo yang akan lebih mempererat talisilaturahmi antara warga transmigrasi dengan warga etnis lokal Gorontalo yang ada di kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

#### **4.3. Pembahasan**

Ketahanan pangan merupakan program dalam mencapai ketersediaan pangan bagi suatu negara, karena pangan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara di dunia. Bila kondisi ketersediaan pangan tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara akan mengakibatkan bencana nasional dan bahkan menjadi bencana kemanusiaan. Sebagaimana yang terjadi di beberapa belahan negara yang ada di daratan benua Afrika. Seperti negara Rwanda, negara Ethiopia. Kelangkaan akan ketersediaan makanan mengakibatkan kelaparan bagi warga negaranya, sehingga peran PBB melalui badan dunia FAO (*Food And Agriculture Organization Of The United Nations*) menyalurkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda kelaparan. Apa yang terjadi dibelahan benua Afrika adalah kelangkaan makanan dikarenakan karena kondisi geografis dan manajemen tata kelola pangan yang sedikit mengalami keterbelakangan, apalagi negara tersebut sering dilanda konflik antara suku atau faksi-faksi, sehingga menambah penderitaan rakyatnya yang sementara dilanda kelaparan.

Berdasarkan asumsi permasalahan yang ada di beberapa negara belahan Benua Afrika tersebut negara kita berkewajiban mengulurkan tangan untuk membantu negara-negara di daratan Benua Afrika dalam memenuhi pangan, karena masalah kelaparan yang terjadi di belahan dunia manapun, negara kita berkewajiban membantu negara yang mengalami krisis pangan tersebut. Apalagi bila terjadi kelaparan besar-besaran. Sikap solidaritas internasional harus diwujudkan dalam membantu warga dunia ketika dilanda kelaparan di berbagai belahan dunia manapun. Semoga iktikad yang baik negara kita dalam membantu meringankan beban negara-negara yang dilanda kelaparan, akan membuahkan hasil dalam mewujudkan Swasembada Pangan, demi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara kita dan mengulurkan bantuan bagi negara yang mengalami kelaparan akibat dari kelangkaan pangan di negaranya.

Di Era Orde Baru negara kita pernah mengalami Swasembada Pangan, sehingga banyak melakukan ekspor ke negara-negara lain dan juga melakukan misi kemanusiaan dengan membantu negara di belahan dunia yang mengalami kelaparan. Dan sejarah itu sangat diimpikan terulang kembali pada era reformasi saat ini. Untuk itu diperlukan strategi dalam membangun negara dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui program pembangunan ketahanan pangan di semua wilayah di Indonesia.

Bila negara kita ingin mewujudkan kembali ketercapaian di era Orde Baru terhadap Swasembada pangan, maka diperlukan pemahaman secara kolektif terhadap ketahanan pangan oleh semua komponen yang berhubungan dengan ketercapaian ketahanan pangan, seperti pemerintah daerah dan petani sebagai pelaku utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Untuk itu marilah kita memahami pengertian ketahanan pangan dan indikator ketahanan pangan di bawah ini.

Pengertian ketahanan pangan adalah : merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang terjamin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Sementara indikator ketahanan pangan dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :

- a. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih, padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
- b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.
- d. Persentase Rumah Tangga tanpa akses listrik.
- e. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun.
- f. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
- g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
- h. Persentase balita tinggi badan di bawah standar (*stunting*).
- i. Angka harapan hidup saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian ketahanan pangan dan indikator ketahanan pangan maka untuk menjawab apa yang menjadi objek penelitian Kontribusi Warga Transmigrasi di kecamatan Wonosari terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari beberapa jawaban informan penelitian yang dikembangkan melalui indikator ketahanan pangan, serta indikator kontribusi pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan dan kontribusi pada pajak dan retribusi daerah.

Keterkaitan dengan beberapa teori tentang ketahanan pangan tidaklah lengkap bila tidak menggunakan parameter dalam menentukan status perkembangan desa. Sehingga dengan adanya parameter status desa akan juga mendukung program ketahanan pangan di suatu wilayah. Pesannya adalah dalam menentukan status desa harus memiliki indikator disetiap tahapan desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada.

Untuk menentukan status desa peneliti menggunakan parameter yang ada di dalam referensi untuk mengimbangi penetapan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Boalamo, sehingga ada kesesuaian dengan fakta-fakta yang dihadirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo seperti di bawah ini sebagai berikut :

Penetapan Desa swadaya adalah : desa yang dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Di desa ini masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Ciri desa ini adalah :

- Daerahnya terisolir atau tertutup
- Penduduknya sedikit
- Mata pencahariannya homogen yang bersifat agraris
- Masyarakatnya memegang teguh adat atau tradisi
- Hubungan personal sangat erat
- Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang
- Teknologi yang ada masih rendah atau bahkan belum ada.

Indikator inilah yang akan menentukan terhadap status desa ketika posisi desa masih pada posisi desa Swadaya. Bila desa masih pada posisi seperti ini, maka kewajiban pemerintah daerah dapat menaikkan ratingnya menjadi desa Swakarya. Semua ini harus ada intervensi dari pemerintah daerah.

Untuk penetapan menjadi desa swakarya dapat kita pahami dulu makna dari desa swakarya. Dimana untuk status desa Swakarya posisinya satu tingkat lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya, yang dapat dilihat melalui ciri-ciri masyarakatnya mulai berubah mengikuti aliran jaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa.

Ciri-ciri desa Swakarya antara lain :

- Tidak terikat dengan adat secara penuh
- Terbuka dengan pengaruh dari luar daerah
- Adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan prasarana penunjang lainnya
- Teknologi sudah mulai digunakan masyarakat
- Akses menuju daerah lebih mudah
- Lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam.

Berdasarkan indikator di atas peneliti dapat menentukan tingkat perkembangan desa yang ada disuatu wilayah, sebagai sebuah prestasi bagi pemerintah daerah, bila status desa swakarya dapat dinaikan kepada tingkat lebih tinggi menjadi desa Swasembada. Untuk menentukan desa Swakarya menjadi status desa Swasembada dapat dilihat melalui indikator sebagaimana yang dikemukakan di bawah ini.

Desa Swasembada biasa disebut sebagai desa maju dimana masyarakat yang ada pada posisi desa ini, sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju, dibandingkan

tingkatan desa lain dan sudah bisa mengembangkan ide yang dimiliki. Mau berpartisipasi dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern.

Ciri-ciri desa Swasembada antara lain sebagai berikut :

- Biasanya berlokasi tidak jauh dari kota atau kecamatan
- Penduduknya mulai padat
- Masyarakat sudah terikat oleh adat
- Memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju
- Masyarakat yang lebih kreatif dan kritis
- Aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (<https://www.berdesa.com>).

Berdasarkan teori di atas, kita dapat menilai tentang kondisi ketahanan wilayah di suatu wilayah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan akan terwujud, bila kondisi desa akan lebih meningkat dari status desa awal, dari desa Swadaya, menuju desa Swakarya sampai pada tujuan pembangunan desa yakni desa Swasembada. Bila ini dapat diwujudkan maka ketahanan pangan pun akan meningkat. Mengapa demikian karena petani sebagai pelaku utama akan diuntungkan usaha pertanian bila status desanya mengalami peningkatan dari desa swadaya, menjadi desa swakarya dan naik menjadi desa swasembada. Dapat dikatakan program ketahanan pangan yang dilaksanakan di daerah apalagi di desa selalu bersamaan kemajuan dengan status desa. Ini semua akan mempengaruhi program ketahanan pangan yang dilakukan oleh para petani di desa. Petani akan dimudahkan dalam melakukan pemasaran hasil-hasil produksi pertaniannya ketimbang desanya masih ada pada status desa swadaya. Dengan demikian apa yang terjadi dengan peralihan status desa akan berdampak pula pada stabilitas wilayah akan mendapatkan indeks sangat tangguh dalam penilaian status ketahanan wilayah di suatu daerah.

Dengan demikian program perkembangan ketahanan pangan disuatu wilayah berbarengan dengan penetapan status desa. Sementara tahapan-tahapan perkembangan status desa tersebut harus ada intervensi pemerintah daerah dalam mewujudkan peralihan status tersebut. Berdasarkan beberapa parameter teori di atas dapat kita amati apa yang terjadi dilokasi penelitian sebagaimana yang menjadi fokus dalam melihat sejauh mana kontribusi Warga Transmigrasi di Kecamatan Wonosari terhadap ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo di bawah ini sebagai berikut :

#### **4.3.1. Kontribusi Warga Transmigrasi di Kecamatan Wonosari Terhadap ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.**

Bila dilihat dari indikator kontribusi warga transmigrasi terhadap ketahanan pangan, maka jawaban hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa warga transmigrasi telah memberikan sumbangan terbesar bagi pemerintah kecamatan Wonosari dan pemerintah daerah terhadap ketahanan pangan. Dimana warga transmigrasi telah membuka lahan pertanian dan mengolah menjadi lahan yang produktif bagi pengembangan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar bahkan dibidang hortikultura seperti sayur mayur dan buah-buahan telah diproduksi di Kecamatan Wonosari. Bahkan usaha peternakan, industri rumahan, usaha perdagangan pun sangat besar di Kecamatan Wonosari sebagai hasil dari etos kerja warga transmigrasi. Apa yang dilakukan warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari telah mempengaruhi gaya hidup warga etnis lokal dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Seperti membangun usaha pertanian, peternakan, perdagangan secara bersama, tanpa ada gesekan antara etnis lokal dengan warga transmigrasi.

Bila dilihat dari kondisi geografis wilayah kecamatan Wonosari terdiri dari 16 desa, yang saat ini menjadi lumbung pangan terbesar dari tujuh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo. Peringkat keduanya adalah kecamatan Paguyaman yang terdiri dari sekitar 20 desa dengan tiga desanya

menjadi lokasi penempatan warga transmigrasi seperti desa Bongo, Desa Bongo 4, desa Bongo 2 dan desa Bualo. Untuk kecamatan Wonosari yang mayoritasnya warga transmigrasi telah memberikan kontribusi yang besar kepada ketahanan pangan bagi warga masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Boalemo. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian diantaranya bapak Rosman Mantu sekretaris Dinas Pangan Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

“Menurut beliau warga transmigrasi mulai dari desa Bongo 1, Bongo 2 , desa Bongo 3 sampai dengan SP1 dan SP2, persiapan desa SP3 kehadiran warga transmigrasi pelan-pelan telah merubah pola-pola kehidupan warga lokal, dari segi cara bercocok tanam dan beternak yang merupakan bagian dari program pangan yang diprogramkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Jenis pangan yang banyak ditanam oleh warga transmigrasi seperti padi, jagung, ubi-ubian bahkan tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sehingga untuk mengenal atau mengidentifikasi mana warga transmigrasi dan mana warga etnis lokal ketika memasuki kecamatan Wonosari sangat mudah diidentifikasi melalui pekarangan rumah warga. Dimana untuk mengetahui rumah warga transmigrasi dapat diketahui melalui jenis tanaman yang banyak ditanam pekarangan warga transmigrasi, sedangkan warga etnis lokal areal pekarangan rumahnya biasa hanya ditanami pisang. Dan bila kita memasuki desa Tri Rukun yang ditempati oleh tiga etnis, yaitu etnis Bali, Minahasa dan etnis Gorontalo disana akan terlihat juga perbedaan pada pekarangan rumah warga transmigrasi dan warga lokal, namun yang kita apresiasi hubungan harmonis diantara etnis lokal dengan warga transmigrasi sangat terjalin. Bila kita melihat dari segi ketahanan pangan memang warga transmigrasi sangat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ketahanan pangan (Padi, Jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan). Ketika ditanya apakah warga masyarakat dapat menjangkau harga pangan jawabannya dapat dijangkau oleh masyarakat. Intervensi dari dinas pangan adalah program Kebijakan P2L (Pekarangan Pangan lestari dulunya ada KRBL pekarangan keluarga) karena adanya pandemik maka anggaran mengalami refocusing dan realokasi anggaran sehingga bantuan untuk program tersebut hanya dilakukan melalui DAK. Program P2L sering disampaikan oleh bapak bupati dengan program Barito S (bawang, Rica, Tomat dan sayuran) untuk ditanam dipekarangan rumah warga dengan tujuan pemerintah daerah kabupaten Boalemo ingin mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Kabupaten Boalemo. Bila dibandingkan tentang kontribusi terbesar terhadap pangan maka dapat dilihat melalui luasan lahan dari 7

kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo. Dimana kecamatan Wonosari terbesar luasan sawah dan luasan hortikultura dibandingkan dengan kecamatan Paguyaman, tetapi untuk luasan jagung masih wilayah kecamatan paguyaman yang besar. Tetapi untuk prestasi kontribusi pangan bagi warga masyarakat Kabupaten Boalemo masih kecamatan Wonosari yang terbesar. Sehingga dikatakan Kecamatan Wonosari sebagai wilayah lumbung pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Sehingga Kecamatan Wonosari yang sebagian besar ditempati warga transmigrasi sangat mempengaruhi ketersediaan pangan bagi warga masyarakat di Kabupaten Boalemo. Sehingga itu bila kecamatan Wonosari keluar dari wilayah kabupaten Boalemo akan dapat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Boalemo. Penempatan warga transmigrasi tidak hanya di kecamatan Wonosari tetapi juga ada di kecamatan paguyaman seperti di desa Bongo 4, desa Bongo dan desa Bualo yang sama-sama membangun program ketahanan pangan. Rerword pemda terhadap transmigrasi ditangani oleh dinas transmigrasi dibiayai dari APBN. Saat ini kondisi desa yang ada di Kecamatan Wonosari tentang ketersediaan listrik sudah sampai masuk kedesa SP3. Listriknnya sudah sampai kepenghujung desa itu artinya warga transmigrasi dan warga etnis lokal telah dibantu dengan kehadiran listrik dalam menunjang program ketahanan pangan diwilayahnya. Menurut bapak sekdis Warga transmigrasi sangat tangguh dalam mengolah lahan pertanian, mengembangkan peternakan sehingga sebagian warga etnis lokal sudah mulai menjiblak cara kerja warga trasmigrasi. Dan disampaikan pula oleh Pak sekdis bahwa pelaku ekonomi terbesar di Kecamatan Wonosari adalah 99% adalah warga transmigrasi sehubungan dengan penguasaan perdagangan. Tetapi bila dibandingkan dengan tujuh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo berdasarkan perputaran uang menurut BRI lebih banyak di BRI kecamatan Wonosari dibandingkan dengan kecamatan Talamuta. Perputaran uang disebabkan oleh usaha pertokoan dan usaha yang dikembangkan oleh warga transmigrasi, sehingga kecamatan Wonosari hampir sama dengan ibukota Kabupaten Boalemo. Inilah gambaran tentang kontribusi warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari semoga warga masyarakat yang ada diwilayah Kabupaten Boalemo untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan warga transmigrasi dalam mensukseskan program pangan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sesuai dengan motto dinas pangan : "**Dulolo Mopomulo**" sebagai wujud dalam menjalankan program ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warga masyarakat di wilayah Kabupaten Boalemo dan sebagai sasaran akhir dari program ketahanan pangan adalah mewujudkan swasembada pangan

sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan nasional (wawancara, tanggal 22 Juni 2021)".

Pernyataan di atas telah membuktikan betapa urgennya warga transmigrasi terhadap kontribusinya pada program ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo, sehingga pemerintah daerah sangat mengapresiasi prestasi dari warga transmigrasi dan dukungan warga masyarakat lokal pun sangat baik terhadap warga transmigrasi yang telah puluhan tahun hidup bersama dalam membangun wilayah Kecamatan Wonosari. Dengan kesadaran warga etnis lokal akan pentingnya kehadiran warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari telah mempererat hubungan silaturahmi antara etnis lokal Gorontalo bersama warga transmigrasi. Inilah kondisi warga transmigrasi dan warga etnis lokal yang secara bersama mensukseskan program pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam melaksanakan program pembangunan ketahanan pangan.

#### **4.3.2. Indeks Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.**

Prestasi program ketahanan pangan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan penafsiran seseorang atau aparat pemerintah daerah, tanpa didukung oleh nilai indeks ketahanan pangan. Sehingga dalam menentukan suatu wilayah telah berhasil ketercapain program ketahanan pangan dapat menggunakan indikator yang dapat mengukur status desa atau wilayah dalam meraih prestasi ketahanan pangan tersebut.

Untuk mengukur indeks ketahanan pangan dapat kita menggunakan beberapa indikator dalam mengetahui posisi ketahanan pangan disuatu daerah. Indeks ketahanan pangan yang biasa digunakan dalam mengukur ketahanan pangan seperti yang ada pada indikator ketahanan pangan di bawah ini sebagai berikut :

- a. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan air bersih. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan air bersih, padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
- b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.
- d. Persentase Rumah Tangga tanpa akses listrik.
- e. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun.
- f. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
- g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
- h. Persentase balita tinggi badan di bawah standar (*stunting*).
- i. Angka harapan hidup saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.

Bila melihat kondisi di wilayah Kecamatan Wonosari dalam mengukur indeks ketahanan pangan di atas, posisi kecamatan Wonosari berada pada level sangat tangguh dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dan indeks tersebut dapat dibuktikan dengan hasil jawaban dari beberapa informan penelitian orang penting pada pemerintah kecamatan Wonosari bapak Neng Akerta ketika di wawancarai seperti tanggapan informan penelitian di bawah ini sebagai berikut :

“ Akses air bersih di desanya sudah ada dari perusahaan air minum atau PAM daerah, tetapi kondisinya ada air yang belum begitu jernih, sementara harapannya air yang dapat dikonsumsi harus dari sumber air yang jernih. Hal ini hanya terjadi di beberapa dusun kami, tetapi untuk menanggulangnya banyak rakyat dengan kemampuan sendiri melakukannya dengan menggunakan sumur suntik atau DAP. Jadi untuk kebutuhan air bersih warga dengan mudah memperoleh terhadap akses air bersih di desanya. tetapi untuk desa-desa masih pada tahap persiapan seperti desa SP1, SP2 dan SP3 akan diupayakan

pengadaan untuk air bersih melalui saluran PAM tersambung ke desa tersebut (wawancara tanggal 22 Juni 2021)".

Berdasarkan penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan dari segi ketersediaan air bersih untuk wilayah Kecamatan Wonosari telah tersedia, tetapi di beberapa dusun masih ada kualitas air dari sumber PDAM yang airnya belum jernih. Begitu juga dengan sambungan PDAM masih ada desa yang belum tersambungkan air dari sumber PDAM daerah Kabupaten Boalemo.

Kondisi ini juga diperkuat keterangan salah satu informan dari staf desa di wilayah Kecamatan Wonosari, sebagai berikut :

"Secara keseluruhan desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari telah tercukupi kebutuhan air bersihnya, namun ada juga masalah terhadap kualitas air yang dihasilkan. Tetapi bagi desa SP1, SP2 dan SP3 pemerintah daerah berupaya untuk mengadakan sambungan PDAM di desa-desa yang masih belum tersambung PDAM. Dengan jawaban tersebut pemerintah desa melalui pemerintah kecamatan mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab pemerintahan dalam menyediakan akses air bersih kepada desa-desa yang belum memiliki saluran PDAM, untuk mengantisipasinya dilakukan dengan penggunaan sumur suntik, tetapi sumur suntik harus berbaringan dengan aliran listrik masuk di desa tersebut. Sehingga kendala pengadaan air bersih akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Boalemo untuk pengadaannya.

Pernyataan informan penelitian di atas mengenai ketersediaan air di wilayah Kecamatan Wonosari akan disesuaikan dengan hasil observasi serta jawaban informan penelitian dengan menggunakan indikator ketahanan pangan yang menunjukkan sebagai berikut :

**a. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan air bersih. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan air bersih, padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.**

Bila dilihat dari data yang telah ada bahwa wilayah kecamatan Wonosari hampir disemua desa yang ada telah memiliki akses air bersih yang diperoleh melalui sumur suntik dan ada juga bersumber dari PDAM yang disalurkan kerumah-rumah warga. Demikian juga dengan kebutuhan beras,

jagung, ubi kayu dan ubi jalar telah terpenuhi di wilayah kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Harapan ketika ditemui di kantor desa harapan menyampaikan terhadap ketersediaan air bersih mengemukakan warganya telah cukup tersedia akses air bersih melalui pengairan, ada sumbernya dari PDAM, dan ada juga dari sumber air tanah yang diperoleh melalui sumur suntik atau DAP.

**b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.**

Bila melihat dari hasil observasi kondisi warga transmigrasi dan warga etnis lokal tidak dalam kondisi pada garis kemiskinan, hampir rata-rata warga transmigrasi dan warga etnis lokal yang ada di wilayah kecamatan Wonosari telah memiliki kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga dapat ditunjukkan sebagian besar rumah warga transmigrasi telah permanen, begitu juga rumah tinggal warga etnis lokal. Semua ini terjadi akibat dari etos kerja warga masyarakat yang bergerak diberbagai sektor usaha, misalnya pengolahan pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor industri dan perdagangan menambah penghasilan rumah tangga dan berakibat pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari. Sehingga melihat atau menentukan warga masyarakat pada taraf kemiskinan di wilayah Kecamatan Wonosari dilihat dari kondisi fisik dan perolehan lahan pada pengolahan pertanian warga masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi bila ukuran kemiskinan itu dilihat dari pendapatan perkapita masih perlu penelitian lebih lanjut.

**c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.**

Warga transmigrasi dan warga etnis lokal pengeluaran untuk pangan tidak membebani warga masyarakatnya, karena kebutuhan akan pangan telah dipenuhi dengan mengelola pertanian, perkebunan, peternakan, industri rumahan dan sektor perdagangan yang dilakukan oleh warga masyarakatnya pengeluaran 65% tidak terserap semua, mengapa untuk kebutuhan pangan

bagi warga transmigrasi dan warga etnis lokal terbantuan dengan usaha pertanian, peternakan, perkebunan, industri dan perdagangan telah membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap ketersediaan pangan. Bahkan pengeluaran 65% tidak terserap, karena semua telah mereka lakukan sendiri untuk memenuhi kebutuhan akan pangan. Sehingga prosentase pengeluaran untuk pangan tidak terpakai, tetapi digunakan untuk keperluan kebutuhan lainnya.

#### **d. Persentase Rumah Tangga tanpa akses listrik.**

Warga transmigrasi semua warganya telah menikmati listrik dan hampir tidak ditemukan desa yang belum menikmati listrik. Kalaupun ada mungkin ada pada desa-desa persiapan seperti desa SP1, SP2 dan SP3 yang status desa tersebut masih tahap desa persiapan menuju desa mandiri yang dijadikan sebagai daerah untuk penempatan bagi warga transmigrasi. Disanalah akses listrik itu masih diupayakan pengadaannya oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo.

#### **e. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.**

Data untuk lamanya sekolah bagi perempuan belum memiliki data yang pasti, namun kondisi fasilitas pendidikan di kecamatan Wonosari sudah sangat cukup memadai dalam mendidik warga masyarakat khususnya bagi kaum perempuan di wilayah Kecamatan Wonosari. Seperti kehadiran Sekolah Dasar baik sekolah umum maupun sekolah iftidaiyah, sekolah Sanawiyah dan sekolah SLTP, serta sekolah SLTA dan Sekolah Madrasah.

Bila dilihat berdasarkan dari indikator dari ketahanan pangan serta hasil wawancara dan observasi pada riset kontribusi warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari terhadap ketahanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, menunjukkan Kecamatan Wonosari sangat tangguh dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sehingga pantas predikat Swasembada pangan diberikan untuk wilayah Kecamatan Wonosari. Prestasi ketahanan pangan yang diraih ini tidak terlepas dari peran serta warga Transmigrasi dan etnis lokal Gorontalo dalam mendukung program ketahanan pangan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana motto dinas pangan Pemerintah Kabupaten Boalemo :” ***Dulolo Mopumulo***”. Realisasi dari program pangan pemerintah daerah kabupaten Boalemo sesuai dengan mottonya dapat dicapai oleh pemerintah Kecamatan Wonosari, berkat kontribusi yang sangat tinggi dari warga transmigrasi yang didukung oleh warga etnis lokal Gorontalo, serta suport fasilitas dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam mewujudkan program ketahanan pangan di wilayahnya. Akhirnya kecamatan Wonosari memperoleh predikat dengan status Swasembada pangan dan menjadi wilayah lumbung pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

#### **4.3.3.Hambatan warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.**

Prestasi yang diberikan warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari terhadap ketahanan pangan bagi warga masyarakat Kabupaten Boalemo sangat besar, ini menunjukkan bahwa warga transmigrasi mendapat dukungan masyarakat lokal dan disuport oleh pemerintah Kecamatan dan pemerintah kabupaten Boalemo dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Sehingga hambatannya tidak ditemukan bila dilihat dari dukungan warga masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Justru yang terjadi adalah akses jalan dan jembatan yang sudah diberikan dengan kualitas jalan dan jembatan yang saat dilakukan pengaspalan terkadang rusak sebagian, oleh karena curah hujan yang tinggi atau jalan tersebut banyak dilewati mobil truk berbadan lebar pengangkut hasil tebu dan hasil produksi pangan lainnya, sehingga mengalami kerusakan. Inilah yang menjadi hambatannya.

Apa yang dijelaskan di atas diperkuat hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan penelitian orang penting pada pemerintah kecamatan Wonosari bapak Neng Akerta tentang hambatan warga transmigrasi

dalam pengembangan program ketahanan pangan bagi warga transmigrasi sebagai berikut :

”Pemerintah Kecamatan Wonosari mendapatkan prestasi swasembada pangan, sehingga posisi kecamatan Wonosari yang ada di kabupaten Boalemo memiliki andil terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Boalemo dan berada pada peringkat pertama setelah kecamatan Paguyaman dalam capaian keberhasilan prestasi program ketahanan pangan, sehingga predikat swasembada pangan telah diraih oleh pemerintah Kecamatan Wonosari. Bahkan telah kedua kalinya prestasi itu disandang sebagai kecamatan yang mampu mewujudkan swasembada pangan. Dampak dari predikat tersebut pada warga masyarakatnya adalah taraf hidup masyarakatnya mengalami peningkatan kesejahteraan. Kontribusi keberhasilan dalam mewujudkan swasembada pangan ini dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat di kabupaten Boalemo melalui pemasaran hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan di pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo. Mengapa karena ketersediaan pangan dapat tercukupi dan masyarakat dapat menjangkau untuk membelinya karena harga-harga tidak terlalu memberatkan penghasilan masyarakat, bila dibandingkan ketika pemerintah daerah melakukan kebijakan infor pangan atau para pelaku ekonomi mengambil hasil pangan dari daerah lain, sudah tentunya harga kurang dijangkau masyarakat dan kebijakan infor atau pedagang mengambil dari daerah lain tersebut akan dapat mempengaruhi pendapatan warga masyarakat petani, dan masyarakat tidak dapat menjangkau harga yang dibeli dari daerah lain. Sehingga itu keberhasilan warga transmigrasi dan warga lokal dalam meraih swasembada pangan dipertahankan oleh pemerintah kecamatan Wonosari sebagai penyedia pangan di kabupaten Boalemo dengan cara mensupport segala aktivitas yang dilakukan oleh warga transmigrasi dan etnis lokal dalam melaksanakan program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari (wawancara tanggal 22 Juni 2021)”.

Jawaban informan penelitian di atas menunjukkan pemerintah daerah dan warga masyarakat sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Wonosari dalam melaksanakan program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Suporting tersebut dilakukan dengan memperbaiki fasilitas pendukung dalam mendistribusikan hasil produksi pangan ke sentra-sentra pemasaran. Sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan warga transmigrasi dan warga etnis lokal

dalam menopang usaha terhadap program ketahanan pangan. Seperti perbaikan jalan yang rusak dan memperbaiki jembatan sebagai penghubung transportasi. Bahkan dukungan memberikan fasilitas listrik dan akses air ke desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari sebagai bagian dari indikator ketahanan pangan sebagaimana diuraikan di atas tentang teori indikator ketahanan pangan.

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas, memang ada hambatan warga transmigrasi dalam melaksanakan program ketahanan pangan, tetapi telah diantisipasi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil pangan petani. Hambatan teknis sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara memperbaiki fasilitas pendukung ketahanan pangan, tetapi bila yang terjadi adalah gagal panen karena musim kemarau panjang yang akan mempengaruhi produktivitas produksi pangan dimana terjadi gagal panen, maka langkah utama dalam menanggulangnya tinggal dilihat stok pangan bagi warga masyarakat kabupaten Boalemo dan lebih khusus untuk warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari. Untuk masalah gagal panen seringkali dihadapi warga transmigrasi dalam meningkatkan produksi pangan, tetapi gagal panen di wilayah kecamatan Wonosari tidak mempengaruhi akan ketersediaan pangan selama enam bulan kedepan. Semua ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Boalemo tersedia stok pangan yang cukup dalam mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat dari musim kemarau panjang.

#### **4.3.4.Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Wonosari terhadap warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.**

Pemerintah Kecamatan Wonosari telah melakukan intervensi dalam mewujudkan program ketahanan pangan bagi warga transmigrasi hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian sebagaimana yang ada pada hasil wawancara

orang penting pada pemerintah kecamatan Wonosari bapak Neng Akerta di bawah ini sebagai berikut :

“Pemerintah Kecamatan Wonosari memfasilitasi semua desa yang ada diwilayahnya khususnya dalam menyalurkan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten Boalemo dengan tidak berlaku diskriminasi kepada semua warga masyarakatnya. Dan kami selalu berkoordinasi dengan kepala desa tentang program-program desa khususnya dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Bentuk perhatian kami seperti penyaluran pupuk dan obat-obatan hama dan juga mendampingi pemerintah daerah dalam menyalurkan sumbangan peralatan pengolahan pertanian seperti traktor, bahkan benih padi pun mereka terlibat untuk semua desa. Pendampingan pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program ketahanan pangan kepada semua desa yang ada di wilayah kecamatan Wonosari sangat diperlukan dalam mensukseskan program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari (wawancara tanggal 22 Juni 2021)”.

Bila dilihat dari jawaban informan di atas upaya pemerintah kecamatan sudah sangat baik dalam mendukung usaha dari warga transmigrasi di desa-desa yang ada pada wilayah Kecamatan Wonosari, bahkan mekanisme distribusinya pun berlandaskan pada prinsip egalitarian artinya pemerintah kecamatan tidak membeda-bedakan antara warga transmigrasi dengan penduduk lokal Gorontalo. Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, menuai hasil terhadap program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran serta warga lokal dan pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Boalemo dalam mensukseskan program ketahanan pangan di kabupaten Boalemo.

Salah satu yang menggenjot keberhasilan program ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari adalah pengairan irigasi hasil intervensi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memfasilitasi irigasi di wilayah Kecamatan Wonosari dan sekitarnya. Fasilitas inilah sebagai pendukung warga masyarakatnya dalam mensukseskan ketersediaan pangan bagi warga masyarakat yang ada di

kabupaten Boalemo. Dan bukan hanya warga Kabupaten Boalemo yang menikmati hasil produksi pangan berasal dari kecamatan Wonosari. Tetapi hasil pangan Kecamatan Wonosari telah didistribukan kepasar-pasar yang ada di kota Gorontalo dan bahkan kehampir semua wilayah di Provinsi Gorontalo pasti ada produksi pangan dari Kecamatan Wonosari. Inilah suatu upaya pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari, dengan kebijakan perbaikan sarana pendukung dalam pemasaran hasil-hasil produksi pangan warga masyarakat Transmigrasi di Kecamatan Wonosari seperti perbaikan akses jalan dan jembatan yang rusak dan kebijakan tersebut telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga transmigrasi dan penduduk lokal Gorontalo yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil riset tentang kontribusi warga Transmigrasi terhadap Ketahanan pangan di kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari terhadap ketahanan pangan bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo sangatlah besar. Dimana warga transmigrasi telah berkontribusi pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri rumahan, sektor perdagangan dan pada sektor pendapatan daerah PAD berupa pajak dan retribusi.
2. Indeks Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo berada pada level sangat tangguh. Karena beberapa indikator yang dijadikan sebagai acuan menilai ketahanan pangan terpenuhi sebagian besar atas indikator ketahanan pangan tersebut. Namun juga ada data yang belum terisi pada profil kecamatan Wonosari, sesuai ukuran indeks ketahanan pangan. Untuk itu masih perlu ditelusuri lagi dalam melengkapi penilaian indeks ketahanan pangan di Kecamatan Wonosari tersebut. Walaupun demikian indeks yang belum terpenuhi itu, ketika dilihat dari data hasil penetapan status di enam belas desa di Kecamatan Wonosari berada pada level status desa swasembada. Ini berarti beberapa indikator dari setiap desa telah memenuhi syarat dalam menjawab indikator indeks ketahanan pangan bagi pemerintah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo .
3. Hambatan warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo tidak dapat ditemukan, namun hanya pada beberapa kerusakan infrastruktur yang telah dibangun Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo mengalami kerusakan

karena kondisi posmayor. Dimana infrastruktur jalan, jembatan sebagai akses dalam menghubungkan hasil produksi pangan rusak karena faktor alam dan karena jalan desa dan kecamatan dilalui oleh mobil truk berbadan besar yang selalu melintasi jalan yang ada, menuju tempat pengolahan pabrik Gula Tolangohula. Demikian juga dengan kerusakan jembatan penghubung yang rusak karena diterpa oleh air bah sebagai akibat dari curah hujan yang sangat tinggi. Tetapi semua kerusakan telah diperbaiki oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam rangka memfasilitasi program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

4. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Wonosari terhadap warga transmigrasi di dalam membangun ketahanan pangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan melakukan distribusi dan koordinasi kepada kepala-kepala desa dalam melaksanakan program ketahanan pangan seperti pendistribusian bantuan pupuk dan peralatan pertanian dengan mendampingi pemerintah daerah pada saat mendistribusikan kepada warga transmigrasi dan penduduk lokal. Demikian juga dengan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan program ketahanan pangan pemerintah kecamatan selalu melaksanakan baik itu dikantor camat sampai dengan kunjungan ke desa-desa menemui warga masyarakatnya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan terhadap hasil riset tentang kontribusi warga transmigrasi di kecamatan Wonosari terhadap ketahanan pangan di kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Kontribusi warga transmigrasi terhadap ketahanan pangan dikecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, patut diberikan apresiasi oleh warga masyarakat lokal dan pemerintah daerah kabupaten Boalemo.

- Bentuk apresiasi yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan kepada warga transmigrasi dalam mendukung program ketahanan pangan.
2. Ketercapaian dari indeks ketahanan pangan dari penetapan level sangat tangguh untuk dapat dipertahankan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Beberapa indikator yang belum jelas data supaya ditelusuri lagi dan dilakukan usaha dalam mewujudkan standar indikator indeks ketahanan pangan tersebut. Bila pemerintah daerah dapat memenuhi indikator tersebut, maka prestasi ketahanan pangan menuju swasembada pangan akan dapat dipertahankan oleh pemerintah kecamatan Wonosari, sebagai bagian dari wilayah Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Pencapaian prestasi ini akan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wonosari dan ketersediaan pangan bagi warga masyarakat yang ada di wilayah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
  3. Pemerintah daerah harus mengatasi segala hambatan yang diperlukan dalam menunjang ketahanan pangan seperti perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan. Agar supaya hasil-hasil produksi yang telah dicapai oleh warga transmigrasi dapat dipasarkan pada sentra-sentra perdagangan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.
  4. Program-program pemerintah daerah kabupaten Boalemo yang saat ini sangat gencar dalam mendukung program ketahanan pangan dari warga transmigrasi dapat dilanjutkan, siapapun yang menjadi kepala daerah di kabupaten Boalemo. Demikian juga dengan pemerintahan kecamatan Wonosari serta kepala-kepala desa untuk mendukung apa yang dilakukan oleh warga transmigrasi seperti pengolahan pertanian, usaha peternakan, usaha perkebunan, usaha industri rumahan dan usaha perdagangan.
  5. Kondisi hubungan harmonis yang telah terbangun antara warga transmigrasi dan etnis lokal Gorontalo tetap dipelihara dengan tidak henti-hentinya pemerintah daerah Kabupaten Boalemo melalui pemerintah Kecamatan dan pemerintahan desa untuk selalu mensosialisasikan konsep membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme yang

berlandaskan kepada dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 dalam membentuk kesadaran warga masyarakat kabupaten Boalemo untuk dapat hidup berdampingan melaksanakan program ketahanan pangan di Wilayah Pemerintah daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi, Haji. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta, Rineka Cipta
- Andriani Duri, Dkk. 2013. *Metode Penelitian*. Banten. Universitas Terbuka.
- Lukum, Roni. 2017” *Membangun Keharmonisan antar etnis Tionghoa dan etnis lokal dalam Perspektif Ketahanan Nasional di Kota Gorontalo*” Laporan Hasil Penelitian.
- Lukum, Roni. 2010. *Pendapat Masyarakat Terhadap Pembagunan Manusia Di Kabupaten Bone Bolango Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah*. Gorontalo. Tesis UGM.
- Lukum, Roni, 2021. *Membangun Tradisi Multikulturalisme di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Ketahanan Nasional*, Ideas Publishing.
- Lukum, Roni, 2020. *Membangun Tradisi Multikulturalisme di Indonesia Dalam Perspektif Ketahanan Nasional*, Ideas Publishing.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. ALFABETA
- Kymlicka, Will. 2011 “ *Kewarganegaraan Multikultural*”. Penerbit LP3ES.
- <http://www.berdesa.com>
- Jurnal Industri pertanian ISSN 2656-6559 Volume 01. Tahun 2019 hal 2*
- <https://jdlh.bpk.go.id/2012/03> Kebijakan Pemerintah Dalam Pencapaian Swasembada
- <http://www.bulog.co.id/beraspangan>)
- peraturan menteri Pertanian No. 15/Permentan/Rc.110/1/2010
- (<https://Kompaspedia,ld> ketahanan pangan sejarah, perkembangan,)
- (<http://www.kolaspintar>blog>)
- <https://www.berdesa.com>
- dr Suparyanto.blogspot.com.teori*

## **LAMPIRAN :1**

### **INSTRUMEN PENELITIAN**

#### **KETAHANAN PANGAN BAGI WARGA TRANSMIGRASI DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021**

#### **I. Kontribusi Warga Transmigrasi bagi Pemerintah daerah Kecamatan Wonosari sbb :**

##### **A. Kontribusi pada bidang pertanian dan perkebunan**

##### **1. Pertanyaan untuk pemerintah kecamatan Wonosari terhadap usaha di sektor pertanian dan perkebunan :**

1. Bagaimana pandangan bapak kondisi areal pertanian dan perkebunan sebelum kedatangan warga transmigrasi di wilayah kecamatan wonosari kabupaten Boalemo.
2. Menurut bapak apakah warga transmigrasi dapat merubah kondisi areal pertanian dan perkebunan di wilayah kecamatan Wonosari.
3. Dapatkah disampaikan kontribusi pertanian dan perkebunan yang diberikan warga transmigrasi untuk wilayah kecamatan Wonosari.
4. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi di bidang pertanian dan perkebunan mempengaruhi pendapatan asli daerah kebuapaten Boalemo khususnya bagi pemerintah kecamatan Wonosari?
5. Berapah angka PAD saat ini bagi pemerintah kecamatan Wonosari yang diperoleh dari kontribusi warga transmigrasi di sektor pertanian dan perkebunan.
6. Dapatkah kontribusi dari warga transmigrasi disektor pertanian dan perkebunan diperoleh melalui data-data disetiap desa yang ada warga transmigrasi.
7. Apa yang menjadi harapan masyarakat yang ada baik warga lokal dan warga transmigrasi dalam pengembangan di sektor pertanian dan sektor perkebunan di wilayah kecamatan Wonosari.
8. Menurut bapak berapa ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk di Kecamatan Wonosari? (Fd).
  - a. Stok beras
  - b. Stok jagung
  - c. Stok ubi jalar
  - d. Stok ubi kayu dll.
9. Menurut bapak berapa produksi yang akan dihasilkan pertahun oleh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. (input /output). (O).

10. Apakah ada perubahan stok untuk produksi pangan setiap tahun (Ast).
11. Apakah kecamatan Wonosari menerima infor dari pemerintah kabupaten Boalemo khususnya bagi ketersediaan pangan di wilayah bapak. (M).
12. Apakah pemerintah Kecamatan atau pemerintah kabupaten Boalemo melakukan ekspor terhadap pangan yang ada diwilayah kecamatan Wonosari atau Pemerintah Kabupaten Boalemo? (X).
13. Apakah diwilayah kecamatan Wonosari menyediakan pakan ternak bagi kebutuhan akan peternakan di wilayah bapak? (F).
14. Bagaimanakah dengan ketersediaan bibit bagi pengembangan program pangan di wilayah bapak? (S).
15. Apakah ada pabrik pangan atau non pangan diwilayah bapak atau wilayah terdekat dalam menampung hasil pangan warga masyarakat? (I).
16. Apa ada yang susut dari hasil pangan di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. (tercecer /W).
17. Apa ada kebutuhan lain yang disalurkan oleh pemerintah kecamatan Wonosari dalam menunjang program ketahanan pangan? (Rou)

**2. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa terhadap usaha disektor pertanian dan perkebunan:**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kehadiran warga transmigrasi di desa bapak.
2. Apa kontribusi warga transmigrasi di desa bapak.
3. Bagaimana pandangan bapak dengan sektor pertanian dan perkebunan yang dikembangkan warga transmigrasi di desa bapak.
4. Apakah hasil pertanian dan perkebunan dapat merubah kehidupan kesejahteraan bagi warga masyarakat di desa bapak.
5. Berapa angka kontribusi PAD setiap tahun yang diberikan warga transmigrasi melalui sektor pertanian dan perkebunan untuk desa yang bapak pimpin.
6. Apakah keberhasilan warga transmigrasi dapat memotivasi kerja warga lokal dalam sektor pertanian dan perkebunan.
7. Apa yang bapak lakukan bila ada warga transmigrasi membutuhkan perijinan usaha di sektor pertanian dan perkebunan di desa bapak.
8. Bagaimana bapak menghadapi bila ada warga bapak khususnya warga transmigrasi bila terjadi persaingan usaha dengan warga lokal.
9. Menurut bapak apakah warga transmigrasi memiliki tempat yang penting dalam membangun desa yang bapak bina.
10. Bagaimana hubungan interaksi antara etnis lokal dengan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di desa bapak.
11. Saat ini berapa hektar tanah yang dimiliki warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di desa bapak.

12. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor pertanian dan perikanan seperti apa.

**3. Pertanyaan untuk warga masyarakat di setiap desa yang ditempati oleh warga transmigrasi di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tanggapan pengembangan usaha disektor pertanian dan perkebunan :**

**Untuk etnis lokal :**

1. Bagaimana pandangan anda tentang kehadiran warga transmigrasi di desa anda.
2. Apa yang anda rasakan ketika warga transmigrasi dalam membangun desa anda melalui sektor pertanian dan perkebunan.
3. Apakah anda mendukung usaha dari warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di desa anda.
4. Apa ada manfaat yang anda terima dengan kehadiran warga transmigrasi di desa anda.
5. Bila bermanfaat bagi anda, apakah anda dapat bekerjasama dengan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di desa anda.
6. Seperti apa keberhasilan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di desa anda.

**4. Pertanyaan untuk warga transmigrasi tanggapan atas usaha disektor pertanian dan perkebunan sbb :**

1. Bagaimana pandangan anda ketika awal pertama kali memasuki desa dalam penempatan sebagai warga transmigrasi.
2. Apa yang anda lakukan dalam membangun hubungan dengan etnis lokal di wilayah penempatan anda.
3. Apa kesulitan yang anda rasakan dalam membangun desa khususnya dalam pengembangan usaha anda disektor pertanian dan perkebunan.
4. Dapatkah anda kemukakan hasil yang bapak/ibu peroleh dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di desa yang anda tempati.
5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi aktivitas bapak dalam pengembangan usaha disektor pertanian dan perkebunan.
6. Berapa pajak yang anda berikan kepada pemerintah desa setiap tahun.

**5. Pertanyaan untuk pemerintah daerah Kabupaten Boalemo khususnya dinas pangan usaha disektor pertanian dan perkebunan sbb :**

1. Bagaimana pandangan bapak dengan kehadiran warga transmigrasi di daerah bapak khususnya warga transmigrasi yang ada di kecamatan Wonosari.

2. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam mendukung ketahanan pangan bagi warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari.
3. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi disektor pertanian dan perkebunan sangat berpengaruh bagi pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo.
4. Dapatkah bapak memberikan gambaran mengenai keberhasilan warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari dalam mengembangkan usaha di sektor pertanian dan perkebunan.
5. Dapatkah diberikan gambaran singkat tentang kondisi ketahanan pangan khususnya kontribusi warga transmigrasi yang ada di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## **B. Kontribusi pada bidang peternakan.**

### **1.Pertanyaan untuk pemerintah kecamatan Wonosari usaha disektor peternakan:**

1. Bagaimana pandangan bapak kondisi peternakan sebelum kedatangan warga transmigrasi di wilayah kecamatan wonosari kabupaten Boalemo.
2. Menurut bapak apakah warga transmigrasi dapat merubah kondisi peternakan diwilayah kecamatan Wonosari.
3. Dapatkah disampaikan kontribusi disektor usaha peternakan yang diberikan warga transmigrasi untuk wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
4. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi di sektor peternakan mempengaruhi pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo, khususnya bagi pemerintah kecamatan Wonosari?
5. Berapah angka PAD saat ini bagi pemerintah kecamatan Wonosari yang diperoleh dari kontribusi warga transmigrasi di sektor usaha pengembangan peternakan.
6. Dapatkah kontribusi dari warga transmigrasi disektor peternakan diperoleh melalui data-data disetiap desa yang ada warga transmigrasi.
7. Apa yang menjadi harapan masyarakat yang ada baik warga lokal dan warga transmigrasi dalam pengembangan di sektor peternakan di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

### **2.Pertanyaan untuk Pemerintah Desa usaha disektor peternakan:**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kehadiran warga transmigrasi di desa bapak dalam pengembangan usaha disektor peternakan.
2. Apa kontribusi warga transmigrasi dalam pengembangan usaha di sektor peternakan di desa bapak.
3. Bagaimana pandangan bapak dengan sektor peternakan yang dikembangkan warga transmigrasi di desa bapak.

4. Apakah hasil upaya pengembangan di sektor peternakan dapat merubah kehidupan kesejahteraan bagi warga masyarakat di desa bapak.
5. Berapa angka kontribusi PAD setiap tahun yang diberikan warga transmigrasi melalui sektor usaha pengembangan peternakan untuk desa yang bapak pimpin.
6. Apakah keberhasilan warga transmigrasi dapat memotivasi kerja warga lokal dalam sektor usaha pengembangan peternakan di desa yang bapak pimpin.
7. Apa yang bapak lakukan bila ada warga transmigrasi membutuhkan perijinan usaha di sektor usaha pengembangan peternakan di desa bapak.
8. Bagaimana bapak menghadapi bila ada warga bapak khususnya warga transmigrasi bila terjadi persaingan usaha disektor upaya pengembangan peternakan dengan warga lokal.
9. Menurut bapak apakah warga transmigrasi memiliki tempat yang penting dalam membangun desa khususnya pengembangan usaha disektor peternakan yang bapak bina.
10. Bagaimana hubungan interaksi antara etnis lokal dengan warga transmigrasi dalam mengembangkan usaha sektor peternakan di desa bapak.
11. Saat ini berapa hektar tanah yang dimiliki warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor peternakan di desa bapak.
12. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor peternakan seperti apa. Maksudnya jenis atau bentuk pengembangan usaha peternakan.

**3. Pertanyaan untuk warga masyarakat di setiap desa yang ditempati oleh warga transmigrasi di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo usaha di sektor peternakan :**

**Untuk etnis lokal tanggapan usaha disektor peternakan :**

1. Bagaimana pandangan anda tentang kehadiran warga transmigrasi di desa anda dalam pengembangan usaha peternakan.
2. Apa yang anda rasakan ketika warga transmigrasi dalam membangun desa anda melalui sektor peternakan.
3. Apakah anda mendukung usaha dari warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor peternakan di desa anda.
4. Apa ada manfaat yang anda terima dengan kehadiran warga transmigrasi di desa anda terhadap usaha pengembangan sektor peternakan.
5. Bila bermanfaat bagi anda, apakah anda dapat bekerjasama dengan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor peternakan di desa anda.
6. Seperti apa keberhasilan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor peternakan di desa anda.

**4. Pertanyaan untuk warga transmigrasi usaha disektor peternakan sbb :**

1. Bagaimana pandangan anda ketika awal pertama kali memasuki desa dalam penempatan sebagai warga transmigrasi.
2. Apa yang anda lakukan dalam membangun hubungan dengan etnis lokal di wilayah penempatan anda.
3. Apa kesulitan yang anda rasakan dalam membangun desa khususnya dalam pengembangan usaha anda disektor peternakan.
4. Dapatkah anda kemukakan hasil yang bapak/ibu peroleh dalam mengembangkan sektor usaha peternakan di desa yang anda tempati.
5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi aktivitas bapak dalam pengembangan usaha disektor peternakan.
6. Berapa pajak yang anda berikan khususnya dari hasil usaha pengembangan peternakan kepada pemerintah desa setiap tahun.

**5.Pertanyaan untuk pemerintah daerah Kabupaten Boalemo khususnya dinas pangan usaha disektor peternakan sbb :**

1. Bagaimana pandangan bapak dengan kehadiran warga transmigrasi di daerah bapak khususnya warga transmigrasi yang ada di kecamatan Wonosari dalam usaha pengembangan usaha di sektor peternakan.
2. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam mendukung ketahanan pangan bagi warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari khususnya usaha pengembangan disektor peternakan bagi warga transmigrasi.
3. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi disektor peternakan sangat berpengaruh bagi pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
4. Dapatkah bapak memberikan gambaran mengenai keberhasilan warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari dalam mengembangkan usaha di sektor peternakan.
5. Dapatkah diberikan gambaran singkat tentang kondisi ketahanan pangan khususnya kontribusi warga transmigrasi pada pengembangan usaha peternakan yang ada di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
6. Apakah produksi hasil peternakan yang dihasilkan dari usaha warga transmigrasi telah memenuhi kebutuhan akan pangan warga masyarakat di kabupaten Boalemo.
7. Apakah pemerintah Kabupaten Boalemo masih menerima impor atau mengajukan impor dalam memenuhi kebutuhan pokok bagi warga masyarakat Kabupaten Boalemo.
8. Berapa kontribusi pangan yang diberikan kabupaten Boalemo terhadap daerah Provinsi Gorontalo.

**C.Kontribusi pada bidang perdagangan.**

### **1. Pertanyaan untuk pemerintah kecamatan Wonosari usaha disektor perdagangan :**

1. Bagaimana pandangan bapak kondisi sektor usaha perdagangan sebelum kedatangan warga transmigrasi di wilayah kecamatan wonosari kabupaten Boalemo.
2. Menurut bapak apakah warga transmigrasi dapat merubah kondisi usaha perdagangan di wilayah kecamatan Wonosari.
3. Dapatkah disampaikan kontribusi disektor usaha perdagangan yang diberikan warga transmigrasi untuk wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
4. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi disektor perdagangan mempengaruhi pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo, khususnya bagi pemerintah kecamatan Wonosari?
5. Berapakah angka PAD saat ini bagi pemerintah kecamatan Wonosari yang diperoleh dari kontribusi warga transmigrasi disektor usaha pengembangan perdagangan.
6. Dapatkah kontribusi dari warga transmigrasi disektor perdagangan diperoleh melalui data-data disetiap desa yang ada pada warga transmigrasi.
7. Apa yang menjadi harapan masyarakat yang ada baik warga lokal dan warga transmigrasi dalam pengembangan disektor usaha perdagangan di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

### **2. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa usaha disektor perdagangan :**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kehadiran warga transmigrasi di desa bapak dalam pengembangan usaha disektor perdagangan.
2. Apa kontribusi warga transmigrasi dalam pengembangan usaha di sektor perdagangan di desa bapak.
3. Bagaimana pandangan bapak dengan sektor perdagangan yang dikembangkan warga transmigrasi di desa bapak.
4. Apakah hasil upaya pengembangan di sektor perdagangan dapat merubah kehidupan kesejahteraan bagi warga masyarakat di desa bapak.
5. Berapa angka kontribusi PAD setiap tahun yang diberikan warga transmigrasi melalui sektor usaha pengembangan perdagangan untuk desa yang bapak pimpin.
6. Apakah keberhasilan warga transmigrasi dapat memotivasi kerja warga lokal dalam sektor usaha pengembangan perdagangan di desa yang bapak pimpin.
7. Apa yang bapak lakukan bila ada warga transmigrasi membutuhkan perijinan usaha disektor usaha pengembangan perdagangan di desa bapak.
8. Bagaimana bapak menghadapi bila ada warga bapak khususnya warga transmigrasi bila terjadi persaingan usaha disektor upaya pengembangan perdagangan dengan warga lokal.

9. Menurut bapak apakah warga transmigrasi memiliki tempat yang penting dalam membangun desa khususnya pengembangan usaha disektor perdagangan yang bapak bina.
10. Bagaimana hubungan interaksi antara etnis lokal dengan warga transmigrasi dalam mengembangkan usaha sektor perdagangan di desa bapak.
11. Saat ini berapa usaha perdagangan yang dimiliki warga transmigrasi dalam memperkuat PAD di desa bapak.
12. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor perdagangan seperti apa jenis dan bentuknya. Maksudnya jenis atau bentuk pengembangan usaha perdagangan.

**3.Pertanyaan untuk warga masyarakat disetiap desa yang ditempati oleh warga transmigrasi di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo usaha di sektor perdagangan :**

**Untuk etnis lokal usaha disektor perdagangan:**

1. Bagaimana pandangan anda tentang kehadiran warga transmigrasi di desa anda dalam pengembangan usaha perdagangan.
2. Apa yang anda rasakan ketika warga transmigrasi dalam membangun desa anda melalui sektor perdagangan.
3. Apakah anda mendukung usaha dari warga transmigrasi dalam mengembangkan usaha disektor perdagangan di desa anda.
4. Apa ada manfaat yang anda terima dengan kehadiran warga transmigrasi di desa anda terhadap usaha pengembangan usaha disektor perdagangan.
5. Bila bermanfaat bagi anda, apakah anda dapat bekerjasama dengan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor usaha perdagangan di desa anda.
6. Seperti apa keberhasilan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor perdagangan di desa anda.

**4.Pertanyaan untuk warga transmigrasi usaha disektor perdagangan sbb :**

1. Bagaimana pandangan anda ketika awal pertama kali memulai usaha perdagangan sebagai warga transmigrasi di desa tempat anda ditempatkan.
2. Apa yang anda lakukan dalam membangun hubungan dengan etnis lokal di wilayah penempatan anda dalam mengembangkan usaha perdagangan.
3. Apa kesulitan yang anda rasakan dalam membangun desa khususnya dalam pengembangan usaha anda disektor perdagangan.
4. Dapatkah anda kemukakan hasil yang bapak/ibu peroleh dalam mengembangkan sektor usaha perdagangan di desa yang anda tempati.
5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi aktivitas bapak dalam pengembangan usaha disektor perdagangan.

6. Berapa pajak yang anda berikan khususnya dari hasil usaha pengembangan perdagangan kepada pemerintah desa setiap tahun.

**5. Pertanyaan untuk pemerintah daerah Kabupaten Boalemo khususnya dinas pangan usaha disektor perdagangan sbb :**

1. Bagaimana pandangan bapak dengan kehadiran warga transmigrasi di daerah bapak khususnya warga transmigrasi yang ada di kecamatan Wonosari dalam usaha pengembangan usaha di sektor perdagangan.
2. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam mendukung ketahanan pangan bagi warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari khususnya usaha pengembangan disektor perdagangan bagi warga transmigrasi.
3. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi disektor perdagangan sangat berpengaruh bagi pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
4. Dapatkah bapak memberikan gambaran mengenai keberhasilan warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari dalam mengembangkan usaha di sektor perdagangan.
5. Dapatkah diberikan gambaran singkat tentang kondisi ketahanan pangan khususnya kontribusi warga transmigrasi pada pengembangan usaha disektor perdagangan yang ada di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
6. Apakah hasil usaha perdagangan yang dihasilkan dari usaha warga transmigrasi telah memenuhi kebutuhan akan pangan warga masyarakat di kabupaten Boalemo.
7. Berapa kontribusi disektor perdagangan (rupiah) yang diberikan kabupaten Boalemo terhadap daerah Provinsi Gorontalo.

**D. Kontribusi pada bidang industri rumahan (kerajinan).**

**1. Pertanyaan untuk pemerintah kecamatan Wonosari disektor usaha kerajinan atau industri rumahan :**

1. Bagaimana pandangan bapak kondisi sektor usaha kerajinan atau industri rumahan sebelum kedatangan warga transmigrasi di wilayah kecamatan wonosari kabupaten Boalemo.
2. Menurut bapak apakah warga transmigrasi dapat merubah kondisi usaha kerajinan atau industri rumahan di wilayah kecamatan Wonosari.
3. Dapatkah disampaikan kontribusi disektor usaha kerajinan atau industri rumahan yang diberikan warga transmigrasi untuk wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
4. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi disektor usaha kerajinan atau industri rumahan mempengaruhi pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo, khususnya bagi pemerintah kecamatan Wonosari?

5. Berapakah angka PAD saat ini bagi pemerintah kecamatan Wonosari yang diperoleh dari kontribusi warga transmigrasi disektor usaha pengembangan usaha kerajinan atau industri rumahan.
6. Dapatkah kontribusi dari warga transmigrasi disektor usaha kerajinan atau industri rumahan diperoleh melalui data-data disetiap desa yang ada pada warga transmigrasi.
7. Apa yang menjadi harapan masyarakat yang ada baik warga lokal dan warga transmigrasi dalam pengembangan disektor usaha kerajinan atau industri rumahan di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

**2. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan :**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kehadiran warga transmigrasi di desa bapak dalam pengembangan usaha disektor usaha kerajinan atau industri rumahan.
2. Apa kontribusi warga transmigrasi dalam pengembangan usaha di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan di desa bapak.
3. Bagaimana pandangan bapak dengan sektor usaha kerajinan atau industri rumahan yang dikembangkan warga transmigrasi di desa bapak.
4. Apakah hasil upaya pengembangan di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan dapat merubah kehidupan kesejahteraan bagi warga masyarakat di desa bapak.
5. Berapa angka kontribusi PAD setiap tahun yang diberikan warga transmigrasi melalui sektor usaha pengembangan usaha kerajinan atau industri rumahan untuk desa yang bapak pimpin.
6. Apakah keberhasilan warga transmigrasi dapat memotivasi kerja warga lokal dalam sektor usaha pengembangan usaha kerajinan atau industri rumahan di desa yang bapak pimpin.
7. Apa yang bapak lakukan bila ada warga transmigrasi membutuhkan perijinan usaha disektor usaha pengembangan usaha kerajinan atau industri rumahan di desa bapak.
8. Bagaimana bapak menghadapi bila ada warga bapak khususnya warga transmigrasi bila terjadi persaingan usaha disektor upaya pengembangan usaha kerajinan atau industri rumahan dengan warga lokal.
9. Menurut bapak apakah warga transmigrasi memiliki tempat yang penting dalam membangun desa khususnya pengembangan usaha disektor usaha kerajinan atau industri rumahan yang bapak bina.

10. Bagaimana hubungan interaksi antara etnis lokal dengan warga transmigrasi dalam mengembangkan usaha sektor usaha kerajinan atau industri rumahan di desa bapak.
11. Saat ini berapa usaha kerajinan atau industri rumahan yang dimiliki warga transmigrasi dalam memperkuat PAD di desa bapak.
12. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor usaha kerajinan atau industri rumahan seperti apa jenis dan bentuknya. Maksudnya jenis atau bentuk pengembangan usaha kerajinan atau industri rumahan.

**3. Pertanyaan untuk warga masyarakat di setiap desa yang ditempati oleh warga transmigrasi di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan :**

**Untuk etnis lokal tanggapan di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan :**

1. Bagaimana pandangan anda tentang kehadiran warga transmigrasi di desa anda dalam pengembangan usaha kerajinan atau industri rumahan.
2. Apa yang anda rasakan ketika warga transmigrasi dalam membangun desa anda melalui sektor usaha kerajinan atau industri rumahan.
3. Apakah anda mendukung usaha dari warga transmigrasi dalam mengembangkan usaha di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan di desa anda.
4. Apa ada manfaat yang anda terima dengan kehadiran warga transmigrasi di desa anda terhadap usaha pengembangan usaha di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan.
5. Bila bermanfaat bagi anda, apakah anda dapat bekerjasama dengan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor usaha kerajinan atau industri rumahan di desa anda.
6. Seperti apa keberhasilan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor usaha kerajinan atau industri rumahan di desa anda.

**4. Pertanyaan untuk warga transmigrasi di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan sbb :**

1. Bagaimana pandangan anda ketika awal pertama kali memulai usaha kerajinan atau industri rumahan sebagai warga transmigrasi di desa tempat anda ditempatkan.

2. Apa yang anda lakukan dalam membangun hubungan dengan etnis lokal di wilayah penempatan anda dalam mengembangkan usaha usaha kerajinan atau industri rumahan.
3. Apa kesulitan yang anda rasakan dalam membangun desa khususnya dalam pengembangan usaha anda disektor usaha kerajinan atau industri rumahan.
4. Dapatkah anda kemukakan hasil yang bapak/ibu peroleh dalam mengembangkan sektor usaha usaha kerajinan atau industri rumahan di desa yang anda tempati.
5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi aktivitas bapak dalam pengembangan usaha disektor usaha kerajinan atau industri rumahan.
6. Berapa pajak yang anda berikan khususnya dari hasil usaha pengembangan usaha kerajinan atau industri rumahan kepada pemerintah desa setiap tahun.

**5. Pertanyaan untuk pemerintah daerah Kabupaten Boalemo khususnya dinas pangan di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan sbb :**

1. Bagaimana pandangan bapak dengan kehadiran warga transmigrasi di daerah bapak khususnya warga transmigrasi yang ada di kecamatan Wonosari dalam usaha pengembangan usaha di sektor usaha kerajinan atau industri rumahan.
2. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam mendukung ketahanan pangan bagi warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari khususnya usaha pengembangan disektor usaha kerajinan atau industri rumahan bagi warga transmigrasi.
3. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi disektor usaha kerajinan atau industri rumahan sangat berpengaruh bagi pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
4. Dapatkah bapak memberikan gambaran mengenai keberhasilan warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari dalam mengembangkan usaha disektor usaha kerajinan atau industri rumahan.
5. Dapatkah diberikan gambaran singkat tentang kondisi ketahanan pangan khususnya kontribusi warga transmigrasi pada pengembangan usaha disektor usaha kerajinan atau industri rumahan yang ada di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
6. Apakah hasil usaha usaha kerajinan atau industri rumahan yang dihasilkan dari usaha warga transmigrasi telah memenuhi kebutuhan akan pangan warga masyarakat di kabupaten Boalemo.

7. Berapa kontribusi disektor usaha kerajinan atau industri rumahan (rupiah) yang diberikan kabupaten Boalemo terhadap daerah Provinsi Gorontalo.

#### **E. Kontribusi warga transmigrasi pada sektor Pajak dan Retribusi Daerah**

##### **1.Pertanyaan untuk pemerintah kecamatan Wonosari pada sektor Pajak dan Retribusi Daerah :**

1. Bagaimana pandangan bapak kondisi sektor pajak dan retribusi daerah sebelum kedatangan warga transmigrasi di wilayah kecamatan wonosari kabupaten Boalemo.
2. Menurut bapak apakah warga transmigrasi dapat melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan Wonosari.
3. Dapatkah disampaikan kontribusi disektor pajak dan retribusi daerah yang diberikan warga transmigrasi untuk wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
4. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi disektor pajak dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo, khususnya bagi pemerintah kecamatan Wonosari?
5. Berapakah angka PAD saat ini bagi pemerintah kecamatan Wonosari yang diperoleh dari kontribusi warga transmigrasi disektor pajak dan retribusi daerah.
6. Dapatkah kontribusi dari warga transmigrasi disektor pajak dan retribusi daerah diperoleh melalui data-data disetiap desa yang ada pada warga transmigrasi.
7. Apa yang menjadi harapan masyarakat yang ada baik warga lokal dan warga transmigrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

##### **2.Pertanyaan untuk Pemerintah Desa bagi keajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah:**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kehadiran warga transmigrasi di desa bapak dalam kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah kabupaten Boalemo.
2. Apa kontribusi warga transmigrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah di desa bapak telah mensejahterakan masyarakat khususnya bagi warga masyarakat yang ada di desa yang anda tempati.

3. Bagaimana pandangan bapak dengan sektor pajak dan retribusi daerah yang diserahkan warga transmigrasi kepada pemerintah daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat di desa bapak melalui pembangunan jalan dan infrastruktur.
4. Apakah hasil upaya pembayaran di sektor pajak dan retribusi daerah oleh warga transmigrasi dapat merubah kehidupan kesejahteraan bagi warga masyarakat di desa bapak .
5. Berapa angka kontribusi pajak dan retribusi daerah setiap tahun yang diberikan warga transmigrasi untuk desa yang bapak pimpin.
6. Apakah keberhasilan warga transmigrasi dapat memotivasi warga lokal dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah di desa yang bapak pimpin.
7. Apa yang bapak lakukan bila ada warga transmigrasi yang tidak membayar pajak dan retribusi daerah di desa bapak.
8. Menurut bapak apakah warga transmigrasi memiliki tempat yang penting dalam membangun desa khususnya dalam peningkatan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
9. Apakah warga etnis lokal mengetahui betapa pentingnya warga transmigrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah khususnya bagi pemerintah kecamatan Wonosari dan bagi pemerintahan desa saat ini.

**3. Pertanyaan untuk warga masyarakat di setiap desa yang ditempati oleh warga transmigrasi di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo disektor pembayaran pajak dan Retribusi Daerah:**

**Untuk etnis lokal terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah :**

1. Bagaimana pandangan anda tentang kehadiran warga transmigrasi di desa anda dalam membangun daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah.
2. Apa yang anda rasakan ketika warga transmigrasi dalam membangun desa anda melalui sektor pajak dan retribusi daerah.
3. Apakah anda mendukung usaha dari warga transmigrasi dalam mengembangkan usaha diberbagai sektor yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah.
4. Apa ada manfaat yang anda terima dengan kehadiran warga transmigrasi di desa anda terhadap kewajiban warga transmigrasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

5. Bila bermanfaat bagi anda, apakah anda dapat bekerjasama dengan warga transmigrasi dalam mengembangkan sektor usaha usaha yang dapat menambah pendapatan asli daerah bagi desa anda.
6. Seperti apa keberhasilan warga transmigrasi dalam mengembangkan usaha produktif yang dapat meningkatkan pajak dan retribusi daerah dan berguna bagi desa anda dan khususnya untuk pemerintah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

**1. Pertanyaan untuk warga transmigrasi disektor pajak dan Retribusi Daerah sbb :**

1. Bagaimana pandangan anda terhadap etnis lokal dalam melakukan interaksi sosial di desa tempat anda membuka usaha.
2. Apa yang anda lakukan dalam membangun hubungan dengan etnis lokal di wilayah penempatan anda dalam mengembangkan berbagai usaha yang akan berpengaruh kepada kewajiban anda dalam membayar pajak dan retribusi bagi daerah.
3. Bagaimana pandangan anda terhadap pajak dan retribusi daerah.
4. Apakah anda termasuk dalam warga masyarakat yang melaksanakan kewajiban tersebut. Bila iya atau tidak apa alasannya.
5. Apakah pajak dan retribusi daerah yang anda bayar bermanfaat bagi pembangunan di desa anda atau bagi pemerintah kecamatan Wonosari dan khususnya bagi warga masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Boalemo.
6. Berapa pajak dan retribusi daerah yang anda berikan khususnya dari hasil usaha pengembangan usaha kepada pemerintah desa setiap tahun.

**2. Pertanyaan untuk pemerintah daerah Kabupaten Boalemo khususnya dinas pangan disektor Pajak dan Retribusi daerah sbb :**

1. Bagaimana pandangan bapak dengan kehadiran warga transmigrasi di daerah bapak khususnya warga transmigrasi yang ada di kecamatan Wonosari dalam memenuhi kewajibannya di sektor pajak dan retribusi daerah.
2. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam mendukung ketahanan pangan bagi warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari khususnya dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah yang telah disetor kekas daerah. Maksudnya *reword* yang didapatkan bagi warga transmigrasi dalam memudahkan pemasaran usaha-usaha produktif yang dilakukan warga transmigrasi.
3. Menurut bapak kontribusi warga transmigrasi disektor kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah sangat berpengaruh bagi pendapatan asli daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

4. Dapatkah bapak memberikan gambaran mengenai keberhasilan warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Maksudnya dalam angka-angka statistik sebelum warga transmigrasi masuk dan setelah.

## **F.Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah**

### **1.Bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam Peningkatan Asli Daerah (PAD).**

1. Dapatkah bapak menyebutkan berapa kontribusi warga transmigrasi di setiap desa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
2. Menurut bapak bila kecamatan Wonosari bergabung dengan pemerintah kabupaten Gorontalo. Apa yang akan terjadi bagi pembangunan daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
3. Apakah ada sosialisasi kepada warga masyarakat lokal tentang pentingnya menerima kehadiran warga transmigrasi di daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
4. Berapa angka rupiah yang diberikan kepada pemerintah kecamatan Boalemo atas kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan kecamatan dan desa di wilayah pemerintah kecamatan Wonosari.
5. Apakah ada peningkatan setiap tahun PAD yang bersumber dari desa-desa yang ada di Wilayah Kecamatan Wonosari?
6. Disektor mana saja kontribusi terbesar dari warga transmigrasi dari Pendapatan Asli daerah (PAD).
7. Apa yang diberikan pemerintah Kabupaten Boalemo terhadap kewajiban warga Transmigrasi di Kecamatan Wonosari terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung usaha produktif bagi warga masyarakatnya khususnya bagi warga transmigrasi.

### **2.Bagi Pemerintah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dalam Peningkatan Asli Daerah (PAD).**

1. Apa yang bapak lakukan dalam mendorong angka pendapatan asli daerah bagi pemerintah kecamatan Wonosari.
2. Apakah ada kendala dalam membina warga masyarakat terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah kecamatan Wonosari.
3. Bila dilihat dari warga masyarakat kecamatan Wonosari yang terdiri dari warga transmigrasi dan warga lokal, manakah yang memberikan kontribusi terbesar pada sektor Pendapatan Asli Daerah yang akan disetor pemerintah kecamatan Wonosari kekas Daerah.
4. Bagaimana sosialisasi pemerintah kecamatan kepada warga masyarakat bahwa warga transmigrasi memberikan kontribusi terbesar kepada daerah

dan bermanfaat bagi pembangunan di tingkat kecamatan Wonosari dan desa-desa yang ditempati oleh warga transmigrasi.

5. Apakah sosialisasi itu dilakukan, kalau iya bagaimana pengaruhnya bagi hubungan antar etnis lokal dengan warga transmigrasi.
6. Apa bentuk kegiatan pemerintah kecamatan dalam mendorong pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kabupaten Boalemo.
7. Apakah masih ada infrastruktur yang menghambat usaha produktif warga masyarakat dalam membuka dan memasarkan usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat.
8. Berapa angka pembagian PAD khususnya untuk kecamatan Wonosari dan desa yang diwilayah kecamatan Wonosari dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

### **3. Bagi Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Wonosari dalam Peningkatan Asli Daerah (PAD).**

1. Apa yang bapak lakukan dalam mendorong warga masyarakat terhadap upaya pendapatan asli daerah yang akan berpengaruh bagi pembangunan di desa yang bapak pimpin.
2. Apakah infrastruktur di desa bapak telah menunjang dalam peningkatan usaha produktif bagi warga masyarakat terhadap pengembangan usaha yang akan menunjang Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Berapa pajak yang diberikan pemerintah desa disetor ke kas daerah Kabupaten Boalemo.
4. Berapa alokasi yang diterima oleh pemerintah desa terhadap kontribusi PAD dari pemerintah Kecamatan Wonosari.
5. Bagaimana bapak menyalurkan kepada warga masyarakat tentang alokasi PAD tersebut dalam menunjang pendapatan Desa.
6. Apa program yang bapak lakukan dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dan dapat menunjang PAD bagi pemerintah Desa dan Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

## **II. Indeks Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebagai berikut :**

- a. **Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan air bersih, padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.**
  1. Apakah di desa bapak sumber air bersih yang digunakan untuk minum dan memasak, mencuci dsb mudah diperoleh.
  2. Darimana sumber air bersih yang ada di desa bapak.
  3. Apakah semua rumah tangga yang ada di desa bapak telah tersedia sumber air bersih.
  4. Bagaimana dengan pertanian, apakah semua warga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beras untuk kebutuhan sehari-hari.

5. Dapatkah digambarkan ketersediaan beras untuk setiap rumah tangga di desa bapak.
6. Dapatkah warga masyarakat menjangkau harga yang ada dipasar-pasar tradisional atau ditoko maupun dikios.
7. Bagaimana ketersediaan akan jagung bagi warga masyarakat di desa bapak untuk setiap rumah tangga.
8. Apakah warga masyarakat dapat menjangkau harga dipasar tradisional tentang kebutuhan akan jagung.
9. Demikian juga dengan ubi kayu apakah warga masyarakat di desa bapak mudah untuk memperolehnya atau rumah tangga ini sebagai produsen ubi kayu.
10. Demikian halnya akan kebutuhan ubi jalar, apakah warga masyarakat di desa bapak dengan mudah memperoleh ubi jalar.
11. Apakah bapak termasuk produsen dari ubi jalar.
12. Apakah di pasar tradisional tersedia ubi jalar.
13. Apakah daya beli masyarakat dapat menjangkau harga yang ada di pasar tradisional.

**b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.**

1. Berapa jumlah kepala keluarga yang berada digaris kemiskinan di wilayah bapak.
2. Bagaimana cara bapak dalam memberdayakan warga bapak seandainya mereka berada dalam kondisi digaris kemiskinan.
3. Apakah intervensi pemerintah desa dapat mengangkat kehidupan warga masyarakat bapak dari kondisi kemiskinan.
4. Manakah yang banyak terhadap angka kemiskinan, apakah warga lokal atau warga transmigrasi.
5. Fenomena apa yang muncul bila kondisi warga masyarakat berada dalam garis kemiskinan.

**c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.**

1. Apakah anda termasuk kelompok konsumen atau produsen dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga anda.
2. Bila anda berada pada posisi konsumen akan kebutuhan pangan, berapa persen yang anda belanjakan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan di dalam rumah tangga anda.
3. Bila anda berada pada posisi konsumen akan pangan yang berada pada kisaran 65% dari pendapatan anda, tidak membebani kebutuhan akan sandang dan kebutuhan tertier dalam rumah tangga anda.
4. Apakah ada subsidi dari pemerintah daerah dalam meringankan kebutuhan pangan anda di desa anda.

5. Dan bila anda sebagai produsen , apakah anda termasuk sebagai donatur di desa anda dalam mempermudah warga lain dalam memenuhi kebutuhan akan pangan bagi kehidupan rumah tangga lain yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan pangan.
6. Berapa ton hasil yang anda peroleh dalam setiap panen, apakah hasil panen tersebut dapat bermanfaat bagi rumah tangga yang tidak mampu memperoleh kebutuhan akan pangan di desa anda.

**d.Persentase Rumah Tangga tanpa akses listrik.**

1. Apakah ada rumah tangga yang ada di wilayah bapak yang belum menikmati atau terpasang listrik yang dikelola oleh PLN.
2. Apa yang dilakukan oleh bapak sebagai pemimpin daerah (kepala desa, camat) dalam memenuhi kebutuhan listrik disetiap rumah tangga yang tidak mampu.
3. Apa alasan warga masyarakat yang belum memiliki akses listrik di desanya atau dalam rumah disetiap warga masyarakat.

**e.Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.**

1. Apakah ada warga bapak yang memiliki limit rata-rata lama sekolah di atas 15 tahun bagi kaum perempuan.
2. Apa yang menyebabkan usia sekolah rata-rata di atas 15 tahun bagi warga masyarakat anda dari kelompok jenis kelamin perempuan di desa bapak.
3. Apa yang bapak lakukan dalam mempercepat lama sekolah bagi warga masyarakat khususnya kelompok warga jenis kelamin perempuan.
4. Apa hambatan kelompok jenis kelamin perempuan rata-rata lama sekolah di atas lima belas tahun (15).
5. Bagaimana hasilnya setelah ada intervensi kepala desa atau pemerintah kecamatan dalam mempercepat lama sekolah bagi kelompok kelamin perempuan di desa bapak.

**f.Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.**

1. Berapa jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih di desa bapak.
2. Apa yang bapak lakukan bila warga masyarakat bapak masih ada yang belum memiliki akses air bersi disetiap rumah warga bapak.
3. Bagaimana keadaan warga anda setelah mendapatkan akses air bersih.
4. Apakah pemerintah daerah memperhatikan kondisi warganya yang belum memiliki akses air bersih sebagai kebutuhan dasar bagi setiap rumah tangga di desa bapak.
5. Apakah distribusinya merata kepada seluruh rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih.

**g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.**

1. Apakah ada fasilitas kesehatan di desa bapak atau puskesmas di kecamatan bapak.
2. Bagaimana dengan ketersediaan tenaga kesehatan, apa dapat melayani kebutuhan warga masyarakat di desa bapak.
3. Apakah tenaga kesehatan itu bervariasi keahliannya.
4. Berapa jarak Puskesmas dan rumah sakit di desa yang anda tempati.
5. Apakah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas dan Puskesmas serta Rumah sakit daerah dapat memenuhi akan keselamatan kesehatan anda.
6. Tenaga kesehatan yang mana anda butuhkan dalam memenuhi akan kesehatan warga masyarakat di desa anda.
7. Apakah pemerintah daerah selalu merespon dalam permintaan warga masyarakat untuk tenaga kesehatan di wilayah bapak.
8. Dapatkah bapak menyebutkan jumlah tenaga medis di setiap kecamatan dan desa di wilayah kecamatan Wonosari.
9. Berapa angka harapan hidup warga masyarakat kecamatan Wonosari, apakah ada angka statistik terhadap angka harapan hidup.
10. Angka harapan hidup bayi, ibu melahirkan dan angka harapan hidup dari penduduk yang ada di wilayah bapak.

**h. Persentase balita tinggi badan di bawah standar (*stunting*).**

1. Berapa jumlah bayi yang ada di wilayah bermasalah dengan *stunting*.
2. Apa yang bapak lakukan dalam menanggulangi *stunting* di wilayah bapak.
3. Apa yang membuat tingginya angka *stunting* di wilayah bapak.

**i. Angka harapan hidup saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.**

1. Dapatkah bapak menunjukkan data berapa jumlah bayi yang meninggal setiap harinya.
2. Apa yang menyebabkan masih ada anak yang lahir mati sebelum atau sesudah dilahirkan.
3. Apa yang anda lakukan dalam menanggulangi tingginya mortalitas di daerah bapak.

**3). Faktor Penghambat warga Transmigrasi dalam mewujudkan ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan fokus sebagai berikut :**

**a. Hambatan perijinan Usaha**

1. Bagaimana dengan prosedur perijinan usaha di wilayah bapak.
2. Berapa lama waktu kepengurusannya.
3. Apakah tidak ada perbedaan pelayanan warga masyarakat dalam mengurus perijinan usaha di wilayah bapak.

**b. Hambatan dari gangguan etnis lokal.**

1. Bagaimana hubungan antar warga transmigrasi dan warga etnis lokal terhadap usaha yang dilakukan oleh warga transmigrasi di desa anda.
2. Apa yang bapak lakukan bila terjadi gesekan antara warga etnis lokal dengan warga transmigrasi dalam pengembangan usaha di wilayah bapak.
3. Apakah saat ini kedua etnis antara warga transmigrasi dan etnis lokal mengembangkan usaha secara bersama dalam mengembangkan usaha diberbagai sektor di wilayah bapak.

**c. Perlakuan diskriminasi pemerintah kecamatan.**

1. Bagaimana sikap bapak memperlakukan pelayanan bagi warga masyarakat bapak dalam perizinan usaha.
2. Apakah ada SOP yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat bapak.
3. Berapakah tingkat kepuasan pelayanan publik yang dimiliki organisasi yang bapak pimpin.
4. Apakah selama ini ada keluhan pelayanan yang diberikan oleh instansi bapak pimpin.
5. Apa solusi yang bapak berikan dalam meningkatkan pelayanan publik bagi organisasi yang bapak pimpin.

**4). Upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan dalam mendukung warga transmigrasi dalam Mewujudkan ketahanan Pangan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo meliputi:**

**a. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa dilingkungan kecamatan Wonosari dalam mendukung warga transmigrasi mewujudkan ketahanan pangan.**

1. Apa kontribusi pemerintah desa terhadap warga transmigrasi dalam mendukung warga transmigrasi mewujudkan ketahanan pangan.
2. Bagaimana hasil dari upaya warga transmigrasi dalam mendukung warga transmigrasi mewujudkan ketahanan pangan di desa bapak.
3. Berapa PAD yang bersumber dari usaha warga transmigrasi dalam mendukung warga transmigrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa bapak.

4. Apakah hasil yang diperoleh dari warga transmigrasi disosialisasikan kepada warga masyarakat.
5. Apakah warga masyarakat merasakan betapa pentingnya mengembangkan model negara multikulturalisme dalam membangun bersama daerah melalui usaha yang dikembangkan oleh warga transmigrasi di desa bapak.

**b. Upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Wonosari dalam mendukung warga transmigrasi mewujudkan ketahanan pangan.**

1. Apa kontribusi pemerintah kecamatan terhadap warga transmigrasi dalam mendukung warga transmigrasi mewujudkan ketahanan pangan.
2. Bagaimana hasil dari upaya warga transmigrasi dalam mendukung warga transmigrasi mewujudkan ketahanan pangan di desa bapak.
3. Berapa PAD yang bersumber dari usaha warga transmigrasi dalam mendukung warga transmigrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
4. Apakah hasil yang diperoleh dari warga transmigrasi disosialisasikan kepada warga masyarakat.
5. Apakah warga masyarakat merasakan betapa pentingnya mengembangkan model negara multikulturalisme dalam membangun bersama daerah melalui usaha yang dikembangkan oleh warga transmigrasi di daerah bapak.

**c. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam mendukung warga transmigrasi mewujudkan ketahanan pangan.**

1. Apa kontribusi pemerintah kecamatan terhadap warga transmigrasi dalam mendukung warga transmigrasi mewujudkan ketahanan pangan.
2. Bagaimana hasil dari upaya warga transmigrasi dalam mendukung warga transmigrasi mewujudkan ketahanan pangan di desa bapak.
3. Berapa PAD yang bersumber dari usaha warga transmigrasi dalam mendukung warga transmigrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Boalemo yang diperoleh dari kecamatan Wonosari.
4. Apakah hasil yang diperoleh dari warga transmigrasi disosialisasikan kepada warga masyarakat Kabupaten Boalemo.
5. Apakah warga masyarakat merasakan betapa pentingnya mengembangkan model negara multikulturalisme dalam membangun bersama daerah melalui usaha yang dikembangkan oleh warga transmigrasi di daerah bapak.

## **LAMPIRAN : 2 Dokumentasi dilapangan**

**Data yang diperlukan :**

- 1. Profil Kecamatan**
- 2. Rekomondasi Pemda**
- 3. Surat Tugas**
- 4. Dokumentasi**
- 5. Data Pangan perdesa diwilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo**
- 6. PAD dan pajak, Retribusi setiap Desa di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.**